



**PERKEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA  
DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2003 – 2014**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**AHMAD YOGGA SETIAWAN  
NIM. 080110301007**

**JURUSAN SEJARAH  
FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS JEMBER**

**2015**



**PERKEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA  
DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2003 – 2014**

**SKRIPSI**

Skripsi diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Sejarah ( S1) dan mencapai gelar Sarjana Sastra

**Oleh**

**AHMAD YOGGA SETIAWAN  
NIM. 080110301007**

**JURUSAN SEJARAH  
FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS JEMBER**

**2015**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Yogga Setiawan

NIM : 080110301007

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul *Perkembangan Industri Pariwisata di Kabupaten Jember Tahun 2003 – 2014* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Juni 2015

Yang menyatakan,

Ahmad Yogga Setiawan

NIM. 080110301007

**PERSETUJUAN**

Skripsi ini telah disetujui untuk diujikan oleh:

Dosen Pembimbing

Drs. Bambang Samsu Badriyanto M.Si

NIP. 195806141987101001

**PENGESAHAN**

Diterima dan disahkan oleh

Panitia penguji Skripsi Program Strata 1 Jurusan Sejarah Fakultas Sastra  
Universitas Jember

Pada hari :

Tanggal :

**Ketua,**

Drs. Bambang Samsu Badriyanto, M.Si

NIP. 195806141987101001

**Anggota 1,**

**Anggota 2,**

Dr.Eko Crys Endrayadi, M.Hum

NIP.197108251999031001

Dra. Dewi Salindri, M.Si

NIP. 196211061988022001

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Sastra Universitas Jember,**

Dr. Hairus Salikin, M.Ed

NIP. 196310151989021001

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kepada Allah SWT atas segala rizki dan hidayah-Nya yang telah diberikan, serta kepada junjunganku Nabi Muhammad SAW.
2. Ayahanda Suryadi, Ayahanda Sunaryo dan Ibunda Idha Laila sebagai tanda cinta kasih, hormat dan bakti.
3. Adik-adik tercinta Sonya Aristanti, Sri Kartini, dan Puji Rahayu.
4. Keluarga besar yang ada di Dusun Krajan, Desa Gumirih, Kecamatan. Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi.
5. Teman-teman S4 gank Moh. Fahmy, Moh. Irwanto dan Bagus Satriyo W.
6. Staf pengajar semua dosen Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada saya terutama Drs. Bambang Samsu Badriyanto, M.Si., selaku dosen pembimbing, Dr. Eko Crys Endrayadi, M.Hum selaku dosen penguji I, dan Dra. Dewi Salindri, M.Si selaku penguji II.
7. Kepada bapak dan ibu Guru yang senantiasa mengajariku dengan ketelatenan dan kasih sayang dari, mulai TK sampai Perguruan Tinggi. Engkau akan kukenang sepanjang hidupku.
8. Almamater Fakultas Sastra Universitas Jember tercinta.
9. Seluruh teman-temanku, baik teman terbaikku maupun angkatan 2008 (Sejarah) yang telah memberikan kontribusi, dukungan, ide yang inspiratif, dan kritikan yang konstruktif. Terima kasih atas semua kontribusi yang kalian berikan.

## MOTTO

Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah

(Abu Bakar Sibli)

Desa Mawa Cara, Negara Mawa Tata

(Peribahasa Jawa)





## PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga Allah SWT limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sumber inspirasi dan membuat penulis lebih kuat dan menatap setiap hal yang penuh optimis dan berfikir positif, dalam menunjang kemampuan penulis dalam menjalani persaingan globalisasi kerja nantinya.

Skripsi ini mengkaji tentang *Perkembangan Industri Pariwisata di Kabupaten Jember Tahun 2003 – 2014*. Penyusunan skripsi ini digunakan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan arahan kepada penulis selama penyusunan laporan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Dr. Hairus Salikin, M.Ed., Dekan Fakultas Sastra Universitas Jember,
2. Drs. Nawiyanto, M A, Ph D., Ketua Jurusan Sejarah,
3. Drs. Bambang Samsu Badriyanto, M.Si., Dosen pembimbing yang dengan sepenuh hati telah mengarahkan secara cermat dan meluangkan waktu, pikiran serta perhatian dalam penulisan skripsi ini,
4. Dr. Retno Winarni, M.Hum., selaku komisi bimbingan yang telah memperjuangkan skripsi penulis di ruang rapat,
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Sastra Jurusan Sejarah, yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh kuliah,
6. Seluruh Keluarga Besar BKMS, terima kasih atas kebersamaannya,
7. Seluruh karyawan dan staf Fakultas Sastra Universitas Jember,
8. Seluruh informan yang telah membantu terwujudnya penulisan ini selama penelitian,



9. Rekan-rekan Mahasiswa Sejarah Angkatan 2008 yang memberikan bantuan, semangat, motivasi beserta kasih sayangnya dalam menyelesaikan skripsi ini. Apa yang kita lakukan saat ini pasti suatu saat akan kita saksikan sebagai sejarah. Semoga semuanya sukses dunia dan di akhirat. Amin.

Semoga atas bantuan, pengarahan, dukungan dan bimbingannya, mudah mudahan mendapatkan balasan yang sesuai dari Allah SWT. Untuk kesempurnaan karya ilmiah ini penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak, karena penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 30 Juni 2015

Ahmad Yogga Setiawan

NIM. 080110301007

## ABSTRACT

This research is motivated by soaring PAD Jember since the program Month Visit To Jember, Jember Fashion Carnaval took place. The purpose of this study was reveal reason Jember regency government to develop tourism as an industry, what is being done Jember regency government in developing tourism, and keep track of what impact the presence of tourism to the economy and society Jember district government. This study uses history to reveal the problems that made the study. The tourism sector contributed greatly to the Local Revenue. Through the Month Visit To Jember (BBJ) government Jember promote tourism potentials possessed. BBJ is a series of sports tourism, culinary, and culture was first implemented in 2007 with the intent welcomes Indonesia's independence day. The development of tourism Jember more widely known by the creativity of local artists in a packed fashion show models of carnival along the 3.6 km. Hal this is the reason the government to develop tourism in Jember. The impact of tourism development is the increase in revenue Jember. In 2008, revenue from the tourism sector Jember only donate Rp 2.5 billion, but in 2014 the contribution of the tourism sector is able to break the Rp 12 billion, and of this total amount of Rp 1.2 billion resulting from the restaurant or culinary.

**Keywords:** Program Month Visit to Jember (BBJ), Jember Fashion Carnaval, Tourism Development, Local Revenue,

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh melonjaknya PAD Kabupaten Jember sejak program Bulan Berkunjung Ke Jember yang menggandeng Jember Fashion Carnival dilaksanakan. Tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan alasan Pemerintah Kabupaten Jember mengembangkan pariwisata sebagai industri, upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengembangkan pariwisata, dan melacak dampak apa saja dengan adanya pariwisata bagi perekonomian pemerintah kabupaten maupun masyarakat Jember. Penelitian ini menggunakan metode sejarah untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dijadikan kajian. Sektor pariwisata memberikan sumbangan besar bagi Pendapatan Asli Daerah. Melalui Program Bulan Berkunjung Ke Jember (BBJ) Pemerintah Kabupaten Jember mempromosikan potensi-potensi wisata yang dimiliki. BBJ merupakan rangkaian kegiatan wisata olah raga, kuliner, dan budaya yang pertamakali dilaksanakan pada 2007 dengan maksud menyambut hari kemerdekaan Indonesia. Perkembangan pariwisata Kabupaten Jember semakin dikenal luas dengan adanya kreativitas seniman lokal dalam mengemas pameran busana model karnaval sepanjang 3,6 km. Hal ini yang menjadi alasan pemerintah mengembangkan pariwisata di Kabupaten Jember. Dampak perkembangan pariwisata adalah peningkatan PAD Kabupaten Jember. Tahun 2008, PAD Kabupaten Jember dari sektor pariwisata hanya menyumbangkan Rp 2,5 Miliar, namun pada tahun 2014 sumbangan dari sektor pariwisata mampu menembus angka Rp 12 Miliar, dan dari jumlah total ini Rp 1,2 miliar dihasilkan dari restoran atau wisata kuliner.

**Kata Kunci:** Program Bulan Berkunjung Ke Jember, Jember Fashion Carnival, Perkembangan Pariwisata, Pendapatan Asli Daerah,

## RINGKASAN

Kabupaten Jember merupakan sebuah wilayah yang berada di ujung timur Pulau Jawa. Wilayah ini memiliki kekayaan alam yang melimpah. Salah satu kekayaan alam yang dimiliki wilayah ini adalah topografi yang bervariasi akibat keberadaan deretan pegunungan yang membentang dari barat ke timur di bagian utara dan garis pantai yang membujur dari barat ke timur di bagian selatan. Kondisi alam yang demikian menjadikan Kabupaten Jember berpotensi sebagai untuk pengembangan pariwisata. Akan tetapi, potensi alam yang kaya dengan tempat-tempat wisata belum menarik perhatian pemerintah daerah untuk mengelolanya. Kondisi ini berlangsung hingga keluarnya Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 1999 yang memberikan luas bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan dan mengelola kekayaannya. Hal ini mendorong Pemerintah Kabupaten Jember lebih serius dalam mengelola dan menangani kekayaan alamnya.

Implementasi keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan alam wilayah Jember adalah dengan menerbitkan berbagai peraturan daerah (perda) yang bisa menjadi tata laksana dalam pengelolaan pariwisata dan mendirikan Kantor Pariwisata sebagai lembaga resmi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam penanganan. Meskipun telah diterbitkan berbagai perda sebagai acuan dalam pengelolaan pariwisata dan pendirian lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, namun pariwisata Kabupaten Jember belum menunjukkan perkembangannya. Hal ini terkait dengan belum tertibnya kondisi sosial politik Kabupaten Jember akibat maraknya demonstrasi rakyat melawan pemerintah dalam menuntut tanah. Perkembangan Pariwisata Kabupaten Jember mulai menampakkan hasilnya ketika MZA. Djalal menjabat sebagai bupati selama dua periode yaitu 2005-2010 dan 2010-2015. Ketertarikan pemerintah daerah untuk lebih serius dalam mengelola pariwisata, karena sektor pariwisata memberikan sumbangan besar bagi Pendapatan Asli Daerah. Langkah awal dalam pengembangan pariwisata adalah melakukan berbagai renovasi yang

dapat menunjang pariwisata, seperti renovasi pembangunan alun-alun Kota Jember, pelebaran jalan-jalan Kota Jember, dan mengoperasikan Bandara Notohadinegara pada 2008 untuk mempermudah akses kedatangan wisatawan ke Jember.

Pembenahan infrastruktur ini diiringi dengan strategi pemerintah daerah dalam memasarkan potensi wisata. Melalui Program Bulan Berkunjung Ke Jember (BBJ) pemerintah daerah mempromosikan tempat-tempat wisata yang dimiliki Kabupaten Jember. Program BBJ mulai digarap dan dilaksanakan pada 2007 yang berisi rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia menjadi sarana promosi wisata Kabupaten Jember dengan memperkenalkan potensi-potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Jember. Perkembangan pariwisata Kabupaten Jember mulai dikenal dan dilirik wisatawan dengan keberadaan festival karnaval busana yang digagas oleh Dynan Faris. Kreativitas seniman lokal dalam mengemas pameran busana dengan model karnaval sepanjang 3,6 km ini mengangkat pariwisata Kabupaten Jember dimata masyarakat luas.

Dampak perkembangan pariwisata adalah peningkatan PAD Kabupaten Jember. Tahun 2008, PAD Kabupaten Jember dari sektor pariwisata hanya menyumbangkan Rp 2,5 miliar, namun pada tahun 2014 sumbangan dari sektor pariwisata mampu menembus angka Rp 12 miliar, dan dari jumlah total ini Rp 1,2 miliar dihasilkan dari restoran atau wisata kuliner. Akan tetapi, untuk wisata wilayah pinggiran, seperti wisata pantai kurang berkembang. Pajak pemasukan bagi PAD selama ini lebih banyak dihasilkan dari pajak hotel, restoran, dan tempat-tempat hiburan yang selama program BBJ dilaksanakan terpusat di wilayah perkotaan, sehingga wisata-wisata di daerah pinggiran kurang terangkat. Meskipun begitu, bagi masyarakat keberadaan pariwisata di daerah pinggiran memberikan peluang usaha di luar sektor usaha pertanian dan perikanan, sehingga pada musim-musim kunjungan wisata masyarakat bisa memanfaatkan keberadaan wisatawan dengan menawarkan berbagai usaha.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	<b>8</b>
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian</b> .....	<b>9</b>
<b>1.3.1 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>9</b>
<b>1.3.2 Manfaat Penelitian</b> .....	<b>9</b>
<b>1.4 Ruang Lingkup</b> .....	<b>10</b>
<b>1.5 Tinjauan Pustaka</b> .....	<b>11</b>
<b>1.6 Pendekatan dan Kerangka Teori</b> .....	<b>15</b>
<b>1.7 Metode Penelitian</b> .....	<b>20</b>
<b>1.8 Sistematika Penulisan</b> .....	<b>22</b>



<b>BAB. II</b>	<b>KONDISI ALAM DAN WISATA DI KABUPATEN JEMBER .....</b>	<b>23</b>
2.1	Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Jember .....	23
2.2	Penduduk Kabupaten Jember .....	31
2.3	Potensi Wisata Di Kabupaten Jember .....	36
2.4	Industri Pariwisata Kabupaten Jember Sebelum 2003 .....	46
<b>BAB III</b>	<b>PERKEMBANGAN PARIWISATA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN JEMBER .....</b>	<b>51</b>
3.1	Kebijakan dan Arah Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Jember .....	51
3.2	Pembenahan Infrastruktur Daerah Kabupaten Jember .....	59
3.3	Kreasi Seniman Lokal Dalam Proyek Pencarian Identitas .....	67
3.4	Bulan Berkunjung Ke Jember Wadah Promosi Pariwisata Kabupaten Jember .....	79
3.5	Dampak Industri Pariwisata Kabupaten Jember .....	85
3.5.1	Bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember .....	86
3.5.2	Bagi Perekonomian Penduduk Setempat .....	90
<b>BAB IV</b>	<b>KESIMPULAN .....</b>	<b>96</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>
	<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>108</b>

**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 2.1. Luas Wilayah Per-Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/Desa .....</b>	<b>24</b>
<b>Tabel 2.2: Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) Menurut Ketinggian Wilayah .....</b>	<b>28</b>
<b>Tabel 2.3: Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) Menurut Kemiringan Lahan .....</b>	<b>28</b>
<b>Tabel 2.4: Pertumbuhan Jumlah Penduduk di Kabupaten Jember Tahun 2003 – 2014 .....</b>	<b>35</b>
<b>Tabel 2.5: Jenis-Jenis Pariwisata di Kabupaten Jember .....</b>	<b>45</b>
<b>Tabel 3.1: Dampak JFC terhadap Pariwisata Jember .....</b>	<b>79</b>
<b>Tabel 3.2: Pendapatan Pajak Pariwisata akibat adanya JFC .....</b>	<b>83</b>
<b>Tabel 3.3: PAD Dan Pendapatan Industri Pariwisata Kabupaten Jember Tahun 2003 – 2014 .....</b>	<b>87</b>
<b>Tabel 3.4: Realisasi PAD Kabupaten Jember dari Industri Pariwisata 2003-2014 (Dalam Juta Rupiah) .....</b>	<b>89</b>

**DAFTAR SINGKATAN**

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BBJ	: Bulan Berkunjung Ke Jember
BP3	: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAU	: Dana Alokasi Umum
DPPKD	: Dinas Pengelola Pendapatan dan Keuangan Daerah
HGU	: Hak Guna Usaha
IHK	: Indek Harga Konsumen
JFC	: Jember Fashion Carnaval
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MURI	: Musium Republik Indonesia
NV. LMOD	: NV Landbouw Maatscappij Oud Djember
Otoda	: Otonomi Daerah
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PDP	: Perusahaan Daerah Perkebunan
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PNPM	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
PPBM	: Pengelolaan Pesisir Berbasis Masyarakat
PTPN	: Perseroan Terbatas Perkebunan Nasional
PUBMCK	: Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya
RAKP	: Rencana Aksi Kota Pusaka
RJMD	: Rencana Jangka Menengah Daerah
Tajemtra	: Tanggul Jember Tradisional

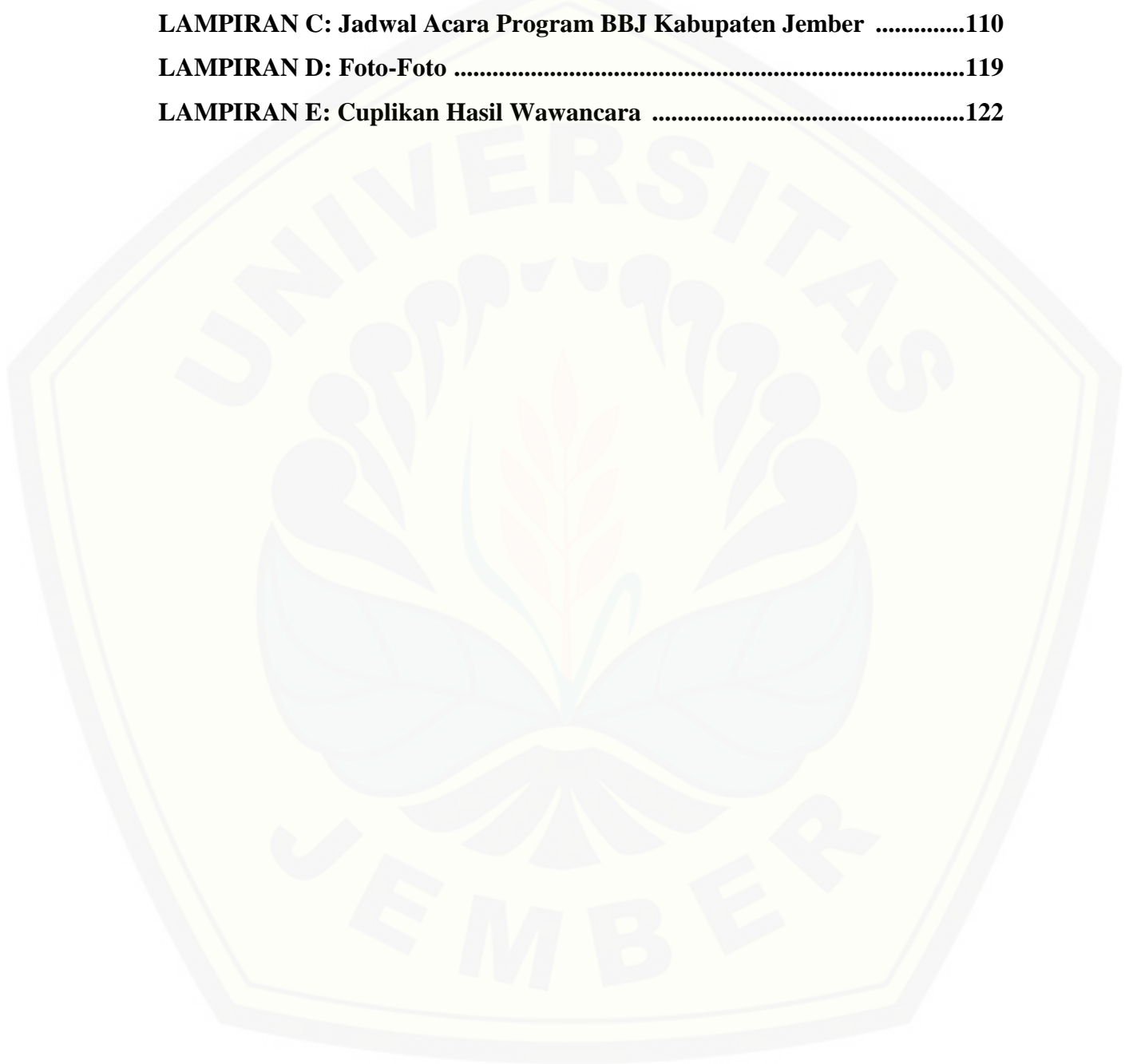
## DAFTAR ISTILAH

Destinasi Pariwisata	: Tempat tujuan wisata
Festival Pegon Hias	: Karnaval pedati yang ditarik dua ekor sapi yang biasanya diadakan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri
Good Governance	: Pemerintahan yang baik
Hadrah	: Musik yang menggunakan alat berupa rebana
Jember Fashion Carnaval	: Karnaval busana yang dipertontonkan dihadapan publik
Kesenian Reog	: Kesenian yang berisitarian dengan menggunakan topeng
Musik Patrol	: Musik yang dimainkan dengan menggunakan peralatan dari bambu yang dilubangi yang berfungsi sebagai alat untuk membangunkan masyarakat pada bulan puasa
Otonomi Daerah	: Pemberian kewenangan pada pemerintah daerah untuk mengelola kekayaan dan aset daerah
Pandhalungan	: Corak kebudayaan yang bercampur baur, namun masih menonjolkan keasliannya
Pariwisata	: Segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang kepariwisataan
Pemerintah Reformasi	: Pemerinta yang berdiri setelah runtuhnya Pemerintah Orde Baru
Pendapatan Asli Daerah	: Sumber penghasilan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dari hasil pengelolaan kekayaan alam
Petik Laut	: Upacara dalam rangka memohon keselamatan dan rizki dalam masyarakat nelayan

Redistribusi	: Pembagian baru
Regentschap	: Sebuah daerah ciptaan Kolonial Hindia Belanda setingkat kabupaten
Retribusi	: Pemungutan uang oleh pemerintah daerah sebagai balas jasa
Stakeholders	: Pemangku kepentingan
Wisata	: Kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata
Wisatawan	: Orang yang melakukan kegiatan wisata
Wisata Perkebunan	: Obyek wisata yang menonjolkan hasil perkebunan, seperti teh, kopi, dan tembakau.

**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>LAMPIRAN A: Surat Ijin Penelitian .....</b>	<b>108</b>
<b>LAMPIRAN B: Peta Kabupaten Jember .....</b>	<b>109</b>
<b>LAMPIRAN C: Jadwal Acara Program BBJ Kabupaten Jember .....</b>	<b>110</b>
<b>LAMPIRAN D: Foto-Foto .....</b>	<b>119</b>
<b>LAMPIRAN E: Cuplikan Hasil Wawancara .....</b>	<b>122</b>





## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Industri pariwisata di Indonesia pada umumnya baru berkembang pada masa Orde Baru. Hal ini disebabkan pada masa Orde Lama kondisi sosial politik dalam negeri Indonesia masih belum memungkinkan untuk mengembangkan industri pariwisata, karena pasca kemerdekaan Pemerintah Indonesia masih harus menghadapi berbagai gejolak sosial politik, seperti silih bergantinya pemerintahan yang berakibat pada ketidakstabilan politik pemerintah, Agresi Militer Belanda I dan II, peristiwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1948, dan peristiwa pembantaian PKI tahun 1965.<sup>1</sup> Berbagai peristiwa tersebut serta merta diikuti dengan kenaikan harga barang-barang dan tidak memungkinkan bagi pemerintah untuk mengurus kepariwisataan.

Memasuki masa Orde Baru, pemerintah mulai menstabilkan kondisi sosial politik, dengan mencanangkan program pembangunan, mulai dari pembangunan struktur seperti sistem pemerintahan, sistem kepartaian, sampai pembangunan infrastruktur jalan, gedung-gedung perkantoran, pertanian, dan perikanan. Berbagai

---

<sup>1</sup>Kahin menggambarkan bahwa lahirnya negara Indonesia merupakan awal kebebasan masyarakat untuk melampiaskan dendam mereka terhadap para penguasa yang selama masa Pemerintah Kolonial Hindia Belanda menginjak-injak kemerdekaan mereka. Peristiwa ini mengakibatkan terjadinya gejolak sosial yang mengiringi kemerdekaan Bangsa Indonesia. George McTurnan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia; Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik*, terj., (Jakarta: Kerjasama Pustaka Sinar Harapan dan Sebelas Maret University Press, 1995), hlm.,171.

pembangunan secara tidak langsung menumbuhkan gairah perekonomian di Indonesia, sehingga perkembangan industri tumbuh dengan cepat.<sup>2</sup> Salah satu dampak stabilitas politik Pemerintah Orde Baru adalah tumbuhnya pariwisata yang ditandai dengan berdirinya industri-industri pariwisata yang berdiri di sekitar tempat-tempat wisata. Melihat suburnya industri pariwisata di tempat-tempat wisata membuat pemerintah memandang perlu untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan kegiatan pariwisata. Ketentuan ini didasarkan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang perindustrian.<sup>3</sup> Besarnya potensi pariwisata bagi perekonomian negara yang mampu menyediakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat, dan mengaktifkan sektor lain di dalam negara penerima wisatawan, seperti industri perhubungan, transportasi, pertanian, ekonomi, perhotelan, kerajinan tangan, dan cinderamata tersebut yang menjadikan pemerintah memasukkan pariwisata menjadi bagian dari industri.<sup>4</sup>

Berdasarkan pertimbangan keadaan alam, flora dan fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, serta seni dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, pemerintah memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, guna mendorong pembangunan daerah. Kesemua itu bertujuan untuk memperbesar pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta memupuk rasa cinta tanah air, memperkaya kebudayaan nasional dan memantapkan pembinaannya. Dalam rangka memperkuat jati diri bangsa dan mempererat persahabatan antar bangsa diperlukan langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan dalam kegiatan penyelenggaraan

---

<sup>2</sup>Thomas Linblad, *Fondasi Histori Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Kerjasama Pusat Studi –Sosial Asia Tenggara Universitas Gajah Mada dan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 37.

<sup>3</sup>Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian, (Bandung: Citra Umbara, 1985), hlm. 1.

<sup>4</sup>Salah Wahab, *Manajemen Kepariwisata*, Terjemahan Frans Gromang, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1976), hlm. 5.

kepariwisataan, pemerintah akhirnya mengeluarkan Undang-Undang Kepariwisata yang dituangkan dalam Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1990.<sup>5</sup>

Adanya undang-undang yang mengatur tentang tata cara dan pelaksanaan kepariwisataan, tidak serta merta menjadikan industri pariwisata di daerah-daerah kabupaten berkembang dengan pesat. Hal ini lebih banyak dipengaruhi oleh sistem Pemerintah Orde Baru yang bersifat sentralistik, di mana pemerintah pusat memegang penuh semua kendali pemerintahan daerah dan posisi pemerintah daerah dalam sistem ini hanya sebagai pelaksana kebijakan dari pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah tidak bisa mengatur wilayahnya sendiri. Akibatnya pemerintah daerah kurang produktif dalam mengelola kekayaan alam masing-masing dan kegiatan pariwisata kurang dikelola secara maksimal.<sup>6</sup> Perkembangan industri pariwisata di daerah-daerah kabupaten baru berkembang dengan lebih maksimal setelah terjadinya perubahan dalam sistem pemerintahan. Runtuhnya Pemerintah Orde Baru yang digantikan oleh Pemerintah Reformasi berakibat pada banyaknya perbaikan dan revisi terhadap undang-undang yang menjadi dasar kebijakan pemerintah. Salah satu undang-undang yang direvisi Pemerintah Reformasi adalah undang-undang tentang pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh untuk mengurus sendiri daerahnya masing-masing. Kebijakan ini dituangkan dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (Otda).<sup>7</sup> Tujuan diberlakukannya otonomi daerah salah

---

<sup>5</sup>H. Kodhyat, *Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 1996), hlm. 90.

<sup>6</sup>Kebijakan Pemerintah Orde Baru menitikberatkan pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan penduduk secara menyeluruh dan berkesinambungan. Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) sebagai implikasi kebijakan pemerintah sentralistik dan kapilitas ala Orde Baru mendorong masyarakat untuk berpikir modern (kapitalis) dan peningkatan pembangunan berorientasi pada modal. Masuknya modal dalam kehidupan pedesaan pada sektor industri pedesaan memberikan kesempatan bagi tenaga buruh tani untuk mendapatkan pekerjaan di luar pertanian. Kebijakan Pemerintah Orde Baru dengan sistem sentralistik yang menjangkau ke desa-desa ini dapat dilihat pada kajian Hans Antlov, *Negara Dalam Desa; Patronase Kepemimpinan Lokal*, (Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2002), hlm. 54-55.

<sup>7</sup>Joko Widodo, *Good Governance: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, (Surabaya, Insan Cendekia, 2004), hlm. 27.

satunya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.<sup>8</sup> Proses pembangunan tersebut muncul dari penerapan asas partisipasi sebagai bagian dari adanya demokrasi dalam melibatkan masyarakat.

Pemberlakuan otoda secara tidak langsung menjadikan UU No. 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan mengalami revisi ulang. Pertimbangan revisi undang-undang ini berdasarkan banyaknya pasal tata laksana kepariwisataan yang kurang memadai dalam kondisi sekarang. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan undang-undang kepariwisataan pengganti yang lama, yaitu Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2009. Undang-undang ini menyatakan bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki Bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Undang-undang ini menjelaskan tentang pembangunan kepariwisataan meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan. Berdasarkan UU Kepariwisata No. 10 Tahun 2009 dan Undang-Undang tentang Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah membuat berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang ditujukan untuk mengatur dan tentang mengelola

---

<sup>8</sup>Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hlm. 33.



kekayaan dan aset daerah. Salah satunya adalah Perda tentang pariwisata yang ditetapkan melalui penarikan retribusi daerah.<sup>9</sup>

Kabupaten Jember merupakan sebuah wilayah yang berada di ujung timur Pulau Jawa. Secara geografis wilayah ini dikelilingi oleh pegunungan sehingga pada peta nampak seperti mangkuk.<sup>10</sup> Secara historis wilayah Kabupaten Jember merupakan bekas perkebunan-perkebunan pada masa Kolonial Hindia Belanda, sehingga sampai sekarang di daerah-daerah Kabupaten Jember banyak berdiri perkebunan yang dikelola baik swasta maupun pemerintah daerah. Keadaan alam yang banyak menyajikan pemandangan alam pegunungan, pantai, dan perkebunan menjadikan Kabupaten Jember berpotensi besar menjadi salah satu tempat untuk tujuan wisata. Pariwisata Jember dilihat dari jenis obyek wisatanya menyajikan obyek wisata budaya dan obyek wisata alam. Obyek wisata budaya antara lain, petik laut, festival Pegon Hias, kesenian reog, musik patrol dan hadrah, serta Jember Fashion Carnaval; sedangkan obyek wisata alam antara lain, wisata perkebunan, wisata agro di Rembangan, pesona Pantai Paseban, Getem, Puger, Papuma, Watu Ulo, Payangan, Rowo Cangak, Nanggelan dan Bandalit.<sup>11</sup>

Potensi wisata yang begitu besar yang dimiliki daerah ini, menjadikan pemerintah Kabupaten Jember berinisiatif untuk mengeluarkan Peraturan Daerah yang bisa dijadikan landasan hukum bagi pengembangan kepariwisataan. Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember meliputi Perda No. 8 Tahun 2003 yang berkaitan dengan Usaha Kepariwisata, Perda No. 9 Tahun 2003 tentang Redistribusi Ijin Usaha Kepariwisata dan Perda No. 14 Tahun 2003 tentang Redistribusi Masuk Obyek Wisata. Bersamaan dengan itu Pemerintah Kabupaten Jember juga mengeluarkan Perda No 30 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pariwisata Dan Kebudayaan

---

<sup>9</sup>Undang-Undang RI No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 1.

<sup>10</sup>Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, *Mapping Pengembangan Obyek Wisata Kawasan Selatan Kabupaten Jember*, (Jember: Pemerintah Kabupaten Jember, 2014), hlm. 3.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 4.

Kabupaten Jember. Perda No. 30 kemudian diperjelas lagi dalam Perda No. 20 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pariwisata Kabupaten Jember.<sup>12</sup> Perda ini secara tidak langsung menjadi acuan bagi pengembangan pariwisata dan dapat digunakan untuk memperkenalkan dan melestarikan kebudayaan tradisional yang belum diketahui kalangan luas, di samping sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengelola pariwisata, di antaranya adalah membuat kebijakan yang menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan kegiatan pariwisata, mendirikan Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember beserta formatur organisasi, merenovasi alun-alun sebagai simbol identitas Kota Jember, pelebaran jalan administrasi di Kota Jember dan memperbaiki jalan-jalan yang menuju area wisata di daerah pantai, serta membuka dan mengoperasikan bandara udara Notohadinagara untuk mempermudah akses kedatangan wisatawan ke Jember. Pembinaan infrastruktur ini diiringi dengan strategi pemerintah daerah dalam memasarkan potensi wisata.

Perkembangan pariwisata Kabupaten Jember mulai dikenal dan dilirik wisatawan dengan keberadaan festival karnaval busana yang digagas oleh Dynan Faris.<sup>13</sup> Jember Fashion Carnival atau masyarakat luas lebih mengenal dengan JFC adalah peragaan busana dengan mengambil model busana dunia. Kreativitas seniman lokal dalam mengemas pameran busana dengan model karnaval sepanjang 3,6 km ini mengangkat pariwisata Kabupaten Jember dimata masyarakat luas. Melalui Program BBJ yang dikemas dalam berbagai kegiatan mulai dari seni, olah raga, kuliner, wisata, religi bahkan kegiatan yang memecahkan Rekor Museum Republik Indonesia (MURI) dan diagendakan berlangsung sekitar bulan Agustus setiap tahunnya membawa pengaruh bagi PAD dan para investor.

---

<sup>12</sup>Tim Penyusun, *Wakil Rakyat Kabupaten Jember Tempo Doeloe & Sekarang*, (Jember: Sekretariat DPRD Jember, 2007), hlm. 37.

<sup>13</sup>R. Jannah, "Jember Fashion Carnival: Konstruksi Identitas dalam Masyarakat Jaringan", *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 17, 2. 2012, hlm. 2.



Acara JFC secara tidak langsung mendongkrak kunjungan wisatawan ke daerah Jember. Hal ini menginspirasi pemerintah daerah untuk membuat program yang bisa mendorong kegiatan pariwisata. Salah satu program yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember adalah Program Bulan Berkunjung Ke Jember (BBJ). Program ini diperkenalkan sejak MZA. Djalal menjabat sebagai Bupati Kabupaten Jember selama dua periode (2005-2010 dan 2010-2015). Pada awalnya Program BBJ merupakan sebuah rangkaian acara tahunan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang berisi kegiatan-kegiatan kepariwisataan, seperti JFC, Jalan Santai Tanggul Jember (Tajem), Lomba Kicau Burung, dan musik patrol. Lambat laun program BBJ beralih fungsi tidak hanya sebagai acara untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, tetapi juga berfungsi sebagai media informasi untuk mempromosikan pariwisata Kabupaten Jember, sehingga waktu pelaksanaannya pada bulan Juni sampai menjelang bulan Agustus setiap tahunnya.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas penulis tertarik untuk menulis tentang perkembangan pariwisata Kabupaten Jember yang memiliki banyak potensi wisata, baik wisata alam maupun wisata budaya. Sektor pariwisata merupakan sektor pendukung tambahan untuk menambah PAD dari sektor non migas. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah membuat daerah semakin mudah untuk mengembangkan potensi daerah masing-masing guna memajukan daerah. Salah satunya adalah memajukan industri pariwisata. Ketertarikan penulis terhadap permasalahan perkembangan pariwisata ini karena beberapa alasan. *Pertama*, bagi masyarakat yang hidup pada masa abad ke-21, kehidupan mereka tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Adanya informasi yang semakin cepat menjadikan dunia mereka semakin luas dan tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat semakin kompleks. Salah satunya adalah dunia hiburan. Semakin banyaknya informasi yang diserap masyarakat tentang dunia wisata menjadikan mereka semakin terdorong untuk memenuhi kebutuhan sekundernya. Hal ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap perputaran uang tidak hanya dalam lingkup daerah, tapi sudah menjangkau di luar daerah. Persoalan ini memunculkan

berbagai pertanyaan bagi penulis apakah dunia informasi yang semakin cepat berpengaruh terhadap perkembangan dunia pariwisata di wilayah Kabupaten Jember? *Kedua*, tersedianya data yang cukup memadai, sehingga memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi.

Beberapa alasan yang tercatat di atas tersebut mendorong penulis mengambil judul *Perkembangan Industri Pariwisata di Kabupaten Jember Tahun 2003 – 2014*. Agar penulisan skripsi ini terfokus pada kajian yang dikehendaki, perlu diadakan penjelasan mengenai pengertian yang terkandung dalam judul skripsi tersebut. Perkembangan adalah proses yang bersifat kualitatif yang berhubungan dengan perubahan sistematis, progresif dan berkesinambungan dari sesuatu.<sup>14</sup> Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.<sup>15</sup> Berdasarkan definisi di atas, maksud dari pengertian judul perkembangan industri pariwisata adalah proses pertumbuhan yang cepat dari kegiatan usaha pariwisata dalam memenuhi kebutuhan wisatawan dalam menyelenggarakan kegiatan pariwisata. Pertumbuhan yang dimaksud adalah berkaitan dengan pembangunan industri pariwisata.

Kabupaten Jember merupakan daerah yang berada di ujung timur Pulau Jawa. Secara karakteristik daerah ini memiliki budaya Jawa dan Madura. Sifat heterogenitas etnik yang demikian ini turut berperan dalam mengembangkan industri pariwisata dan asset budaya sekitarnya. Secara umum penelitian ini bertujuan ingin mengetahui perkembangan industri pariwisata yang terdapat di wilayah Kabupaten Jember dari tahun 2003 sampai tahun 2014.

---

<sup>14</sup>G. Kartasapoetra, *Kamus Sosiologi dan Kependudukan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 79.

<sup>15</sup>I Gde Pitana dan Gayatri, Putu G. *Sosiologi Pariwisata*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2005), hlm., 37.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian, baik penelitian yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, tentu terdapat suatu rumusan yang tepat untuk memberikan arahan dalam kegiatan penelitian yang dilakukan. Hal ini bertujuan agar permasalahan yang dikaji tidak menyimpang dari judul yang ditentukan dan pembahasannya fokus pada ruang lingkup. Adapun rumusan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Mengapa Pemerintah Kabupaten Jember menganggap perlu mengembangkan pariwisata sebagai industri?
- b. Upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengembangkan pariwisata?
- c. Bagaimana dampak adanya pariwisata bagi perekonomian pemerintah kabupaten maupun masyarakat Jember?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat yang diharapkan, agar hasil penelitian ini dapat menjadi sumber dan media pembelajaran bersama baik bagi penulis, masyarakat, maupun pembaca.

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

- a) Untuk menelusuri alasan Pemerintah Kabupaten Jember mengembangkan pariwisata sebagai industri.
- b) Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengembangkan pariwisata.
- c) Untuk melacak dampak apa saja dengan adanya pariwisata bagi perekonomian pemerintah kabupaten maupun masyarakat Jember.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ragam penulisan sejarah di Indonesia.
- b) Penelitian ini diharapkan digunakan sebagai acuan bagi peneliti berikutnya tentang pariwisata.

- c) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi bagi masyarakat tentang pentingnya industri pariwisata di Jember.
- d) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi media promosi, serta acuan bagi pemerintah daerah dalam usaha mengembangkan industri pariwisata.

#### 1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam lingkup sejarah sosial ekonomi dengan mengambil tempat kajian di seluruh wilayah Kabupaten Jember yang terdapat obyek wisatanya. Sementara itu, lingkup temporal diawali dari tahun 2003 dan diakhiri 2014. Tahun 2003 dijadikan batas awal bagi penelitian ini dengan alasan bahwa pada tahun ini Pemerintah Kabupaten Jember mengeluarkan kebijakan untuk mengatur dan mengelola pariwisata di daerah Jember, seperti Perda No. 8 Tahun 2003 yang berkaitan dengan Usaha Kepariwisataaan, Perda No. 9 Tahun 2003 tentang Redistribusi Ijin Usaha Kepariwisataaan, Perda No. 14 Tahun 2003 tentang Redistribusi Masuk Obyek Wisata, dan Perda No. 30 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember. Perda No. 30 kemudian diperjelas lagi dalam Perda No. 20 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pariwisata Kabupaten Jember.

Bersamaan dengan itu sebagai upaya manifestasi dari kebijakan tersebut Pemerintah Kabupaten Jember membentuk suatu badan yang menangani kepariwisataan yang diwujudkan dengan pendirian Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember. Tahun 2014 dijadikan batasan akhir dalam penelitian dengan alasan, *pertama*, bahwa untuk melihat perkembangan pariwisata diperlukan jangka waktu yang panjang. Dengan mengambil waktu sepuluh tahun akan terlihat seberapa besar perkembangan pariwisata di Kabupaten Jember. *Kedua*, dampak pariwisata dapat dirasakan oleh masyarakat maupun pemerintah daerah setelah adanya pengembangan. *Ketiga*, tahun 2014 masih merupakan rangkaian dari program BBJ yang menjadi salah satu cara pemerintah untuk mempromosikan pariwisata Kabupaten Jember.



### 1.5. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka merupakan salah satu dari rangkaian penelitian yang berguna untuk mengetahui sejauh mana penelitian mengenai masalah strategi pengembangan daya tarik wisata telah dilakukan oleh para peneliti atau penulis sebelumnya yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang perkembangan pariwisata telah pernah dilakukan, antara lain oleh Surya Wirawan dengan judul penelitian *Pengembangan Daya Tarik Wisata Bahari Secara Berkelanjutan Di Nusa Lembongan Kabupaten Klungkung*.<sup>16</sup> Wirawan menjelaskan bahwa potensi wisata yang dimiliki Pulau Nusa Lembongan ini yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Hal ini menurutnya dipengaruhi oleh kondisi alam wilayah pesisir Nusa Lembongan banyak menawarkan pemandangan yang mempersona. Daya tarik obyek wisata di Nusa Lembongan antara lain: (1) panorama alam pantai yang menawan dengan hamparan pasir putih, ombak yang baik untuk para peselancar; (2) khasanah dan keunikan alam bawah laut; (3) hutan bakau (*mangrove*); (4) karang pantai (*clift*) di pesisir barat Nusa Lembongan (*dream beach*); (5) hamparan budi daya rumput laut; (6) kehidupan komunitas nelayan; (7) fasilitas akomodasi, dan fasilitas lain di kawasan Nusa Lembongan. Surya Wirawan juga membahas tentang bentuk pengembangan daya tarik wisata bahari di Nusa Lembongan, peran *stakeholder* dalam pengembangan daya tarik wisata bahari di Nusa Lembongan dan manfaat pengembangan daya tarik wisata bahari bagi masyarakat, dunia usaha dan pemerintah. Hasil penelitian Surya Wirawan menunjukkan, bahwa bentuk pengembangan daya tarik wisata bahari Nusa Lembongan adalah menitikberatkan pada penataan dan pengembangan infrastruktur dasar, diversifikasi aktivitas dan paket wisata serta fasilitas sanitasi yang mengacu pada ketentuan lingkungan dan berkelanjutan yaitu dengan merancang sistem zonasi yang dibagi dalam beberapa daerah peruntukan (zoning),

---

<sup>16</sup>Surya Wirawan, "Pengembangan Objek Wisata Bahari Yang Berkelanjutan di Nusa Lembongan Kabupaten Klungkung", *Tesis*, tidak dipublikasikan, (Denpasar: Universitas Udayana, 2009), hlm. 3.

yaitu: Zona Inti (Zona Konservasi Alam), *Zona Buffer* (Zona Penerimaan), Zona Pengembangan (Zona Aktivitas Wisata).

Moch. Enoh membahas pariwisata dilihat dari kondisi geografis obyek-obyek wisata. Dalam bukunya yang berjudul *Geografi Pariwisata*, Enoh mendeskripsikan bahwa daya tarik wisata kebanyakan dipengaruhi oleh kondisi alam.<sup>17</sup> Melalui modifikasi alam dengan menambahkan kekurangan-kekurangan yang dimiliki obyek wisata, akan memiliki nilai tambah dan menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Enoh menggambarkan dengan memberikan perumpamaan, sebuah pantai secara alami tidak akan begitu menarik bagi para wisatawan untuk mendatanginya, namun jika pantai tersebut dimodifikasi melalui perawatan, pembersihan dari sampah dan kotoran serta hal-hal yang mendukung bagi pesona pantai akan lebih menarik dibandingkan dengan kondisi pantai yang dibiarkan secara alami tanpa adanya penambahan fasilitas. Hal ini menurutnya merupakan bagian dari strategi pengembangan wisata dengan melihat kondisi geografisnya.

Perkembangan suatu pariwisata pada dasarnya tidak terlepas dari peran serta pemerintah. Kondisi sosial politik akan menentukan bagi arah perkembangan pariwisata. Demikian juga dengan perjalanan industri pariwisata di Indonesia. H. Kodhyat dalam karyanya yang berjudul *Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia*,<sup>18</sup> memberikan gambaran sejarah perjalanan dan perkembangan pariwisata di Indonesia mulai dari masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pada masa Orde Lama kondisi industri pariwisata masih belum menampakkan perkembangan yang mencolok. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi sosial politik pemerintahan masa itu, sehingga industri pariwisata kurang mendapat dukungan penuh oleh pemerintah. Memasuki periode Orde Baru pariwisata di Indonesia mulai nampak perkembangannya dengan merubah berbagai peraturan dan kebijakan, seperti memberikan kemudahan-kemudahan bagi para wisatawan asing dalam pengurusan visa, fasilitas perhotelan, dan

---

<sup>17</sup>Moch Enoh, *Geografi Pariwisata*, (Surabaya: Unesa University Press, 1996), hlm. 4.

<sup>18</sup>H. Kodhyat, *Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 1996), hlm. 2.



infrastruktur, sehingga wisatawan tertarik untuk mengunjunginya. Hal yang paling mendukung dalam perkembangan pariwisata di Indonesia pada masa itu adalah promosi yang digalakkan secara gencar oleh pemerintah melalui media. Pada tahun 1991 pemerintah mencanangkan Program Tahun Kunjungan Wisata Indonesia yang kemudian dikenal dengan Program *Visit Indonesia Year*. Pada masa reformasi industri pariwisata mengalami kelesuan akibat kondisi politik di pemerintahan pusat. Kekacauan politik dengan banyaknya demonstrasi dan tarik ulur kepentingan para politisi berakibat pada ketakutan para wisatawan asing untuk mengunjungi obyek wisata di Indonesia. Kondisi ini secara tidak langsung berimbas pada penurunan pendapatan ekonomi dari sektor pariwisata.

Industri pariwisata merupakan sektor yang banyak memberikan pendapatan ekonomi bagi pengelolanya. Perannya yang begitu besar pengelola pariwisata meningkatkan pengetahuannya dalam memanajemen industri pariwisata. I Gede Pitana dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Pariwisata*, memberikan penjelasan tentang bagaimana strategi dan pola yang diperlukan dalam mengelola industri pariwisata.<sup>19</sup> Pitana menjelaskan bahwa pariwisata memiliki dampak yang begitu besar bagi pendapatan ekonomi yang dapat membantu perkembangan ekonomi suatu daerah maupun negara dengan *multiplier effect* yang dapat dirasakan oleh penduduk sekitar tempat wisata maupun daerah. Pitana menekankan adanya pariwisata secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat setempat baik bagi peningkatan kesejahteraan keluarga maupun bagi masyarakat, sedangkan dampak tidak langsung adalah pemasukan bagi pendapatan asli daerah di mana obyek wisata itu berada. Industri pariwisata merupakan sektor yang paling menjanjikan bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah maupun negara.

Beda dengan penelitian Pitana, Nurul Qomariah justru memberikan penjelasan bahwa, sebegus apapun obyek wisata tanpa didukung oleh pelayanan yang memadai dan memuaskan bagi wisatawan akan berakibat pada penurunan

---

<sup>19</sup>I Gde Pitana, dan I Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Yogyakarta: Andi, 2009), hlm. 3.

minat wisatawan untuk mendatangi kembali obyek wisata tersebut. Hasil karya tulisnya yang berjudul *Model Peningkatan Kepuasan Pengunjung Berbasis Customer Value: Studi Pada Pengunjung Pantai Watu Ulo Dan Pengunjung Pantai Papuma Di Kabupaten Jember*, ini dibacakan dalam Seminar Nasional dan Call for Paper, Research Methods And Organizational Studies di Jakarta 2014.<sup>20</sup> Menurut Nurul obyek wisata tidak harus menekankan pada pesona alam yang dimiliki, tetapi juga harus didukung berbagai fasilitas yang bertujuan memberikan kepuasan bagi pengunjung, sehingga wisatawan tidak merasa bosan untuk datang kembali. Kepuasan para pengunjung menjadi prioritas utama bagi pengelola obyek wisata. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen dalam memberikan kepuasan, misalnya membangun fasilitas jalan, transportasi, penginapan, tempat-tempat untuk beristirahat, permainan, rumah makan, dan parkir yang aman. Pada kesimpulannya Nurul menjelaskan bahwa jaminan kepuasan pengunjung akan memberikan dampak yang besar bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat maupun pendapatan asli daerah pemerintah kabupaten.

Pada dasarnya hasil penelitian terdahulu dengan kajian penulisan skripsi ini sama-sama membahas tentang industri pariwisata, akan tetapi terdapat perbedaan dalam fokus kajian. Penelitian Surya Wirawan lebih memfokuskan pada pengembangan pariwisata bahari yang berkelanjutan, Enoch pada pemetaan kondisi geografis obyek wisata, Kodyat lebih memfokuskan pada perkembangan pariwisata secara luas, Pitana lebih menekankan pada manajemen pengelolaan dan dampaknya bagi perekonomian masyarakat setempat dan pemerintah, dan Nurul lebih fokus pada kepuasan pengunjung obyek wisata, sedangkan penulisan skripsi ini lebih menekankan pada perkembangan industri pariwisata dan dampaknya bagi perekonomian masyarakat dan pendapatan asli daerah Kabupaten Jember. Fokus kajian ini yang membedakan peneliti dengan hasil penelitian terdahulu.

---

<sup>20</sup>Nurul Qomariah, “Model Peningkatan Kepuasan Pengunjung Berbasis Customer Value: Studi Pada Pengunjung Pantai Watu Ulo Dan Pengunjung Pantai Papuma Di Kabupaten Jember”, Seminar Nasional dan Call for Paper, Research Methods And Organizational Studies, 2014, hlm. 465-473.

### 1.6. Pendekatan dan Kerangka Teori

Penulisan sejarah baru dapat dikatakan ilmiah jika menggunakan seperangkat alat untuk dijadikan media penganalisaan. Metode dan teori inilah yang berfungsi sebagai alat untuk menjelaskan berbagai persoalan yang terkait dalam peristiwa sekaligus untuk menghubungkan atau membandingkan antara fakta satu dengan fakta yang lain, sehingga terbentuk suatu penulisan yang utuh atau yang biasa disebut historiografi.<sup>21</sup> Realitas dari sebuah sejarah adalah sangatlah kompleks sifatnya, sehingga disiplin sejarah tidak mampu jika harus menggambarkan dan menjelaskan sendiri. Sejarah memerlukan bantuan dari ilmu-ilmu sosial lainnya untuk meningkatkan kemampuannya. Konstruksi atau gambaran tentang masa silam sangat ditentukan oleh pendekatan yang digunakan dalam menyoroiti subyek yang akan digarap.<sup>22</sup>

Subyek dalam penulisan skripsi ini adalah perkembangan pariwisata di Kabupaten Jember. Perkembangan dalam Sosiologi merupakan inti dari sebuah proses pembangunan dan hasil dari sebuah proses pembangunan adalah buah upaya pengembangan yang secara konkret dapat diukur tingkat perkembangannya.<sup>23</sup> Wisata di Kabupaten Jember berkembang pesat karena beberapa faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor-faktor berasal dari dalam wisata Kabupaten Jember yang meliputi pembangunan berbagai fasilitas dan sarana yang menunjang, sehingga mampu meningkatkan jumlah kunjungan. Sektor ekonomi juga termasuk dalam faktor internal yang berupa atraksi wisata, hiburan, pengadaan produk wisata baik secara berkala dan pendapatan non-operasional dari jasa serta penyewaan prasarana yang secara finansial memberikan keuntungan bagi Pendapatan Asli Daerah. Faktor eksternal berupa ketertarikan para investor dari luar untuk menanamkan modalnya bagi

---

<sup>21</sup>Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 2.

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 4.

<sup>23</sup>Anhie MM Hoogvelt, *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang*, (Jakarta: CV Rajawali, 2003), hlm. 3.

perkembangan perekonomian di Kabupaten Jember, seperti pembangunan perhotelan dan rumah makan bagi para pengunjung wisata dari daerah luar; dan kunjungan para wisatawan dari luar untuk menikmati pariwisata di Kabupaten Jember.

Fenomena pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan wisata sehingga memacu perkembangan pariwisata di Kabupaten Jember ini dianalisis dengan menggunakan ilmu bantu Sosiologi Pembangunan. Sosiologi Pembangunan digunakan untuk mendekati masalah dalam mempelajari, menganalisa, menjabarkan dan menjawab hal-hal yang ada kaitannya dengan fenomena-fenomena sosial yang terjadi sebagai bentuk dan akibat dari pembangunan dalam suatu masyarakat.<sup>24</sup> Fokus utama yang menjadi prioritas dalam pembangunan adalah usaha untuk mencapai perbaikan ekonomi dan tidak hanya terbatas pada golongan elite saja, melainkan secara menyeluruh dan merata sampai pada lapisan terbawah.<sup>25</sup> Dengan adanya perbaikan kondisi lingkungan di sekitar obyek wisata, maka kondisi lingkungan yang semula kumuh berubah menjadi bersih, nyaman dan terkendali sehingga menyebabkan para pengunjung tertarik untuk datang. Daerah-daerah yang berada di sekitar obyek wisata mempunyai potensi untuk dikembangkan dan secara langsung ikut berpengaruh terhadap jumlah pengunjung. Daerah sekitar berkembang menjadi daerah yang padat kerja dalam pengertian masyarakat ikut menunjang dan berpartisipasi dalam memberikan pelayanan transportasi, telekomunikasi, rumah makan, souvenir, dan munculnya home industri. Adanya obyek wisata di Kabupaten Jember menimbulkan kecenderungan terjadinya saling pengaruh mempengaruhi antara wisatawan dengan masyarakat setempat. Pengaruh di sini merupakan daya yang ada atau yang timbul dari sesuatu, yaitu obyek wisata tersebut terhadap kehidupan masyarakat Jember dan sekitarnya.

---

<sup>24</sup>J.W. Schoorl, *Modernisasi: Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang*. (Jakarta: PT. Gramedia, 1980), hlm. 56.

<sup>25</sup>Pudjawati Sajogyo, *Sosiologi Pembangunan*, (Jakarta: Etasa Dinamika, 1985), hlm. 34.



Berkembangnya pariwisata dengan sendirinya memerlukan suatu kreativitas yang bersumber pada kualitas manusia. Di sini ada lima faktor yang menentukan, yaitu akomodasi, atraksi, konsumsi, informasi, dan transportasi.<sup>26</sup> Akomodasi merupakan tempat tinggal sementara di tempat atau di daerah tujuan yang akan dikunjungi, yaitu penginapan, hotel, losmen, dan lain-lain. Atraksi yang dimaksud di sini adalah atraksi wisata, yaitu sesuatu yang telah dipersiapkan terlebih dahulu untuk dilihat dan dinikmati oleh wisatawan, seperti tari-tarian, nyanyi-nyanyian, kesenian rakyat tradisional, upacara adat, dan sebagainya. Sementara itu, konsumsi adalah sarana yang dapat memberi pelayanan makan dan minum sesuai selera masing-masing wisatawan. Informasi adalah sarana untuk memberi pelayanan informasi tentang beberapa hal yang ingin diketahui wisatawan. Adapun yang dimaksud transportasi yaitu sarana yang akan membawa wisatawan dari dan ke daerah tujuan wisata yang ingin diketahui.

Kegunaan Sosiologi bagi pembangunan dapat diidentifikasi melalui beberapa tahap, di antaranya:<sup>27</sup>

a. Tahap perencanaan

Sebelum pembangunan dilaksanakan, mula-mula para pemimpin (pemerintah), bupati yang bekerjasama dengan DPRD menyerap aspirasi masyarakat yang menghendaki peningkatan taraf hidup menjadi lebih baik. Perpaduan aspirasi masyarakat dan visi para pemimpin (pemerintah) kemudian dituangkan dalam rencana pembangunan yang dikelola oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda). Perencanaan di bidang kepariwisataan daerah meliputi segala aspek dan potensi obyek wisata yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Jember untuk dikembangkan yang pada akhirnya bisa meningkatkan PAD. Berkaitan dengan perkembangan industri pariwisata di Kabupaten Jember, pemerintah daerah membuat sebuah tata aturan dari hasil penyaringan aspirasi masyarakat

---

<sup>26</sup>I Gusti Ngurah Bagus, "Dari Obyek ke Subyek: Memanfaatkan Peluang Pariwisata Sebagai Industri Jasa Dalam Pembangunan", Dalam Jurnal Ilmu-ilmu Humaniora, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1991), hlm. 410-411.

<sup>27</sup>Soetomo, *Masalah Sosial dan Pembangunan*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), hlm. 93.

Jember yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 8 Tahun 2003 yang berkaitan dengan Usaha Kepariwisata, Perda No. 9 Tahun 2003 tentang Redistribusi Ijin Usaha Kepariwisata dan perda No. 14 Tahun 2003 tentang Redistribusi Masuk Obyek Wisata. Bersamaan dengan itu Pemerintah Kabupaten Jember juga mengeluarkan Perda No 30 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember. Perda No. 30 kemudian diperjelas lagi dalam Perda No. 20 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pariwisata Kabupaten Jember. Berbagai kebijakan di atas kemudian ditindaklanjuti dengan berbagai program pengembangan pariwisata yang salah satunya adalah Program Bulan Berkunjung Ke Jember (BBJ) yang mulai dilaksanakan pada tahun 2007.

b. Tahap pelaksanaan

Setelah rencana dibuat, selanjutnya diterapkan atau dilaksanakan. Segala sesuatu yang tertuang dalam rencana harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan rencana harus diperhatikan. Keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan sangat diharapkan. Walaupun pemerintahan berperan sebagai agen pembangunan (pelopor), namun dukungan dan partisipasi masyarakat tetap diperlukan. Pelaksanaan dari rencana pengembangan pariwisata di Kabupaten Jember adalah pembangunan Kantor Pariwisata Dan Kebudayaan yang menjadi badan pengelola resmi pemerintah daerah. Hal ini kemudian ditunjang dengan mempopulerkan Program BBJ dengan menginformasikan ke kedutaan besar (Kedubes) di Jakarta. Pengiriman informasi ini ditangani oleh Bagian Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dengan membuat *website* resmi pariwisata Kabupaten Jember dan mengirimkan majalah *Hallo Jember* yang berisi informasi dan gambar-gambar pariwisata di Kabupaten Jember ke 50 Kedubes, antara lain Kedutaan Besar Suriname (*Embassy of Suriname*), Kedutaan Besar Jepang (*Embassy of Japan*), Kedutaan Besar Perancis, Kedutaan Besar China (*Embassy of China*), Kedutaan Besar Peru (*Embassy of Peru*), dan Kedutaan Besar Brasil (*Embassy of the Federative Republic of Brazil*). Program BBJ semakin mengangkat pariwisata



Kabupaten Jember dengan menggandeng JFC (Jember Fashion Carnaval) dan menjadikannya sebagai rangkaian BBJ.

c. Tahap evaluasi

Pada tahap ini, dilakukan analisis terhadap akibat perubahan sosial yang terjadi sebagai hasil pembangunan. Melalui evaluasi, dapat diketahui dan diidentifikasi aspek-aspek yang kurang, macet, mundur, dan merosot. Apabila hal itu terjadi, maka diadakan upaya perbaikan. Evaluasi juga memberikan informasi mengenai keberhasilan-keberhasilan pembangunan. Bulan Berkunjung Ke Jember merupakan sebuah program yang dapat dikatakan berhasil dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Jember. Melalui program ini terjadi peningkatan dalam pembangunan, di antaranya perbaikan infrastruktur jalan-jalan yang menghubungkan ke tempat-tempat wisata serta berjamurnya hotel, penginapan dan rumah makan di daerah perkotaan dan tempat wisata. Dampak yang dapat dilihat dari program ini adalah meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat.

Proses pembangunan yang dijalankan melalui tiga tahapan ini akan dijelaskan dengan teori modernisasi. Modernisasi merupakan salah satu teori Sosiologi Pembangunan yang mendasarkan pada asumsi bahwa modernisasi masyarakat merupakan proses transformasi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang lebih maju (modern) yang dicirikan dengan proses pembangunan industrialisasi dan pengembangan teknologi.<sup>28</sup> Menurut W.W. Rostow, modernisasi merupakan proses bertahap, di mana pertumbuhan ekonomi yang hendak dicapai oleh masyarakat, diawali dengan masa primitif dan sederhana menuju tatanan masyarakat yang maju dan kompleks.<sup>29</sup> Rostow menyebutkan bahwa negara yang melindungi kepentingan usahawan untuk melakukan akumulasi modal, maka negara sudah mulai menuju pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

---

<sup>28</sup>Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial; Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 57.

<sup>29</sup>J.W. School, *op.cit.* hlm. 37.

Dalam kehidupan sehari-hari modernisasi dapat dilihat dari fenomena budaya tradisional yang mengalami marjinalisasi; kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa semakin kompleks, sehingga industri dibangun secara besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan manusia; semakin banyaknya kelompok baru dalam masyarakat; dan terjadi perluasan dalam bidang pekerjaan yang tidak hanya terfokus pada pertanian saja, sehingga terjadi pembagian fungsi. Kompleksitas kebutuhan manusia terhadap barang dan jasa yang menyebabkan pembangunan industrialisasi secara tidak langsung mengakibatkan masyarakat semakin konsumtif. Masyarakat semakin tergantung pada pemenuhan kebutuhan sampingan (tersier). Salah satu bentuk kebutuhan masyarakat yang bersifat sampingan adalah tempat-tempat rekreasi. Kondisi yang demikian ini menjadikan industri pariwisata dibangun dan dikembangkan.

### 1.7 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri atas empat tahap yaitu; heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.<sup>30</sup> Heuristik adalah usaha untuk mencari dan mengumpulkan sumber sejarah. Sumber sejarah tersebut berasal dari sumber primer maupun sumber sekunder.<sup>31</sup> Sumber primer adalah sumber yang diperoleh dari pengamatan langsung terhadap peristiwa. Sumber primer dalam penelitian ini meliputi arsip, foto dan hasil wawancara. Wawancara dilaksanakan dengan mewawancarai narasumber yang *kredibel* yaitu kepala Kantor Pariwisata, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya dan Kebersihan (PUBMCK), Dinas Pengelola Pendapatan dan Keuangan Daerah (DPPKD), dan Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah (Bappeda). Wawancara juga dilakukan dengan pelaku usaha wisata seperti pemilik warung atau kios yang berjualan di obyek wisata, pemilik jasa persewaan perahu, dan pemilik jasa parkir swasta. Sumber primer juga didapat peneliti meliputi

---

<sup>30</sup>Louis Gostchalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1982), hlm. 18.

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 19.

dokumen-dokumen seperti data statistik kunjungan pariwisata di Kabupaten Jember dari tahun 2001-2014 peta wisata Kabupaten Jember, Rencana Jangka Menengah Daerah (RJMD) Kabupaten Jember, peraturan-peraturan daerah dan kebijakan pariwisata yang dikeluarkan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten Jember, dan Rencana Aksi Kota Pusaka (RAKP). Sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang berasal dari orang ketiga, buku-buku, literatur, koran dan majalah, atau tulisan-tulisan yang semasa dengan peristiwa yang dikaji.

Tahap kedua adalah kritik sumber. Pada tahap ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang otentik dan kredibel setelah melalui proses kritik baik dari segi ekstern maupun intern. Keotentikan data berarti bahwa sumber tersebut benar-benar dikeluarkan oleh orang atau organisasi yang namanya tertera dalam sumber itu sendiri, sedang kredibel berarti seberapa jauh isi yang terkandung di dalamnya sungguh-sungguh dapat dipercaya.<sup>32</sup> Tahap selanjutnya (tahap ketiga) adalah interpretasi. Pada tahap ini dilakukan penafsiran dengan menggunakan ilmu bantu dan teori sebagai alat analisis guna memperoleh pengertian dan pemahaman terhadap obyek penulisan sejarah yang dikaji. Proses penafsiran sumber-sumber sejarah dilakukan dengan menggunakan teori-teori yang sudah disepakati bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang meliputi: “apa, siapa, kapan, dimana, bagaimana, dan mengapa.” Proses interpretasi kemudian direkonstruksi untuk medeskripsikan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan: (a) obyek daerah tujuan wisata dan kebijakan pariwisata yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, (b) perkembangan pariwisata Kabupaten Jember, dan (c) pengaruh kegiatan pariwisata Jember terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil interpretasi kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan (tahap historiografi) dengan menggunakan bahasa Indonesia ragam baku ilmiah, sehingga diperoleh bentuk penulisan sejarah yang diskriptif-analitis. Deskriptif analitis yang dimaksud di sini adalah penulisan yang cermat terhadap fenomena

---

<sup>32</sup>Ibrahim Alfian, “Sejarah dan Permasalahan Masa Kini”, *Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Sastra UGM*, tanggal 12 Agustus 1985, hlm. 7.

sosial tertentu yang disertai dengan analisis kritis, mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa.<sup>33</sup>

### **1.8 Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini dibagi dalam empat bab. Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang kajian, kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan masalah-masalah yang hendak dikaji yang terangkum dalam perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang dilakukan, ruang lingkup kajian, tinjauan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak dikaji, pendekatan dan kerangka teori yang digunakan untuk mendekati masalah kajian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua menggambarkan Kondisi Alam Dan Wisata Kabupaten Jember yang berisi tentang kondisi geo ekologi, penduduk, potensi wisata dan industri pariwisata Kabupaten Jember sebelum 2003. Selanjutnya Bab ketiga menjelaskan tentang Perkembangan Pariwisata Di Kabupaten Jember dan Dampaknya Bagi Perekonomian Masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah. Bab ini berisi penjelasan tentang kebijakan dan arah pengembangan pariwisata, kontribusi dan dampak adanya industri pariwisata bagi pembangunan jalan, transportasi, hotel, rumah makan, pasar wisata, perekonomian masyarakat setempat dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember. Bab empat berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang sudah dirumuskan dalam bab pertama.

---

<sup>33</sup>Singarimbun Masri, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1983) hlm. 4.



## **BAB 2**

### **KONDISI ALAM DAN WISATA DI KABUPATEN JEMBER**

Sistem politik masa pemerintahan Orde Baru yang bercorak otoriter menjadi penghambat yang besar dalam mengembangkan perekonomian di Kabupaten Jember. Pemerintah daerah tidak mempunyai wewenang untuk mengelola kekayaan daerahnya dan hanya menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, sehingga proses pembangunan kurang begitu menonjol di wilayah Kabupaten Jember. Kondisi ini berpengaruh besar bagi pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Jember. Sebelum tahun 2003 industri pariwisata Kabupaten Jember masih berjalan dengan stagnan. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kemandegan pariwisata di daerah ini. Permasalahan ini yang akan menjadi pembahasan dalam sub-bab di bawah ini.

#### **2.1 Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Jember**

Kabupaten Jember merupakan wilayah yang terletak di bagian timur Propinsi Jawa Timur. Lokasinya sangat strategis, dapat ditempuh melalui jalan arteri primer Surabaya – Banyuwangi. Secara astronomi Jember terletak pada posisi  $6^{\circ} 27' 9''$  sampai dengan  $7^{\circ} 14' 33''$  Bujur Timur dan  $7^{\circ} 59' 6''$  sampai dengan  $8^{\circ} 33' 56''$  Lintang Selatan, dengan jarak tempuh dari pusat kota Surabaya kurang lebih 197 km ke arah timur. Wilayah Kabupaten Jember dilihat dari peta berbatasan dengan wilayah-wilayah lain: sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Probolinggo dan Bondowoso, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten



Banyuwangi, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lumajang.<sup>1</sup>

Secara administratif Jember terbagi menjadi 31 kecamatan dan 248 desa/kelurahan dan memiliki sekitar 76 pulau-pulau kecil. Kecamatan-kecamatan yang membawahi kelurahan/desa dalam administrasi Pemerintah Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1: Luas Wilayah Per-Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/Desa Di Kabupaten Jember**

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Luas Wilayah	
			(km <sup>2</sup> )	(%)
1.	Kencong	5	65,92	2,00
2.	Gumukmas	8	82,98	2,52
3.	Puger	12	148,99	4,52
4.	Wuluhan	7	137,18	4,16
5.	Ambulu	7	104,56	3,17
6.	Tempurejo	8	524,46	15,92
7.	Silo	9	309,98	9,41
8.	Mayang	7	63,78	1,94
9.	Mumbulsari	7	95,23	2,89
10.	Jenggawah	8	51,02	1,55
11.	Ajung	7	56,61	1,72
12.	Rambipuji	8	52,80	1,60
13.	Balung	8	47,12	1,43
14.	Umbulsari	10	70,52	2,14
15.	Semboro	6	45,43	1,38
16.	Jombang	6	54,30	1,65
17.	Sumberbaru	10	166,37	5,05

<sup>1</sup>Jember Dalam Angka Tahun 2014 (Jember: BPS, 2014), hlm. xvi.

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Luas Wilayah	
			(km <sup>2</sup> )	(%)
18.	Tanggul	8	198,99	6,04
19.	Bangsalsari	11	175,28	5,32
20.	Panti	7	160,71	4,88
21.	Sukorambi	5	60,63	1,84
22.	Arjasa	6	43,75	1,33
23.	Pakusari	7	29,11	0,88
24.	Kalisat	12	53,48	1,62
25.	Ledokombo	10	146,92	4,46
26.	Sumberjambe	9	138,24	4,20
27.	Sukowono	12	44,04	1,34
28.	Jelbuk	6	65,06	1,97
29.	Kaliwates	7	24,94	0,76
30.	Sumbersari	7	37,05	1,12
31.	Patrang	8	36,99	1,12
		248	3.293,34	100

Sumber: Profil Kabupaten Jember dalam Angka Tahun 2014

Tabel di atas menerangkan bahwa rata-rata kecamatan yang memiliki luas wilayah antara 100 km<sup>2</sup> ke atas sebagian besar areanya merupakan daerah dataran tinggi. Salah satunya seperti Kecamatan Tempurejo. Kecamatan ini termasuk dalam wilayah Jember bagian selatan, di mana struktur geografinya melandai pada bagian barat dan semakin meninggi pada bagian timur. Kondisi geografis berpengaruh terhadap pola pemakaian lahan, di mana pada bagian barat areanya banyak digunakan sebagai lahan perkampungan dan pertanian, sedang semakin ke timur areanya banyak digunakan untuk lahan perkebunan. Pada bagian ujung timur wilayah Kecamatan Tempurejo dengan karakteristik deretan perbukitan yang menjadi sambungan dari Pegunungan Kunitir terdapat kawasan konservasi Meru Betiri. Kawasan konservasi ini berbatasan dengan laut selatan, sehingga

menjadikan wilayah Kecamatan Tempurejo merupakan kecamatan paling luas di antara kecamatan-kecamatan di Kabupaten Jember yang tercatat 524,46 km<sup>2</sup>.

Kecamatan lain yang memiliki luas wilayah di atas 100 km<sup>2</sup> adalah Kecamatan Silo yang tercatat mencapai 309,98 km<sup>2</sup>. Secara topografi kecamatan ini termasuk wilayah dataran tinggi yang wilayahnya merupakan deretan perbukitan yang memanjang dari selatan ke utara. Deretan perbukitan ini menjadi bagian dari jalur pegunungan Ijen yang ada di sebelah utara. Kecamatan ini diindikasikan banyak mengandung pertambangan logam mulia, sehingga wilayah ini muncul pendulangan emas yang diselenggarakan oleh rakyat.<sup>2</sup>

Tanggul merupakan wilayah kecamatan yang terbagi dalam dua bagian. Pada bagian selatan wilayahnya merupakan dataran rendah yang cocok untuk lahan pertanian dan tempat hunian, dan semakin ke utara areanya semakin tinggi yang banyak dipergunakan sebagai lahan perkebunan dan kehutanan. Tingginya area pada bagian utara ini dipengaruhi oleh kondisi geografis di mana sebelah utara wilayah Kecamatan Tanggul merupakan deretan perbukitan yang menjadi bagian dari pegunungan Argopuro yang memanjang ke arah timur, sehingga luas wilayah yang dimiliki kecamatan ini tercatat 198,99 km<sup>2</sup>.

Sebelah barat Kecamatan Tanggul terdapat Kecamatan Sumberbaru yang luas wilayahnya mencapai 166,37 km<sup>2</sup>. Sebagian besar daerah Kecamatan Sumberbaru merupakan wilayah dataran tinggi yang pada bagian barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lumajang. Dengan struktur geografi yang demikian wilayah ini sebagian besar lahannya dipergunakan sebagai area perkebunan dan salah satu perkebunan yang terkenal dengan agro wisatanya adalah perkebunan teh Gunung Gambir. Perkebunan ini terletak di lereng Gunung Argopuro.

Daerah kecamatan yang memiliki luas di bawah 50 km<sup>2</sup> kebanyakan merupakan dataran rendah yang banyak dijadikan tempat wilayah perkampungan, bangunan gedung-gedung perkantoran dan pusat administrasi Kabupaten Jember. Salah satu wilayah kecamatan yang paling sedikit adalah Kecamatan Kaliwates

---

<sup>2</sup>Profil Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jember, *Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Jember Tahun 2014* (Jember: Disperindag, 2014), hlm. 30.

dan menjadi pusat perkantoran dan administrasi. Sebagai salah satu wilayah kecamatan kota, lahan-lahan yang dimiliki banyak terpakai untuk pembangunan gedung-gedung perkantoran, perumahan, jalan-jalan protokol yang menghubungkan kecamatan pinggiran dengan kota Jember, sehingga Kecamatan Kaliwates merupakan daerah yang memiliki kondisi tanah yang relatif datar.

Luas wilayah yang tidak sama dalam setiap kecamatan memberikan gambaran bahwa kondisi geografis Kabupaten Jember yang berbentuk ngarai pada bagian tengah dan selatan dengan kesuburan tanah bagi pertanian, dan pegunungan yang memanjang sepanjang batas utara dan timur serta samudera sepanjang batas selatan membentuk topografi yang mengandung potensi bagi wisata. Struktur tanahnya yang rata-rata subur menjadi sumberdaya perekonomian bagi penduduknya untuk didayagunakan bagi keperluan pengelolaan pertanian dan perkebunan. Padi, kedelai, jagung, tembakau, cokelat, kopi dan palawija merupakan jenis-jenis tanaman yang menghiasi dataran tanah ngarai Kabupaten Jember. Diantara berbagai jenis tanaman pertanian dan perkebunan, tembakau merupakan tanaman yang dikelola melalui mekanisme agronomi, agrobisnis dan agroindustri yang menjadi andalan utama bagi masyarakat Jember, bahkan tembakau ini telah menjadi simbol bagi pertumbuhan kemakmuran daerah Kabupaten Jember.<sup>3</sup> Kondisi geografis yang tanahnya membentuk garis pantai dan gunung-gunung yang mengelilingi wilayah Kabupaten Jember secara tidak langsung juga menawarkan pesona alam yang mengandung potensi wisata.

Topografi Kabupaten Jember dengan dataran ngarai yang subur pada bagian tengah dan selatan serta dikelilingi oleh pegunungan yang memanjang pada batas barat dan timur menjadikan wilayahnya memiliki karakteristik tersendiri. Pada bagian barat daya wilayah Kabupaten Jember memiliki dataran dengan ketinggian 0 – 25 meter di atas permukaan laut, sedangkan di wilayah timur laut yang berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan wilayah tenggara yang berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi memiliki ketinggian di atas

---

<sup>3</sup>Profil Kabupaten Jember 2014, (Jember: Sekretariat Humas Kabupaten Jember, 2014), hlm. 1.



1.000 meter di atas permukaan air laut. Tabel 2.2 menerangkan ketinggian tanah Kabupaten Jember.

**Tabel 2.2: Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) Menurut Ketinggian Wilayah Di Kabupaten Jember**

NO	Ketinggian	Luas	
		km <sup>2</sup>	%
1	0 – 25 meter	591.20	17,95
2	25 – 100 meter	681.68	20,70
3	100 – 500 meter	1.243.08	37,75
4	500 – 1.000 meter	520.43	15,80
5	> 1.000 meter	256.95	7,80
<b>Jumlah</b>		<b>3.293,34</b>	<b>100</b>

Sumber: Profil Kabupaten Jember dalam Angka Tahun 2014

Struktur tanah yang demikian itu membentuk dataran dengan kemiringan tanah yang bervariasi. Secara umum kemiringan dataran berkisar antara 0-40°. Rincian kemiringan tersebut adalah: 1) 0-8° seluas 6493,355 ha; 2) 8-15% seluas 2742,53 ha; 3) 15-25° seluas 330,08 ha; 4) 25-40° seluas 177,74 ha; 5) >40° seluas 164,05 ha.<sup>4</sup> Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.3: Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) Menurut Kemiringan Lahan Di Kabupaten Jember**

NO	Kelas Lereng	Luas	
		km <sup>2</sup>	%
1	Datar (0 – 2°)	1.205,48	36,60
2	Landai (2 – 15°)	673,76	20,46
3	Agak Curam (15 – 40°)	384,03	11,66
4	Curam (>40°)	1.030,07	31,28
<b>Jumlah</b>		<b>3.293,34</b>	<b>100</b>

Sumber: Profil Kabupaten Jember dalam Angka Tahun 2014

<sup>4</sup>Profil Kabupaten Jember dalam Angka Tahun 2014, *op. cit.* hlm. 5.



Kondisi topografi yang ditunjukkan dengan kemiringan tanah dan elevasi, sebagian besar wilayah Kabupaten Jember (36,60%) berada wilayah datar dengan kemiringan lahan 0-2°, sehingga daerah ini baik untuk kawasan permukiman perkotaan dan kegiatan pertanian tanaman semusim. Selanjutnya wilayah yang bergelombang sampai berbukit dengan kemiringan sangat curam di atas 40° menempati wilayah seluas 31,28% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Jember. Daerah ini kebanyakan dipergunakan untuk perkebunan dan kehutanan, sehingga dapat berfungsi sebagai penampung yang dapat menjaga keseimbangan ekosistem. Selebihnya wilayah landai sampai bergelombang, dengan kemiringan antara 2-15° memiliki luas wilayah 20,46%, yang digunakan untuk usaha pertanian dengan tanpa memperhatikan usaha pengawetan tanah dan air. Sedangkan daerah bergelombang dengan kemiringan 15-40° menempati wilayah seluas 11,66%. Daerah tersebut mudah terkena erosi, sehingga diperlukan usaha pengawetan tanah dan air.<sup>5</sup>

Dataran wilayah Kabupaten Jember banyak dibentuk oleh jenis tanah *litosol* dan *regosol* coklat kekuningan. Kondisi ini sangat menentukan tingkat kesuburan dan kedalaman efektif tanah, dimana tingkat kesuburan tersebut adalah berkisar di atas 90 cm. Iklim Kota Jember termasuk iklim tropis dengan angka temperatur berkisar antara 23° C - 31° C. Iklim tropis ini berpengaruh terhadap dua musim di Kabupaten Jember, yaitu musim kemarau yang terjadi pada bulan Mei sampai bulan Agustus dan musim hujan terjadi pada bulan September sampai bulan Januari, dan musim hujan pada bulan Februari sampai Juli dengan curah hujan berkisar antara 1.969 mm sampai 3.394 mm.<sup>6</sup>

Karakteristik wilayah Kabupaten Jember yang relatif subur untuk pengembangan tanaman pangan pada bagian selatan, serta pengembangan tanaman keras dan tanaman perkebunan di bagian utara yang merupakan wilayah perbukitan bergunung-gunung ini memiliki luas wilayah mencapai 3.293,34 km<sup>2</sup>. Luas wilayah dengan karakter topografi tersebut terbagi dalam beberapa jenis

---

<sup>5</sup>*Ibid.* hlm. 3.

<sup>6</sup>*Ibid.* hlm. 5.

kawasan sebagai berikut: perkampungan 31.877,00 ha (9,67 %), sawah 86.568,18 ha (26,28 %), tegal 43.522,84 ha (13,21 %), perkebunan 34. 590,46 ha (10,50 %), tambak atau rawa 393,88 ha (0,11%) hutan 121.039,61 ha (36,75 %), padang rumput 289,06 ha (0,09%), tanah tandus 1.469,26 ha (0,44%) dan lain-lain 9.583, 26 ha (2,90%).<sup>7</sup>

Luas wilayah Kabupaten Jember yang terbagi dalam kawasan-kawasan tersebut memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Berbagai kawasan yang berpotensi sebagai tempat wisata antara lain kawasan lindung yang menjadi tempat situs-situs purbakala dan hewan-hewan yang dilindungi oleh pemerintah, seperti: (1) kawasan perlindungan setempat yang berada di sempadan pantai selatan Jember, sempadan sungai/kali di seluruh Jember, kawasan sekitar waduk, dan kawasan sekitar mata air; (2) kawasan suaka alam berada di Wisata Pantai Watu Ulo, Gunung Watangan, Taman Nasional Meru Betiri dan Pegunungan Hyang; (3) kawasan cagar budaya di Kecamatan Arjasa; (4) kawasan rawan bencana alam karena erosi tinggi berada di Kecamatan Arjasa, Patrang, Sumberjambe, Mumbulsari, Kencong dan Wuluhan, dan kawasan rawan bencana alam karena hutan rusak berada di Kecamatan Silo dan Mumbulsari.<sup>8</sup>

Kawasan budidaya yang menjadi tempat budidaya komoditas terdiri dari: (1) pertanian tanaman pangan berada di seluruh kawasan kecuali pusat kota; (2) perkebunan berada di lereng Gunung Argopuro dengan komoditas teh, kopi, kakao, karet; lereng Gunung Raung dengan komoditas kopi dan tembakau; kawasan tengah hingga selatan dengan komoditas tembakau, tebu dan kelapa; (3) perikanan laut terdapat di Kecamatan Gumukmas, Puger, Ambulu, Wuluhan dan Kencong, sedangkan perikanan darat terdapat di Kecamatan Rambipuji, Kalisat dan Bangsalsari; (4) pertambangan/galian C berada di Kecamatan Puger, Pakusari, Sumbersari, Kalisat, Wuluhan, Arjasa, Ledokombo dan Rambipuji; (5) hutan produksi berada di kawasan perbatasan dengan Bondowoso dan

---

<sup>7</sup>Jember dalam Angka Tahun 2014, *op. cit.* hlm. 2.

<sup>8</sup>Profil Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jember, *op. cit.* hlm. 5.

Banyuwangi; (6) industri kecil tersebar di setiap kecamatan, industri manufaktur berada di Kecamatan Rambipuji, Panti, Balung, Jenggawah, Sumpersari dan Arjasa; dan(7) permukiman berada di Kawasan Pusat Kota dan setiap ibukota kecamatan.<sup>9</sup>

## 2.2. Penduduk Kabupaten Jember

Kabupaten Jember merupakan daerah yang tidak memiliki akar budaya asli, karena mayoritas penduduknya merupakan pendatang yang berasal dari suku Jawa dan Madura. Bahasa sehari-hari yang digunakan adalah Bahasa Jawa dan Madura. Masyarakat Madura lebih banyak menetap di bagian utara daerah Jember, sedangkan masyarakat Jawa lebih banyak menetap di bagian selatan daerah Jember. Pola penetapan tempat hunian kedua suku ini dipengaruhi oleh pola penyebaran migrasi yang dilakukan pertama kali pada masa Kolonial Hindia Belanda.

Menurut catatan sejarah pertumbuhan penduduk dan perekonomian Kabupaten Jember dipengaruhi oleh perluasan penanaman tembakau di Karesidenan Besuki serta pembangunan infrastruktur jalan dan jalur kereta api yang menghubungkan daerah tengah dengan daerah pantai utara Pulau Jawa pada akhir abad ke-19. Perluasan penanaman tembakau erat kaitannya dengan penetrasi sistem kapitalisme yang berwujud dalam perkebunan partikelir pada masa Kolonial Hindia Belanda. Munculnya perkebunan-perkebunan swasta di Indonesia melalui kebijakan ekonomi pada dekade ke-enam dan ke-tujuh abad ke-19, membawa dampak perubahan sosial dan ekonomi pada masyarakat Indonesia. Sistem ini sebagai pengganti Sistem Tanam Paksa yang oleh sebagian penulis dianggap sebagai penyebab terjadinya kesengsaraan dan kemiskinan bagi rakyat Indonesia.<sup>10</sup> Gagasan sistem baru ini dilontarkan oleh kelompok liberal yang

---

<sup>9</sup>*Ibid.* hlm. 7.

<sup>10</sup> R.E. Elson. “Kemiskinan dan Kemakmuran Kaum Petani pada Masa Sistem Tanam Paksa di Pulau Jawa”, dalam Anne Booth (ed.), *Sejarah Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm.

menentang pelaksanaan Sistem Tanam Paksa.<sup>11</sup> Sistem baru ini memungkinkan tumbuhnya perkebunan-perkebunan swasta, karena pemerintah Hindia Belanda memberikan dukungan dan fasilitas yang besar pada pihak swasta. Berdasarkan tujuan dan harapan agar hasil tanaman komoditas ekspor dapat memberikan keuntungan atau devisa pada pemerintah, banyak daerah-daerah di wilayah ujung timur Pulau Jawa dibuka sebagai lahan perkebunan. Salah satu daerah yang dibuka sebagai lahan perkebunan adalah wilayah Jember.

Usaha perkebunan swasta di wilayah Jember pertamakali digagas oleh George Birnie yang pada tanggal 21 Oktober 1859. Bersama dengan Mr. C. Sandenberg Matthiesen dan van Gennep, Bernie mendirikan *NV Landbouw Maatscappij Oud Djember* (NV. LMOD) yang semula bergerak di bidang perkebunan tembakau. Lambat laun NV. LMOD kemudian merambah pada perkebunan aneka tanaman seperti kopi, kakao, dan karet.<sup>12</sup> Usaha George Birnie tersebut menarik minat para *ondernemer* (perusahaan perkebunan) Belanda lainnya untuk menanamkan usahanya dan mendirikan perkebunan di daerah Jember, sehingga dalam waktu yang relatif singkat berdiri perkebunan swasta di daerah ini seperti *Besoeki Tabac Maatscappij* dan *Djelboek Tabac Maatscappij*.<sup>13</sup> Pembukaan perkebunan-perkebunan swasta di Kabupaten Jember ini yang menjadi salah satu faktor terjadinya gelombang migrasi besar-besaran orang Madura dari Pulau Madura ke daerah Jember.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>Robert van Niel, "Warisan Sistem Tanam Paksa Bagi Perkembangan Ekonomi Berikutnya", dalam Anne Booth (ed.), *Sejarah Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 123.

<sup>12</sup>Lihat kajian Edy Burhan Arifin, *Emas Hijau di Jember: Asal-Usul dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat 1860-1880*, Tesis tidak dipublikasikan, (Yogyakarta: UGM, 1990), hlm. 18.

<sup>13</sup>*Ibid.* hlm. 56.

<sup>14</sup>Menurut pakar sejarah, orang-orang Madura sengaja didatangkan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda untuk menggarap perkebunan yang ada di Kabupaten Jember, karena orang Madura dikenal dengan kerja kerasnya dan mempunyai kepatuhan kepada pemerintah. *Ibid.* hlm. 30.



Sistem perkebunan swasta yang diterapkan pemerintah Kolonial Hindia Belanda pada akhir abad ke-19 ini membawa perubahan-perubahan sosial dan ekonomi pada wilayah Jember, sehingga mendorong pemerintah Kolonial Hindia Belanda merubah status kota Jember yang awalnya menjadi bagian dari distrik Bondowoso berubah menjadi *regentschap* yang berdiri sendiri pada tahun 1883.<sup>15</sup> Guna mendukung perubahan status kota Jember menjadi *regentschap* pemerintah Kolonial Hindia Belanda mengadakan perombakan struktur pemerintahan dan menggalakkan pembangunan infrastruktur seperti jembatan, jalan dan jalur kereta api dari Surabaya menuju Probolinggo dan terus ke Jember serta dari Jember menuju Panarukan yang berfungsi sebagai pelabuhan untuk mengangkut produk komoditas ekspor pada akhir abad ke-19. Pada masa pembangunan infrastruktur ini tenaga kerja yang dipekerjakan banyak didatangkan dari daerah Jawa Tengah. Lambat laun tenaga kerja ini banyak yang menetap di wilayah Jember bagian selatan.<sup>16</sup>

Meskipun migrasi orang Madura dan Jawa hampir bersamaan waktunya, tetapi dalam pola penyebaran terjadi perbedaan. Hal ini dipengaruhi oleh posisi kedatangan kedua suku dari arah yang berbeda-beda. Posisi Pulau Madura yang sejajar berdekatan dengan Pulau Jawa bagian timur menjadikan migrasi orang Madura menyebar ke wilayah Jember bagian utara, sedangkan orang Jawa yang

---

<sup>15</sup>Edy Burhan A. *op. cit.* hlm. 45.

<sup>16</sup>Perbaikan infrastruktur dengan dibangunnya jalur kereta api ini yang mengakibatkan terjadinya gelombang migrasi kedua orang Jawa yang kebanyakan menjadi tenaga buruh. Hasil wawancara penulis tanggal 4-10 Mei 2015 dengan para sesepuh di Kecamatan Ambulu, menyebutkan bahwa mereka merupakan keturunan para pendatang dari wilayah Pacitan, Wonogiri, Solo, Yogyakarta, Sleman, Boyolali, dan Klaten. Akan tetapi ahli sejarah lain juga menengarai bahwa jauh sebelum pembangunan infrastruktur orang-rang Jawa sudah melakukan migrasi akibat kekalahan Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa (1825-1830) ke wilayah timur Pulau Jawa untuk menghindari penangkapan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda terhadap sisa-sisa pengikut Pangeran Diponegoro. Lihat kajian Michael Addas, *Ratu Adil; Tokoh dan Gerakan Millenarian Menentang Kolonialisme Eropa*, (Jakarta: Rajawali Press, 1988), hlm. 198.



kebanyakan datang dari wilayah Jawa Tengah pola migrasinya lebih menyebar ke wilayah Jember bagian selatan.<sup>17</sup>

Perbedaan pola migrasi orang-orang Jawa dan Madura menjadikan penduduk Kabupaten Jember terjadi pemisahan dalam tempat hunian bagi kedua suku. Jember bagian utara yang secara geografis memiliki tekstur tanah yang kurang subur dan berbukit-bukit, didominasi oleh etnik Madura. Kondisi pertanian yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang memadai bagi komunitas Madura, telah memaksa mereka untuk lebih bersifat agresif dan progresif dalam mencari lahan-lahan perekonomian yang ada di wilayah Jember, sehingga mereka lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten Jember daripada orang Jawa. Adanya kerja keras inilah yang membentuk karakteristik masyarakat Madura lebih keras daripada masyarakat yang bersuku Jawa. Sementara itu, etnik Jawa terkonsentrasi di wilayah Jember bagian selatan di mana struktur tanahnya datar dan lebih subur jika dibandingkan dengan daerah utara. Mereka cenderung kurang progresif dalam persoalan perekonomian, sehingga mereka kurang melakukan gerakan keluar dari tempatnya untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Adanya perbedaan ini melahirkan perbedaan corak kehidupan sosial komunitas Jawa yang lebih heterogen, terbuka, ikatan sosial cenderung lebih longgar.

Berdasarkan catatan statistik, penduduk Kabupaten Jember pada tahun 2003 tercatat 2.131.289 jiwa. Selama sebelas tahun terakhir penduduk Kabupaten Jember berkembang menjadi 2.529.967 tahun 2014. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Jember selama sebelas tahun mencapai angka 18,70 %. Pertumbuhan Jumlah penduduk Kabupaten Jember dapat diamati pada tabel 2.4.

---

<sup>17</sup>Para Antropolog juga menengarai bahwa migrasi orang-orang Madura ke Pulau Jawa umumnya didorong oleh kurang suburnya tanah-tanah di Pulau Madura, sehingga memaksa orang-orang Madura mencari lahan-lahan baru di Pulau Jawa. Pola migrasi orang-orang Madura ke Pulau Jawa ini biasanya dilakukan sejajar dengan daerah asal mereka. Pola migrasi orang Madura ke Jawa dapat dilihat pada kajian Franciscus Assisi Sutjipto Tjiptoatmodjo, *Kota-Kota Pantai Di Selat Madura; Abad XVII Sampai Medio Abad XIX*, Disertasi tidak dipublikasikan, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1983), hlm. 302-319.

**Tabel 2.4: Pertumbuhan Jumlah Penduduk di Kabupaten Jember Tahun 2003 – 2014**

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk
	(jiwa)	(%)
2003	2.131.289	0
2004	2.136.999	0,27
2005	2.141.467	0,21
2006	2.146.571	0,24
2007	2.153.883	0,34
2008	2.168.732	0,69
2009	2.179.829	0,51
2010	2.332.726	7,01
2011	2.345.851	0,56
2012	2.379.929	1,45
2013	2.389.929	0,42
2014	2.529.967	5,86

Sumber: Diolah dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember Tahun 2003 - 2014

Tabel di atas menerangkan bahwa pertumbuhan penduduk Kabupaten Jember dari tahun 2003 sampai 2009 masih relatif rendah dan kurang begitu signifikan. Memasuki tahun 2010 terjadi lonjakan yang begitu kentara dari 2.179.829 jiwa pada tahun 2009 menjadi 2.332.726 jiwa pada tahun 2010. Lonjakan jumlah penduduk pada tahun 2010 ini lebih banyak dipengaruhi oleh angka migrasi para pedagang di daerah perkotaan dan daerah sekitar perguruan tinggi. Menurut Hendroyono banyak orang-orang dari daerah luar yang masuk ke wilayah Jember dan menempati daerah perkotaan. Mereka merupakan kerabat atau teman dari para penduduk yang sudah menetap di wilayah ini.<sup>18</sup>

Setelah tahun 2010 lonjakan jumlah penduduk berjalan dengan normal, dan tahun 2012 terjadi lagi lonjakan, meskipun kurang signifikan. Tahun

<sup>18</sup>Wawancara dengan Hendroyono, Jember, tanggal 26 Oktober 2014.

berikutnya, yaitu tahun 2014 lonjakan jumlah penduduk cukup mengejutkan. Menurut Bupati Jember, MZA. Djalal, terjadi kesalahan dalam pencatatan jumlah penduduk pada tahun 2014, di mana Bapenduk mencatat jumlah penduduk pada tahun 2014 sebesar 2.829.967.<sup>19</sup> Hal ini cukup mengejutkan, di mana dalam satu tahun penduduk Kabupaten terjadi lonjakan penduduk sebesar 500.000 jiwa. Permasalahan ini kemudian oleh BPS diralat dengan menjelaskan ada kekeliruan dalam pencatatan data, sehingga angka jumlah penduduk yang dibenarkan adalah 2.529.967 jiwa.<sup>20</sup>

### 2.3 Potensi Wisata Di Kabupaten Jember

Karakteristik wilayah Kabupaten Jember yang dikelilingi pegunungan di sebelah utara dan garis pantai di sebelah selatan yang memanjang dari barat ke timur ini menyimpan potensi besar bagi obyek wisata alam.<sup>21</sup> Potensi-potensi wisata yang terkandung dalam karakteristik wilayah Kabupaten Jember dapat dilihat pada deretan pegunungan Argopuro yang menyimpan berbagai obyek wisata, seperti wisata perkebunan yang dikelola PT Perkebunan Nusantara XII, dataran tinggi Rembangan, air terjun Tancak dengan danau-danau vulkanik di lereng-lereng Pegunungan Argopuro,<sup>22</sup> Situs-situs purbakala di wilayah Kecamatan Arjasa, Jelbuk, Mayang, Sumber Baru, Rambipuji, dan Sukowono yang dikelola oleh pemerintah.<sup>23</sup> Begitu juga dengan garis pantai yang membujur dari barat ke timur menyimpan pesona yang tidak ada habisnya, sehingga banyak pantai-pantai ini menjadi obyek wisata seperti pantai Paseban, Getem, Puger,

---

<sup>19</sup>“Data Penduduk Bingungkan KPU Jember”, Tempo, Selasa 04 Desember 2014

<sup>20</sup> Wawancara dengan Indria Purwaningsih, Jember, tanggal 26 Oktober 2014.

<sup>21</sup>Jember Dalam Angka Tahun 2014 (Jember : BPS, 2005), hlm. 16.

<sup>22</sup>“Alam Jember Lebih Hebat Dari Pada Luar Negeri”, *Majalah Halo Jember*, hlm. 24 – 26.

<sup>23</sup>Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, *Deskripsi dan Inventarisasi Cagar Budaya Kabupaten Jember Tahun 2014*, (Jember: Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, 2014), hlm. 4.

Papuma, Watu Ulo, Payangan, Rowo Cangak, Nanggelan sampai ke Bandalit di ujung timur.<sup>24</sup>

Pantai Watu Ulo terletak  $\pm$  45 km dari kota Jember, Jawa Timur tepatnya di Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu posisi tempatnya berada di selatan dari kota Jember di gugusan Samudera Indonesia, yang indah panorama alamnya. Agar bisa sampai ke obyek wisata Pantai Watu Ulo bisa ditempuh dengan berbagai macam kendaraan. Disebut Watu Ulo karena di pantai itu terdapat sebuah batu panjang berbentuk ular, dengan penuh sisik.<sup>25</sup> Pada zaman pendudukan Jepang, pegunungan di sekitar wisata pantai Watu Ulo dijadikan benteng pertahanan dan pengintaian bala serdadu musuh yang mau menyusup daratan melalui pantai. Benteng Jepang yang berjumlah lima buah tersebut oleh masyarakat setempat disebut sebagai Goa Jepang dan merupakan salah satu lokasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Obyek wisata Watu Ulo dapat ditempuh dengan menggunakan segala jenis kendaraan (roda dua dan empat) karena menuju lokasi beraspal. Disamping Goa Jepang, di sebelah Watu Ulo ada sebuah Goa Lowo (Goa Kalelawar) yang dihuni ratusan ribu kalelawar. Goa ini bisa dimasuki oleh pengunjung dengan menyusuri dan melewati pantai berpasir. Tempatnya yang sunyi dari keramaian, goa ini sering dijadikan tempat bermeditasi bagi orang-orang tertentu, apalagi mengingat goa ini mempunyai kedalaman 100 m.<sup>26</sup>

Pantai Papuma letaknya berdekatan dengan Pantai Watu Ulo, hanya dibatasi oleh satu bukit. Pantai Papuma dan Watu Ulo terhubung oleh jalan yang bisa dilalui oleh kendaraan roda empat. Saat ini (2014) Pantai Papuma dikelola

---

<sup>24</sup>Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, *Mapping Pengembangan Obyek Wisata Kawasan Selatan Kabupaten Jember*, (Jember: Pemerintah Kabupaten Jember, 2014), hlm., 3.

<sup>25</sup>Nurul Qomariah, "Model Peningkatan Kepuasan Pengunjung Berbasis Customer Value: Studi Pada Pegunjung Pantai Watu Ulo Dan Pengunjung Pantai Papuma Di Kabupaten Jember", Seminar Nasional dan Call for Paper, Research Methods And Organizational Studies, 2014, hlm. 468.

<sup>26</sup>*Ibid.* hlm. 469.



oleh Perum Perhutani. Jarak dari kota Jember kurang lebih 45 km bisa ditempuh dengan sepeda, motor, mobil ataupun bus. Suhu udara disana antara 25°-320° C.<sup>27</sup>

Pantai Payangan lokasinya tidak jauh dari Papuma dan Watu Ulo. Pantai Payangan sampai tahun 2014 belum menjadi tujuan wisata karena akses untuk kesana masih sulit dan belum ada fasilitas apapun, namun pemandangan di pantai ini masih sangat alami. Di sekitar Pantai Payangan terdapat perumahan penduduk. Untuk menuju ke pantai Payangan, pada pertigaan terakhir sebelum masuk ke Watu Ulo ambil arah lurus saja dan terus ikuti jalan itu sampai di pantai.<sup>28</sup>

Pantai Puger lokasinya sekitar 36 km arah barat laut dari Kota Jember, disamping sebagai tempat pelelangan ikan juga sebagai tempat wisata karena alamnya yang indah. Wisatawan yang berkunjung ke Pantai Puger, selain menikmati keindahan panorama alamnya juga dapat berperahu menyusuri pantai. Wilayah Pantai Puger inilah setiap tahun diadakan acara “Larung Sesaji” sebagai rasa syukur kepada Tuhan atas rezeki yang diberikan. Bersebelahan dengan Pantai Puger, terdapat pantai yang juga menarik yaitu Pantai Kucur. Daerah Pantai Kucur wisatawan dapat menemukan kawanan kera merah yang selalu bergerombol dan suka bercanda dengan para wisatawan apalagi bila melihat wisatawan membawa buah-buahan atau makanan.<sup>29</sup>

Pantai Rowo Cangak adalah salah satu dari sekian pantai yang belum dikembangkan secara optimal untuk berwisata, dari segi sarana dan fasilitas jelas kurang memadai, namun kita bisa menikmati suasana pantai yang sesungguhnya dan benar-benar merasakan dekat dengan alam. Sepanjang garis pantai terlihat bersih tanpa sampah dan hanya suara ombak yang kita dengar lengkap dengan suasana eksotis khas pantai selatan.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup>*Ibid.* hlm. 471.

<sup>28</sup>Kantor Pariwisata, *op. cit.* hlm. 27.

<sup>29</sup>Abdul Gafurur Rohim, “Tradisi Petik Laut Dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Keberagaman Masyarakat Nelayan Desa Pugerkulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember”, *Skripsi*, tidak dipublikasikan, (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009), hlm. 61.

<sup>30</sup>Kantor Pariwisata, *op. cit.* hlm. 16.



Taman Nasional Meru Betiri atau yang sering disebut Bandalit merupakan sebuah wilayah konservasi yang terletak di Desa Andongrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember. Daerah ini merupakan kawasan konservasi baik daratan maupun perairan yang memiliki ciri khas tertentu, dan mempunyai berbagai macam fungsi. Fungsi tersebut antara lain perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Taman nasional ini dikelola dengan sistem zona dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, kebudayaan dan rekreasi alam. Jarak tempuh Taman Nasional Meru Betiri dari kota Jember sekitar 60 km ke arah selatan yang dapat ditempuh menggunakan kendaraan pribadi atau sewa yang mempunyai *double gardan* dengan jarak dari tanah agak tinggi. Hal ini untuk mengantisipasi kondisi jalan yang 10 km sebelum masuk ke lokasi merupakan jalan makadam/jalan tanah berbatu. Kawasan konservasi ini memiliki luas wilayahnya 37.585 hektar dan dikelola oleh Balai Taman Nasional Meru Betiri.<sup>31</sup>

Selain obyek wisata alam, Kabupaten Jember juga memiliki keragaman kultural berbasis etnis yang belum dikembangkan secara maksimal. Keragaman kultural berbasis etnis ini merupakan hasil warisan dari para migran yang dibawa ke wilayah Jember sejak masa Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab di atas penduduk Kabupaten Jember merupakan keturunan dari para migran suku Jawa dan Madura yang datang dari daerah-daerah di Jawa Tengah dan Pulau Madura. Keberagaman budaya yang dibawa oleh para migran yang datang dari Jawa Tengah dan Pulau Madura ini yang berperan besar dalam mengembangkan kebudayaan sehingga memunculkan berbagai bentuk kebudayaan. Kelompok kebudayaan yang dimiliki masyarakat Jember oleh para pakar Antropolog dikenal dengan kebudayaan *pandhalungan*. Secara etimologis *pandhalungan* merujuk pada kata “dhalung” yang mengandung dua pengertian, *pertama* “dhalung” dimaknai sebagai dulang/bejana besar yang

---

<sup>31</sup>Balai Taman Nasional Meru Betiri, *Kawasan Konservasi Meru Betiri*, (Jember: Balai Taman Nasional Meru Betiri, 2014), hlm. 13.

terbuat dari logam, dan *kedua* “dhalung” yang dimaknai sebagai gaya bertutur-kata/berbicara yang tidak memperhatikan strata bahasa (tata krama).<sup>32</sup> Pandalungan yang berasal dari kata *dhalung* berarti periuk atau bejana dianggap sebagai representasi kota yang menaungi banyak etnis, kebudayaan dan identitas sosial yang diwadahi dan diberi ruang, sehingga kelompok-kelompok kebudayaan masyarakat berkesempatan untuk unjuk diri.<sup>33</sup> Dalam periuk besar itulah masyarakat bebas berinteraksi, bersosialisasi, dan mengekspresikan karakteristik kultural mereka sehingga memunculkan beberapa kemungkinan dalam kehidupan kultural. Adapun makna kedua lebih bersifat stereotip bahwa seolah-olah masyarakat Jember tidak bisa berbahasa halus.<sup>34</sup>

Interaksi dua suku ini sangat intens pada perayaan-perayaan keagamaan dan hari besar, sehingga proses adaptasi kebudayaan sangat fleksibel. Artinya kebudayaan asli bawaan dari identitas kulutral mereka, misalnya Jawa dan Madura, bisa berubah tergantung dari penikmat dari seni tradisi tadi. Hal ini dapat dicontohkan seperti kelompok seni yang ada di Desa Candi Jati, Kecamatan Arjasa Jember, di mana ada kelompok ludruk Mara Jaya yang dalam pertunjukannya menggunakan bahasa Madura karena memang komunitas penontonnya berasal dari etnis Madura. Akan tetapi, di Desa Panti terdapat kelompok jaranan Turonggo Sakti yang memadukan jaranan Jawa dan Osing,

---

<sup>32</sup>Prawiroatmodjo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985), hlm. 99.

<sup>33</sup>Pengertian simbolik-kultural kata *pandhalungan* adalah kawasan yang menampung beragam kelompok etnis dengan berbagai latar belakang budaya, yang kemudian melahirkan tipologi kebudayaan baru yang mengambil unsur-unsur budaya yang membentuknya. Lihat Ayu Sutarto, “Sekilas tentang Masyarakat Pandalungan” Makalah Pembekalan Jelajah Budaya 2006”, diselenggarakan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, tanggal 7 – 10 Agustus 2006.

<sup>34</sup>Ayu Sutarto menjelaskan bahwa *pandalungan* bukanlah milik masyarakat Jember saja. *Pandhalungan* merupakan kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat yang mendiami daerah tapal kuda, seperti Bondowoso, Lumajang, Probolinggo dan Situbondo. Ciri dari masyarakat ini pada pola komunikasi yang tak mengenal strata. Dalam lingkup personal (sesama suku Jawa atau antar suku Madura) tradisi lisan penempatan strata bahasa mulai dihilangkan. Hal ini merupakan bentuk egalitarianisme/kebersamaan yang terbentuk dari bertahun interaksi dari kedua suku besar ini. Ayu Sutarto, *op. cit.* hlm. 23.

sedangkan para pelakunya merupakan campuran antara warga etnis Madura, Jawa, dan sebagian kecil Osing.<sup>35</sup>

Kondisi yang begitu fleksibel ini melahirkan banyak ragam modifikasi tradisi baru yang luar biasa, antara lain adalah budaya Patrol. Kesenian patrol merupakan seni yang lahir dari hibridasi kebudayaan Jawa-Madura-Islam, di mana dua etnis ini bergabung dalam satu kelompok musik yang dulunya dimanfaatkan untuk membangunkan warga yang sedang puasa, melalui tetabuhan dan lantun sholawatan. Seiring berkembangnya zaman salawatan diubah menjadi lagu daerah, lagu dangdut bahkan juga lagu-lagu perjuangan.<sup>36</sup> Instrumen musik pada acara patrol sangat mudah dilacak sebagai gabungan antara perangkat Jawa dan Madura. Ayu Sutarto menemukan bahwa instrumen tersebut antara lain a) *dhung-dhung*, bambu besar sepanjang kurang dari 1m dengan alat penabuhnya, berfungsi sebagai kendang; b) *gong*, dua buah bambu terikat dalam satu bentuk instrumen, ditabuh dengan alat penabuh yang dililit karet, berfungsi sebagai gong besar dan gong kecil; c) *krucilan*, perangkat angklung, berfungsi sebagai pengiring lagu; d) seruling; dan e) kempul, bambu yang berdiameter relatif kecil dan dipukul dengan penabuh yang juga dari bambu, berfungsi sebagai pengiring gong.<sup>37</sup>

Tidak hanya Patrol, kesenian yang berkembang di Jember ternyata diilhami dari berbagai interaksi antar masyarakatnya. Seperti kesenian *Can-macanan Kadhuk* yang sekilas seperti barongsai ini, dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap hewan macan yang dianggap perkasa. Dalam penuturan para seniman yang masih aktif, kesenian ini dulunya dipakai untuk menakut-nakuti *garong*, *gali* atau maling yang kerap beraksi ketika masa panen tiba. Belakangan kesenian ini sering dipentaskan pada acara sunatan atau hajatan yang

---

<sup>35</sup>Hary Yuswadi, "Budaya Pandalungan: Bentuk Multikulturalitas dan Hibridisasi Budaya Antaretnik", dalam Ayu Sutarto & Setya Yuwana Sudikan (ed). *Pemetaan Kebudayaan di Provinsi Jawa Timur: Sebuah Upaya Pencarian Nilai-nilai Positif*, (Surabaya: Biro Mental Spiritual Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Komyawisda Jatim, 2008), hlm. 54.

<sup>36</sup>"10 Tahun Karnaval Musik Patrol", *Majalah Halo Jember*, 2010, hlm. 43-45.

<sup>37</sup>Sutarto, *op. cit.* hlm. 26.

bersifat tidak resmi.<sup>38</sup> Bentuk kesenian yang dijelaskan di atas banyak berkembang di wilayah Jember bagian utara.

Berbeda dengan kearifan lokal yang banyak diperankan oleh masyarakat Jember bagian utara, wilayah Jember bagian selatan yang daerahnya berdekatan dengan pesisir menghasilkan kebudayaan yang biasanya dikaitkan dengan pola mata pencaharian. Petik Laut merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat Jember di pesisir selatan. Petik laut adalah sebuah upacara adat atau ritual sebagai rasa syukur kepada Tuhan, dan untuk memohon berkah rezeki dan keselamatan yang dilakukan oleh para nelayan. Kegiatan ini biasanya dilakukan di Pantai Puger dan Payangan. Ritual diawali pembuatan sesaji oleh sesepuh nelayan. Perahu kecil (perahu sesaji) kemudian disiapkan dan dihanyutkan ke laut. Dalam upacara petik laut para nelayan menghias perahu seindah mungkin, selain itu berbagai perayaan-perayaan yang dilaksanakan seperti halnya mengadakan pengajian, orkes dangdut, dan sebagainya sesuai keinginan para nelayan di masing-masing daerah. Biasanya acara ini dihadiri lebih dari 1.000 orang, baik warga sekitar maupun wisatawan yang sedang berkunjung.<sup>39</sup>

Kearifan lokal masyarakat Jember bagian selatan lainnya adalah Pegon yang merupakan nama lain dari cikor. Setiap tanggal 7 Syawal, masyarakat Jember merayakan Hari Raya Kupat. Biasanya setiap Hari Raya Kupat warga berbondong-bondong mendatangi tempat-tempat wisata yang ada di Jember, terutama pantai. Festival Pegon Hias merupakan acara yang menyerupai karnaval, di mana berbagai Pegon yang sudah dihias oleh masyarakat melakukan pawai di jalanan menuju pinggir pantai Watu Ulo. Sesampainya di pinggir pantai sapi-sapi penarik Pegon dilepas dan diberi makanan rumput, sedangkan pengemudi beserta keluarganya menggelar tikar untuk mengadakan acara doa bersama-sama. Acara ini diakhiri dengan makan tumpeng dan ketupat bersama-

---

<sup>38</sup>Hary Yuswadi, *op. cit.* hlm. 57.

<sup>39</sup>Rohim, *op. cit.* hlm. 65.



sama. Tujuan acara ini adalah rasa syukur warga kepada Tuhan dan agar desa di mana warga tinggal selalu *gemah ripah loh jinawi*.<sup>40</sup>

Reog merupakan kesenian yang banyak dijalankan oleh masyarakat Jember bagian selatan. Kesenian ini hasil adopsi masyarakat dari kesenian Ponorogo. Reog merupakan budaya daerah yang masih sangat kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Kesenian ini biasanya dipentaskan oleh penduduk Jawa, yang mayoritas bertempat tinggal di Kecamatan Ambulu, dalam acara bersih desa atau hajatan desa dan peringatan hari besar tertentu seperti peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus. Kesenian Reog Ponorogo ini berkembang di Kecamatan Ambulu dan Wuluhan.<sup>41</sup> Selain kesenian Reog Ponorogo adalah pagelaran wayang kulit dan jaranan. Kesenian ini banyak berkembang di beberapa kecamatan yang menjadi basis etnis Jawa seperti Semboro, Umbulsari, Kencong, Ambulu, dan Wuluhan.

Selain wisata seni yang belum dikenal secara luas, potensi wisata hasil kreasi seniman adalah Jember Fashion Carnival (JFC). Sejak tahun 2001, Kabupaten Jember mulai dikenal oleh masyarakat luas ketika karnaval yang menampilkan berbagai busana modern diselenggarakan pertama kali pada 1 Januari 2001.<sup>42</sup> Festival ini dilaksanakan bersamaan dengan ulang tahun hari jadi kota Jember yang jatuh pada 1 Januari 1928. Melalui JFC ini pariwisata Kabupaten mulai dilirik oleh wisatawan asing. Populartitas JFC dalam pentas pariwisata ini dipegaruhi oleh penggagasnya, yaitu Dynand Fariz yang menampilkan beragam busana dalam bentuk karnaval.<sup>43</sup> Sebagai pendidik di bidang fashion, Dynand Fariz mendirikan rumah mode yang digunakan sebagai tempat mendidik anak-anak remaja untuk mengenal busana yang trend di dunia mode. Pada awalnya, Dynand Fariz mempromosikan karnaval busana ini dengan

---

<sup>40</sup>“Berawal dari Birnie”, *Majalah Halo Jember*, 2009, hlm. 14-23.

<sup>41</sup>“Seboeah Kota Pada Soeatoe Masa”, *Majalah Halo Jember*, 2009, hlm. 6-15.

<sup>42</sup>R. Jannah, “Jember Fashion Carnival: Konstruksi Identitas dalam Masyarakat Jaringan”, *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 17, 2012, hlm. 2.

<sup>43</sup>Jannah, *op. cit.* hlm. 9-12.



acara berkeliling kampung dan alun-alun Jember. Kegiatan ini kemudian menjadi inspirasi timbulnya gagasan untuk menyelenggarakan JFC.<sup>44</sup> Tahun 2001 karnaval busana mulai diperkenalkan pada masyarakat luas. Arena yang digunakan untuk menggelar JFC adalah jalan utama kota Jember sepanjang 3,6 kilometer, sehingga sering terjadi kemacetan pada jalan utama yang menuju kota Jember, melalui rute Surabaya-Pasuruan-Probolinggo-Lumajang-Jember. Pada tahun-tahun selanjutnya JFC dijadikan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan pariwisata yang ditawarkan oleh pemerintah. Rangkaian kegiatan pariwisata yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Jember ini dirangkum dalam program Bulan Berkunjung ke Jember. Lambat laun program Bulan Berkunjung ke Jember menjadi ikon kegiatan pariwisata Kabupaten Jember.<sup>45</sup>

Kekayaan alam Kabupaten Jember dengan karakteristik wilayah yang dikelilingi deretan pegunungan di sebelah utara dan garis pantai yang memanjang ke timur di sebelah selatan menyimpan berbagai potensi wisata. Akan tetapi, potensi-potensi wisata Kabupaten Jember belum ditangani secara serius. Seperti yang sudah dijelaskan di atas keadaan ini dipengaruhi oleh sistem politik dan tidak adanya kebijakan yang mengatur tata cara pengelolaan pariwisata di Kabupaten Jember.

Kondisi geografis yang menyimpan wisata alam dengan keragaman kultural berbasis etnis menjadikan Kabupaten Jember berpotensi untuk menjadi salah satu tempat tujuan wisata. Berdasarkan karakteristiknya berbagai potensi wisata yang sudah dijelaskan di atas dapat dikelompokkan menjadi lima

---

<sup>44</sup>M, BC. Wahyu, "Proses Kreatif Desainer Fashion Dynand Fariz", *Skripsi*, (Malang: Jurusan Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Bahasa & Seni, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 2012), hlm. 45-51.

<sup>45</sup>Bulan Berkunjung ke Jember atau yang biasa disingkat BBJ merupakan program pemerintah Kabupaten Jember dalam menarik minat para wisatawan. Program ini mulai diperkenalkan pada 2003 dengan mempromosikan rangkaian wisata Kabupaten Jember ke Kedutaan Besar di Jakarta. BBJ biasanya dilaksanakan pada bulan Juni sampai menjelang bulan Agustus setiap tahunnya. Lambat laun program BBJ menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara ketika pemerintah daerah mengandeng JFC. Calista Wangsa, "Strategi Humas Pemerintah Kabupaten Jember dalam Mengkonsumsikan Program BBJ", *Skripsi tidak dipublikasikan*, (Jember: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember, 2008), hlm. 67.

kelompok. Tabel di bawah ini menerangkan tentang kelompok-kelompok pariwisata yang dimiliki Kabupaten Jember.

**Tabel 2.5: Jenis-Jenis Pariwisata di Kabupaten Jember**

No.	Jenis Pariwisata	Keterangan
1	Wisata Belanja	Suwar-suwir Buah Naga Cerutu Bobin Tape dan Produk Olahan Singkong Kedelai Edamame Sangkar Burung Jeruk Semboro Kerajinan Manik-Manik Batik Sumberjambe Durian Sumberjambe
2	Wisata Budaya	Situs Purbakala Petik Laut Pegon Jember Fashion Carnaval Tarian Jaran Kencak Tarian Lahbako Reog Musik Patrol dan Hadrah Candi Deres Goa Jepang
3	Wisata Agro	Agrowisata Kopi & Cacao Agrowisata & Loko Tour Garahan Agrowisata Gunung Gambir

4	Wisata Bahari	Alam Nusa Barong Tempat Pelelangan Ikan Puger Pantai Watu Ulo Pantai Paseban Pantai Getem Pantai Puger Pantai Pasir Putih Malikan (Papuma) Pantai Payangan Pantai Rowo Cangkak Pantai Nanggalan Pantai Bandalit
5	Wisata Buatan	Lapangan Golf Glantangan Pemandian Niagara Ambulu Pemandian Patemon Pemandian Olang Sibutong Pemandian Kebon Agung Taman Botani Sukorambi

Sumber: Diolah dari dokumen Kantor Pariwisata Kabupaten Jember 2014

#### **2.4. Industri Pariwisata Kabupaten Jember Sebelum 2003**

Karakteristik wilayah yang menyimpan pesona alam dengan beragam kultural berbasis etnis yang dimiliki Kabupaten Jember tersebut secara keseluruhan belum ditangani dengan maksimal. Berbagai potensi wisata Kabupaten Jember yang tergabung dalam lima kelompok, seperti yang sudah dijelaskan di atas, sebelum tahun 2003 kurang tertangani secara menyeluruh. Pada masa ini kegiatan pariwisata difokuskan pada pariwisata kota, sehingga pengelolaan pariwisata Kabupaten Jember kurang merata. Tempat-tempat wisata di daerah-daerah kecamatan yang sulit dijangkau akibat kurangnya infrastruktur bahkan belum

tersentuh sama sekali. Begitu juga dengan seni budaya yang berbasis etnis belum dapat dijadikan sebagai daya tawar untuk menarik minat para wisatawan.

Tersendatnya kegiatan pariwisata di Kabupaten Jember secara menyeluruh dan lebih intensif pada daerah perkotaan yang mudah dijangkau serta kurang intensif pada daerah-daerah yang sulit dijangkau ini dipengaruhi oleh berbagai permasalahan yang melingkupinya. Salah satunya adalah sistem politik yang belum memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengelola kekayaan alamnya masing-masing. Seperti yang telah diketahui pada masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah daerah merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah tidak mempunyai hak untuk mengatur dan mengelola kekayaan alam yang dimiliki. Hasil dari pengelolaan kekayaan alam daerah kembali ke pusat dan dari pusat baru dikembalikan lagi ke daerah. Permasalahan di atas mengandung pengertian adanya sistem pemerintah pusat sangat menggurita sampai ke bawah, sehingga masyarakat di daerah-daerah hanya bisa menerima untuk menjalankan perintah dari pemerintah pusat.<sup>46</sup>

Dampak langsung dari sistem pemerintahan yang sentralistik ini adalah terhambatnya proses pembangunan. Proses pembangunan daerah hanya bisa menunggu intruksi dari pusat, karena sebagian besar dana yang digunakan adalah bantuan dari pemerintah pusat. Seperti yang telah diketahui umum dalam proses pembangunan sebuah daerah selalu membutuhkan dana yang cukup besar. Guna menggalang dana bagi pembangunan pemerintah daerah harus berusaha untuk mencari sumber dana yang dapat mendukung secara penuh keberhasilan pembangunan ekonomi tersebut. Selama masa pemerintahan Orde Baru dana untuk pembangunan di wilayah daerah mendapat suplai dari pemerintah pusat. Pada umumnya sebagian besar sumber keuangan daerah masih berasal dari bantuan pemerintah pusat. Bantuan tersebut berupa dana perimbangan yang terdiri atas bagi hasil pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana

---

<sup>46</sup>Hans Antlov, *Negara Dalam Desa; Patronase Kepemimpinan Lokal*, (Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2002), hlm, 54-55.



Alokasi Khusus (DAK).<sup>47</sup> Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta tingginya sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat terhadap total penerimaan menjadikan Kabupaten Jember kurang mandiri. Akibatnya proses pembangunan berjalan dengan tersendat-sendat.

Permasalahan yang lain dari sistem pemerintahan sentralistik adalah terhambatnya daya kreatif masyarakat akibat tidak ada saluran yang bisa mewadahnya. Kebanyakan kreativitas seni budaya masyarakat hanya ditujukan untuk memenuhi permintaan, sehingga seni budaya masyarakat bersifat instan. Hal ini dapat dilihat pada fenomena-fenomena yang seringkali disorot oleh media, di mana para birokrat seolah-olah terdapat sebuah kelaziman, bahwa budaya dan pariwisata maupun pendidikan nasional, ketika diposisikan sebagai nilai-nilai luhur dan jati diri bangsa, akan dimobilisasi sebagai kekuatan ideologis-politis yang bisa digerakkan setiap saat untuk mempertahankan kekuasaan dengan dalih integritas dan ketahanan nasional, termasuk dari ancaman budaya asing. Para birokrat berharap masyarakat tetap berperilaku tertib dan tidak mengganggu ketertiban. Persoalan ini mengandung pengertian bahwa negara terjebak dalam esensialisme berlebihan yang menganggap budaya bangsa atau budaya lokal sebagai benda beku dan bersifat stagnan, sehingga kreativitas seni budaya rakyat tersumbat.

Memasuki masa reformasi, kegiatan pariwisata Kabupaten Jember belum menampakkan hasilnya. Belum pulihnya kondisi sosial politik akibat gerakan reformasi yang digulirkan mahasiswa dalam rangka meruntuhkan pemerintah

---

<sup>47</sup>Fivien Muslihatinningsih menengarai bahwa kriteria utama keberhasilan pembangunan daerah adalah dalam bentuk PDRB secara sektoral maupun perkapita. PDRB secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu produksi daerah tertentu dalam menghasilkan pendapatan atau balas jasa kepada faktor-faktor yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tersebut. Pertumbuhan PDRB yang sangat cepat mempunyai manfaat yang cukup besar dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Peningkatan pertumbuhan PDRB merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah. Menurutnya ada perbedaan jelas antara PDRB sebelum Otonomi Daerah dan sesudah Otonomi Daerah. Pertumbuhan ekonomi wilayah Jember rata-rata 12,18% pertahun setelah adanya Otonomi Daerah. Ini membuktikan proses pembangunan pariwisata masih belum berjalan sebelum tahun 2003. Lihat Fivien Muslihatinningsih, "Analisis Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Jember Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah", dalam *Jurnal ISEI Jember*, Vol. 3 No. 1, April 2013, hlm. 187-188.



Orde Baru ditengarai sebagai hambatan dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Jember. Pasca gerakan reformasi, eforia politik menjadi wacana umum yang merasuki para birokrat. Hal ini dapat dilihat dengan tarik ulurnya para birokrat yang memandangi wisata dari sisi politik. Polemik antara dewan dengan pemerintah daerah yang diwakili oleh dinas sosial merupakan contoh yang bagus dalam kasus ini. Tahun 2002, Anang Murwanto menyerukan agar pemerintah mencontoh pengembangan pariwisata di Banyuwangi, terutama Pulau Merah yang mengundang daya tarik wisata asing.<sup>48</sup> Daerah ini merupakan sebuah kawasan wisata pantai di Desa Sumberagung, Pesanggaran, Banyuwangi. Pulau Merah memiliki pemandangan alam yang bagus dengan hamparan pasir putih yang indah, dengan ada tiga spot ombak dengan tinggi gelombang mencapai 3-5 meter. Banyak wisatawan yang menyebut pemandangan di Pulau Merah mirip dengan salah satu pantai di Thailand. “Sama-sama pasirnya putih dengan Kuta, tapi keistimewaannya ada gunung-gunung di sekitar pantai, seperti di Thailand.”<sup>49</sup> Puluhan peselancar dari berbagai negara beraksi mengikuti *Red Island Banyuwangi International Surfing Competition* di Pulau Merah, Kabupaten Banyuwangi. Sebanyak 29 peselancar dari berbagai negara, seperti Jepang, Australia, Selandia Baru, Perancis, dan Amerika Serikat. Kategori nasional diikuti 19 peselancar, dan kategori lokal 40 peselancar. Hal ini ada kaitannya dengan perbaikan infrastruktur oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Anggota Dewan menengarai bahwa semua itu karena pemerintah Banyuwangi lebih memperhatikan dalam pengembangan pariwisata yang dapat menarik wisatawan mancanegara. “Akses transportasi di Pulau Merah diperbaiki. Setelah even *surfing* selesai, pengunjung bukan hanya dari lokal, tapi juga dari berbagai daerah luar Banyuwangi.”<sup>50</sup> Pada dasarnya Jember, menurutnya, memiliki potensi wisata

---

<sup>48</sup>Wawancara dengan Anang Murwanto, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jember, tanggal 26 Oktober 2014.

<sup>49</sup>“Jember Diminta Tiru Banyuwangi Soal Wisata”, *Berita Jember*, 17 Juli 2002.

<sup>50</sup>*Ibid.*

yang tak kalah dengan Banyuwangi, namun potensi tersebut belum tersentuh sarana dan prasarana yang memadai.

Sebaliknya Eko Heru Sunarso, mengatakan bahwa tidak semua potensi wisata di Jember harus mendapat perbaikan akses transportasi. Menurutnya, ini dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. “Contohnya di Bande Alit. Kalau diperbaiki akses jalan ke sana, jangan-jangan yang senang pelaku *illegal hunting* dan *illegal logging*, karena ini wilayah Taman Nasional Meru Betiri.”<sup>51</sup> Menurutnya, Lokasi wisata Bande Alit dimasukkan dalam kategori wisata minat khusus, artinya wisatawan yang datang ke sana menyadari kondisi alam yang masih khas. Pada sisi lain Pemerintah Kabupaten Jember terbentur dengan masalah yuridiksi atau kewenangan. “Tempat wisata seperti pantai Papuma (Pasir Putih Malikan) adalah wilayah Perhutani.” Hal ini yang menjadi faktor lain kurang berkembangnya pariwisata di Kabupaten Jember. Tarik ulur dalam kewenangan menjadi salah satu permasalahan tersendiri yang menjadi penghambat bagi pemerintah untuk mengembangkan pariwisata.

---

<sup>51</sup>Hasil wawancara dengan Eko Heru Sunarso, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember, tanggal 26 Oktober 2014.

**BAB 3**  
**PERKEMBANGAN PARIWISATA DAN DAMPAKNYA TERHADAP**  
**PEREKONOMIAN MASYARAKAT DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**  
**KABUPATEN JEMBER**

Bergulirnya arus reformasi dengan tumbangnya Pemerintah Orde Baru, menjadi babak baru bagi sistem politik di Indonesia. Perubahan-perubahan yang paling menonjol adalah pemberian keleluasaan tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat atas peranan pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya masing-masing. Kebijakan yang lebih dikenal dengan istilah Otonomi Daerah ini menjadi landasan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk membuat berbagai peraturan daerah yang digunakan sebagai dasar tata laksana untuk menjalankan pemerintahan dan mengelola sumber daya alamnya. Industri pariwisata merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki daerah dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Kabupaten Jember sebagai salah satu pemerintah daerah Kabupaten Jember juga berusaha mengembangkan industri pariwisata yang dimilikinya dengan cara membuat kebijakan tentang kepariwisataan. Permasalahan ini yang akan menjadi pembahasan dalam bab ini.

**3.1. Kebijakan dan Arah Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Jember**

Sejak terjadi perubahan sistem politik akibat reformasi yang digulirkan pada 1998 dengan runtuhnya pemerintahan Orde Baru, pemerintah pusat memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola kekayaan alamnya masing-masing. Kebijakan pemberian wewenang kepada pemerintah

daerah dalam mengurus wilayahnya masing-masing ini dikenal dengan Otonomi Daerah. Kebijakan ini tertuang dalam Undang-Undang No.21 tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan terbitnya Undang-Undang No.32 Tahun 2004.<sup>1</sup> Pelaksanaan Otonomi Daerah secara tidak langsung membawa perubahan dalam sistem pemerintahan daerah. Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan. Tujuan pemberian wewenang dalam mengatur dan mengelola pemerintah daerah adalah agar aparat birokrasi pemerintahan dapat menyelenggarakan pelayanan publik dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.<sup>2</sup>

Penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam ilmu manajemen pemerintahan dikenal dengan istilah *good governance*.<sup>3</sup> *Good governance* merupakan suatu tuntutan dan sekaligus menjadi dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah, di mana pengelolaan pelayanan publik yang semula berorientasi sekedar pemerintah sebagai penyedia menjadi pelayanan yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat sebagai pengguna. Era otonomi daerah merupakan era bagi pemerintah daerah lebih responsif terhadap kepentingan publik, di mana paradigma pelayanan publik beralih dari pelayanan yang sifatnya sentralistik ke pelayanan yang lebih memberikan fokus pada pengelolaan yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan (*customer-driven-government*).<sup>4</sup> Prinsip *good governance* dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan sebuah tuntutan bagi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan

---

<sup>1</sup>Pheni Chalid, *Otonomi Daerah; Masalah, Pemberdayaan, Dan Konflik*, (Jakarta: Kemitraan, 2005), hlm. 23.

<sup>2</sup>Fivien Muslihatinningsih, “Analisis Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Jember Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah” dalam *Jurnal ISEI* (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia) Vol. 3 No. 1 April 2013, hlm. 177-190.

<sup>3</sup>Riant Nugroho, *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*, (Jakarta: Elek Media Komputindo, 2006), hlm. 34.

<sup>4</sup>Y.T. Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), hlm. 23.



yang demokratis, transparan, bersih, bertanggung jawab, efektif dan efisien. Kebutuhan untuk mewujudkan prinsip *good governance*, juga didasari oleh realitas peran birokrasi pemerintah daerah yang belum secara optimal memberikan penyediaan pelayanan publik secara memuaskan kepada masyarakat, bahkan citra birokrasi pemerintah daerah secara umum belum banyak mengalami perubahan.<sup>5</sup>

Berangkat dari pengertian di atas, Pemerintah Kabupaten Jember mulai melakukan beberapa pembangunan yang ditujukan untuk menumbuhkan perekonomian daerah. Dinamisasi pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengusung konsep otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk mengoptimalisasikan seluruh sumber daya atau kekayaan daerah secara lebih berdaya guna dalam memberikan nilai tambah bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi target utama pemerintah daerah.<sup>6</sup> Implementasi dari pengelolaan kekayaan alam adalah dengan membuat strategi dan inovasi pemasaran serta menawarkan potensi daerahnya sebagai upaya menarik pengunjung sebanyak-banyaknya yang nantinya dapat meningkatkan jumlah investor untuk menanamkan modalnya di daerah, sehingga berdampak pada peningkatan PAD yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Investasi adalah motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi, sementara itu pembangunan di dalam era otonomi daerah sekarang ini pada intinya adalah berupa pemberdayaan daerah, dimana dalam hal ini daerah harus mampu

---

<sup>5</sup>Lembaga Administrasi Negara, *Akuntabilitas dan Good Governace*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 1992), hlm. 12.

<sup>6</sup>Menurut Undang-Undang PAD 1 Januari 2011, unsur PAD terdiri dari: (1) Pajak Daerah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan/atau keramaian yang memerlukan tiket masuk (misalnya tempat wisata), Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak BPHTB, Pajak PBB; (2) Pendapatan Retribusi Daerah atas izin tertentu; (3) Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; (4) dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, sesuai dengan undang-undang. Dalam Elizabeth Tiur Manurung (dkk.), *Perbandingan Kontribusi Industri Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bandung Dan Jember*, (Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan, 2014), hlm. 11-12.

<sup>7</sup>B. Wiwiho (dkk.), *Pariwisata Citra dan Manfaatnya*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1999), hlm. 34.



mengatur, mengurus, dan mengelola kepentingan serta aspirasi masyarakat di wilayahnya. Pemberdayaan daerah mutlak berkaitan dengan pengelolaan kekayaan dan aset daerah. Prinsip pengelolaan kekayaan dan aset daerah harus dilandasi oleh kebijakan dan regulasi yang secara lengkap mencakup aspek penting dari pengelolaan finansial yang bijaksana, namun tetap memberikan peluang bagi daerah untuk berkreasi menemukan pola yang paling sesuai dengan kondisi dan budaya lokal sehingga memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.<sup>8</sup>

Pengelolaan kekayaan dan aset daerah yang menjadi sumber daya ekonomi daerah mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena sumber keuangan pemerintah daerah berasal dari hasil pengelolaan kekayaan dan aset daerah. Oleh karena itu, pengelolaan kekayaan dan aset daerah perlu ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya.<sup>9</sup> Tantangan bagi pengelolaan setiap jenis kekayaan dan aset daerah akan berbeda, bergantung kepada karakter dari kekayaan dan aset daerah tersebut dan sistem pengelolaan yang diterapkan merupakan prosedur yang perlu disepakati bersama, baik oleh pemerintah daerah maupun dengan pihak-pihak yang terkait lainnya.

Gambaran di atas mendorong pemerintah daerah Jember membuat strategi dan inovasi pemasaran potensi daerahnya dengan harapan bisa menarik pengunjung sebanyak-banyaknya dengan harapan nantinya dapat meningkatkan jumlah investor menanamkan modalnya di daerah Jember, sehingga berdampak pada peningkatan PAD yang bersangkutan. Salah satu sumber PAD Kabupaten Jember yang belum dikelola secara maksimal adalah pariwisata.<sup>10</sup> Sebagai daerah yang memiliki potensi besar dalam kepariwisataan, Jember belum mampu mengelola sendiri kekayaan alam yang berupa pariwisata. Persoalan ini bermuara

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 28.

<sup>9</sup>Lincoln Arsyad, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, (Yogyakarta: BPFE, 1990), hlm. 23.

<sup>10</sup>Ulandari Desi (dkk.), "Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD dan Kebijakan Pengembangannya". Pada *Proceeding Seminar Nasional Green Pariwisata*, Universitas Mataram Lombok, Nusa Tenggara Barat, 2013

pada ketiadaan kebijakan pemerintah daerah yang menjadi landasan hukum bagi pengelolaan pariwisata. Oleh karena itu, guna memfasilitasi dan memaksimalkan pengelolaan pariwisata pemerintah daerah Kabupaten Jember menerbitkan berbagai kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda).

Kedudukan dan fungsi perda berbeda antara yang satu dengan lainnya sejalan dengan sistem ketatanegaraan yang termuat dalam UUD/Konstitusi dan UU Pemerintah Daerahnya. Perbedaan tersebut juga terjadi pada penataan materi muatan yang disebabkan karena luas dan sempitnya urusan yang ada pada pemerintah daerah. Demikian juga terhadap mekanisme pembentukan dan pengawasan terhadap pembentukan dan pelaksanaan perda pun mengalami perubahan seiring dengan perubahan pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menjalankan pemerintah yang demokrasi, pemerintah daerah dituntut untuk lebih memberikan pelayanan publik secara maksimal dengan tujuan untuk memajukan daerahnya.<sup>11</sup>

Beberapa perda yang menjadi landasan dasar untuk mengelola dan mengembangkan pariwisata Kabupaten Jember, yaitu Perda No. 8 Tahun 2003 yang berkaitan dengan Usaha Kepariwisata, Perda No. 9 Tahun 2003 tentang Redistribusi Ijin Usaha Kepariwisata dan Perda No. 14 Tahun 2003 tentang Redistribusi Masuk Obyek Wisata. Bersamaan dengan itu Pemerintah Kabupaten Jember juga mengeluarkan Perda No 30 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember. Perda No. 30 kemudian diperjelas lagi dalam Perda No. 20 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pariwisata Kabupaten Jember.<sup>12</sup>

Penerbitan perda ini berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah daerah maupun masyarakat Jember dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata. Guna mewujudkan keseriusan pemerintah dalam mengelola pariwisata,

---

<sup>11</sup>Joko Widodo, *Good Governance: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, (Surabaya: Insan Cendekia, 2004) hlm. 43.

<sup>12</sup>Tim Penyusun, *Wakil Rakyat Kabupaten Jember: Tempo Doeloe & Sekarang*, (Jember: Sekretariat DPRD Jember, 2007), hlm. 34

pemerintah Kabupaten Jember mendirikan instansi yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata, yaitu Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember di Jl. Jawa No. 74. Pendirian badan resmi pemerintah ini diikuti dengan pembentukan formatur organisasi.<sup>13</sup>

Susunan organisasi Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember terdiri dari: Kepala Kantor; Sub Bagian Tata Usaha; Seksi Sarana Jasa dan Obyek Wisata; Seksi Pemasaran dan Penyuluhan; Seksi Kebudayaan; dan Kelompok Jabatan Fungsional. Tugas pokok Kantor Pariwisata dan kebudayaan adalah sebagai unsur pendukung tugas bupati yang sifatnya lebih teknis dan spesifik yang pada dasarnya melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan kewenangan urusan wajib dan pilihan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan dan tugas lain yang diberikan oleh bupati. Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember ini berfungsi sebagai; a. penyusunan rencana program kerja pengembangan obyek wisata; b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan terhadap sarana dan jasa obyek wisata; c. pelaksanaan pemasaran dan penyuluhan kegiatan obyek wisata; d. pembinaan dan pengembangan keanekaragaman budaya, kesenian maupun purbakala; e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian di bidang Pariwisata dan Kebudayaan; dan f. pemrosesan perijinan dan penginventarisan usaha jasa pariwisata dan kebudayaan.<sup>14</sup>

Berdirinya Kantor Pariwisata dan Kebudayaan sebagai badan pemerintahan daerah yang resmi bertanggung jawab sebagai pengelola pariwisata tidak serta merta menjadikan pariwisata di Kabupaten Jember berkembang. Hal ini ada kaitannya dengan kondisi sosial politik masa kepemimpinan Syamsul Hadi Siswoyo, yang kurang kondusif bagi pengembangan pariwisata. Seperti yang telah diketahui umum Kabupaten Jember masa pemerintahan Syamsul Hadi Siswoyo

---

<sup>13</sup>Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, *Profil Pariwisata Kabupaten Jember*, (Jember: Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, 2005), hlm. 3.

<sup>14</sup>*Ibid.* hlm. 6.

suasana sosial politik Kabupaten Jember dilingkupi oleh gejolak sosial akibat mengemukanya demonstrasi masyarakat terhadap pemerintah daerah yang dipicu oleh permasalahan tanah. Demonstrasi masyarakat ini bermuara pada perebutan tanah bekas perkebunan swasta milik pengusaha Belanda antara rakyat pemilik lahan dengan perusahaan negara (Perhutani, PTPN, dan PDP).<sup>15</sup>

Wilayah Kabupaten Jember pada masa Kolonial Hindia Belanda merupakan daerah kantong bagi pembukaan perkebunan swasta. Pembukaan lahan-lahan perkebunan di wilayah Jember kebanyakan lahannya diperoleh dari penyewaan atas dasar sistem Hak Guna Usaha (HGU).<sup>16</sup> Pasca Indonesia merdeka terjadi perubahan dalam kepemilikan tanah, dimana banyak tanah bekas hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai asal konvensi hak barat dikuasai oleh negara atau memperpanjang masa HGU sampai 20 tahun.<sup>17</sup> Tanah bekas perkebunan di wilayah perkebunan Jember kebanyakan diperpanjang masa sewanya selama 20 tahun dihitung sejak 1980 dan berakhir tahun 1999/2000. Persoalan ini yang menjadi pemicu bagi gejolak sosial di wilayah Kabupaten Jember.

---

<sup>15</sup>Konflik tanah antara rakyat melawan pemerintah di Kabupaten Jember pada dekade kepemimpinan Syamsul Hadi yang paling mengemuka adalah kasus tanah Ketajek Kecamatan Panti. Kasus ini bermula dari perampasan secara paksa tanah-tanah yang ditempati masyarakat Ketajek Panti oleh pemerintah daerah yang diakui sebagai bagian dari wilayah Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Jember. Guna menuntut keadilan atas dirampasnya tanah-tanah miliknya masyarakat Ketajek yang tergabung dalam Masyarakat Pemilik Tanah Ketajek (MPTP) Jember melakukan demonstrasi di DPRD dan Kantor Bupati selama periode kepemimpinan Syamsul Hadi ini. Lihat kajian Desy, "Perlawanan Petani Ketajek Terhadap Perusahaan Daerah Perkebunan Jember Tahun 1974-2002", skripsi tidak dipublikasikan, (Jember: Universitas Jember, 2005).

<sup>16</sup>Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu paling lama 25 atau 35 tahun dan apabila diperlukan masih dapat diperpanjang lagi batas waktu 20 atau 25 tahun. Dianto Bahriadi, *Status Perkebunan di Indonesia Kontemporer dalam Reformasi Agraria*, (Jakarta: LPFE UI, 1997), hlm. 128.

<sup>17</sup>Berdasar UU No. 5/1960 tanah bekas hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai asal konvensi hak barat yang masa berlakunya berakhir selambat-lambatnya tanggal 24 September 1980 pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan, secara otomatis menjadi tanah negara. Liliek Istiqomah, *Hak Gadai atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional*, (Surabaya: CV. Usaha, 1982), hlm. 22.



Demonstrasi rakyat di depan gedung DPRD Jember dan Kantor Bupati Jember dalam rangka menuntut kembali tanah garapan warisan leluhur mereka serta penolakan perpanjangan HGU menjadi fenomena sehari-hari masa kepemimpinan Syamsul Hadi Siswoyo.<sup>18</sup> Hal ini menjadi sorotan media dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap kurang minatnya para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Jember bagi pembangunan pariwisata. Situasi sosial politik Kabupaten Jember yang kurang kondusif pada masa kepemimpinan Syamsul Hadi Siswoyo ini menjadikan pariwisata terhambat dalam pengembangannya. Tempat-tempat wisata yang berpotensi sebagai salah satu sumber PAD kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah, sehingga mengurangi daya tarik wisatawan untuk datang ke Jember.

Kondisi sosial politik daerah Jember yang kurang kondusif masa kepemimpinan Syamsul Hadi Siswoyo menjadikan pemerintah kurang memperhatikan perkembangan pariwisata. Para birokrat dan politisi terseret dalam arus gejolak sosial yaitu dengan berusaha menenangkan massa. Hal ini berakibat pada terbengkalainya kegiatan pariwisata. Terbengkalainya kegiatan pariwisata masa kepemimpinan Syamsul Hadi Siswoyo secara tidak langsung berdampak pada kerugian riil dengan hilangnya kekayaan alam milik Kabupaten Jember. Menurut data Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Trowulan Mojokerto di Jember, terdapat 400 lebih benda purbakala berupa arca, batu kenong, menhir, sarkopagus, dolmen dan senjata Kerajaan Majapahit. Akan tetapi, sebagian besar benda-benda tersebut terpaksa disimpan di beberapa tempat karena Pemerintah Kabupaten Jember belum mempunyai museum.<sup>19</sup> Akibat dari ketiadaan museum dan kurangnya petugas kepurbakalaan adalah hilangnya sekitar 100 artefak di Kompleks Situs Kamal, Kecamatan Arjasa antara 1999-2001, termasuk benda-

---

<sup>18</sup>“Rakyat Ketajek Menuntut Hak Tanah di Depan Dewan,” *Radar Jember*, 12 Februari 2001.

<sup>19</sup>“Jember Miliki 400 Benda Purbakala”, diunduh dari:  
<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/07/23/1os6t2-jember-miliki-400-benda-purbakala>, diakses 19 Mei 2014.

benda sejarah di situs Candi Deres Desa Purwosari Kecamatan Gumukmas.<sup>20</sup> Tragedi ini secara tidak langsung menjadi cerminan bagi pemerintah yang dianggap kurang serius dalam mengelola pariwisata.

### 3.2. Pembinaan Infrastruktur Daerah Kabupaten Jember

Perkembangan pariwisata di Kabupaten Jember mulai terlihat sejak kepemimpinan Kabupaten Jember dipegang oleh MZA. DJalal yang menjabat selama dua periode yaitu dari 2005-2010 dan 2010-2015. Dengan mengusung konsep *Menata Kota Membangun Desa*,<sup>21</sup> Djalal menggalakkan program pembangunan di wilayah Jember untuk membangun kepercayaan para investor. Langkah awal dalam pembangunan perekonomian daerah Jember dimulai dengan membuat rencana strategis pembangunan. Ada tiga sektor dalam rencana strategis pembangunan yang diprioritaskan dalam pembangunan perekonomian di Kabupaten Jember, yaitu sektor pertanian, sektor perikanan dan sektor pariwisata.<sup>22</sup> Sektor pariwisata dijadikan sebagai salah satu dari tiga sektor yang diprioritaskan karena daerah Jember mempunyai potensi kekayaan alam yang menarik bagi pengembangan pariwisata, dan disamping itu sektor pariwisata dapat menyerap sumberdaya alam dan sumber daya manusia secara bersama-sama.<sup>23</sup>

Rencana strategis pembangunan daerah Jember ini juga meliputi pembenahan kondisi sosial politik dengan memberikan rasa aman dan tenteram bagi para investor, sehingga tertarik untuk menanamkan modalnya bagi pendukung pariwisata. Dalam konsep rencana strategis pembangunan komponen

---

<sup>20</sup> “Di Jember, Ratusan Benda Prasejarah Hilang” diunduh dari:

<http://berita.liputan6.com/read/12830/di-jember-ratusan-benda-prasejarah-hilang>, 19 Mei 2014.

<sup>21</sup> “Konsisten Membangun Desa Menata Kota”, *Radar Jember* 21 Mei 2008

<sup>22</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember “Direktori Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Jember 2008-2028” (Jember: Bappeda, 2008), hlm. 6.

<sup>23</sup> Pemerintah Kabupaten, *Draft Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2010-2015*, (Jember: Pemerintah Kabupaten, 2010), hlm. 4.

utama yang membentuk iklim investasi di daerah terdiri dari; kelembagaan pelayanan penanaman modal sebesar 16,9%, promosi investasi daerah sebesar 15,6%, komitmen pemerintah daerah sebesar 20%, infrastruktur sebesar 9,8%, akses lahan usaha sebesar 2,4%, tenaga kerja sebesar 6%, keamanan usaha sebesar 10,7%, kinerja ekonomi daerah sebesar 3,1%, dan peranan dunia usaha dalam perekonomian daerah sebesar 3,6%.<sup>24</sup> Terlihat bahwa promosi investasi daerah menempati prosentase terbesar kedua dalam membentuk iklim investasi di daerah. Hal ini menandakan bahwa promosi daerah harus dikomunikasikan dengan cara yang tepat.

Sasaran pertama dalam program pembangunan yang digalakkan MZA. Djalal adalah renovasi pembangunan alun-alun Kota Jember. Alun-alun bagi pemerintah daerah Kabupaten Jember merupakan tempat keberadaan suatu pemerintah dan simbol identitas masyarakat Jember.<sup>25</sup> Hal ini pada dasarnya mengambil konsep keberadaan alun-alun sejak masa lampau. Menurut catatan sejarah kehadiran alun-alun di Indonesia pada dasarnya sudah ada sejak jaman prakolonial. Meskipun dari dulu sampai sekarang bentuk fisik alun-alun sendiri tidak banyak mengalami perubahan, tetapi konsep yang mendasari bentuk fisik dan fungsinya sejak zaman prakolonial sampai sekarang telah mengalami banyak perubahan. Pada masa kerajaan konsep alun-alun digunakan oleh warga (rakyat biasa) untuk bertemu langsung dengan raja, guna meminta pertimbangan atau sesuatu kasus perselisihan. Orang harus memakai pakaian dan penutup kepala putih dan harus duduk menunggu diantara kedua pohon beringin sampai diperbolehkan menghadap raja. Perbuatan seperti ini disebut “pepe”.<sup>26</sup> Tidak hanya sebatas itu, alun-alun juga berfungsi sebagai tempat latihan militer dan pertunjukan hiburan rakyat. Pada kesimpulannya alun-alun pada zaman prakolonial

---

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 7.

<sup>25</sup> Budiono Herusatoto, *Simbolisme dalam Budaya Jawa*, (Yogyakarta: PT. Hanindita, 1984), hlm. 54.

<sup>26</sup> Robert Heine Geldern, *Konsepsi Tentang Negara & Kedudukan Raja Di Asia Tenggara*, terjemahan Deliar Noer, (Jakarta: CV. Rajawali, 1972), hlm. 45.

bisa berfungsi sebagai: a. Lambang berdirinya sistem kekuasaan raja terhadap rakyatnya; b. Tempat semua upacara keagamaan yang penting (adanya hubungan penting antara Kraton-Mesjid dan Alun-Alun); c. Tempat pertunjukkan kekuasaan militeris yang bersifat profan.<sup>27</sup> Konsep alun-laun mulai berubah seiring dengan peralihan kekuasaan dari sistem feodal (kerajaan) ke sistem pemerintahan Kolonial Hindia Belanda. Alun-alun lebih berfungsi sebagai tempat hiburan rakyat. Konsep inilah yang sebetulnya menentukan fungsi dan kehadiran alun-alun dalam suatu kota di Jawa.<sup>28</sup>

Alun-alun dalam *Encyclopedie van Nederlandsch Indie*, dijelaskan sebagai berikut:<sup>29</sup>

“Di hampir setiap tempat kediaman bupati, seorang kepala distrik di Jawa, orang selalu menjumpai adanya sebuah lapangan rumput yang luas, yang dikelilingi oleh pohon beringin di tengahnya. Lapangan inilah yang dinamakan ‘alun-alun’. Di kota-kota bekas kerajaan kuno (seperti Surakarta dan Yogyakarta), mempunyai dua buah ‘alun-alun’, sebuah terletak di Utara Kraton dan sebuah lagi terletak disebelah Selatan Kraton. Di permukaan alun-alun tersebut tidak boleh ada rumput tumbuh dan di atasnya ditutup dengan pasir halus. Di bagian Selatan dari alun-alun tersebut terdapat pintu masuk yang menuju ketempat kediaman raja atau bupati, dimana disana berdiri sebuah pendopo. Pegawai negeri atau orang-orang lain yang ingin bertemu dengan raja atau bupati menunggu waktunya disana untuk dipanggil, jika Raja merestui untuk menerima kedatangan mereka. Oleh sebab itu pendopo tersebut kadang-kadang dinamakan juga Paseban (asal kata seba). Pada masa lampau di alun-alun tiap hari Sabtu atau Senin (Seton atau Senenan) diadakan permainan Sodoran (pertandingan diatas kuda dengan menggunakan tombak yang ujungnya tumpul), atau pertandingan macan secara beramai-ramai yang dinamakan ‘rampog macan’. Pada waktu pertunjukan ini raja duduk di Siti Inggil, tempat yang paling tinggi di muka pintu Kraton. Pada tempat-tempat bupati terdapat panggung untuk melihat tontonan tersebut. Di Jawa Barat juga terdapat alun-alun kecil di depan rumah kepala desa, tetapi alun-alun tersebut tidak dikelilingi oleh pohon beringin. Mesjid seringkali terdapat di sebelah barat dari alun-alun”

---

<sup>27</sup>S. Santoso, “Kosep Struktur & Bentuk Kota Jawa s/d Abad ke 18”, dalam *Majalah Dimensi* No. 5. 1981, hlm. 34.

<sup>28</sup>*Ibid.* hlm. 35.

<sup>29</sup>J. Paulus. *Encyclopedie van Nederland Indie*, (Leiden: Twee Druk, Martinus Nijhoff, S’Gravenhage, NV v/h E.J. Brill, 1917) hlm. 31.



Pasca kemerdekaan Indonesia alun-alun menjadi unsur yang cukup dominan di kota-kota kabupaten sampai sekarang. Pembangunan yang digalakkan pemerintah Indonesia merubah fungsi kedudukan alun-alun kota kabupaten. Modernisasi alun-alun kota kabupaten menjadikan para pengambil keputusan atau kebijakan pembangunan kota ragu-ragu atau bahkan tidak mengerti mau difungsikan untuk apa alun-alun ini. Banyak alun-alun yang sekarang digunakan untuk tempat olah raga sepak bola, tenis, basket, ada pula yang sekarang difungsikan sebagai taman kota, bahkan banyak yang sekarang tidak jelas fungsinya, karena pusat kotanya sudah bergeser ke lain lokasi. Paling tragis lagi adalah alun-alun kota yang diincar investor untuk dibeli karena letaknya yang strategis di pusat kota. Semuanya ini sebagai akibat belum adanya suatu konsensus budaya yang jelas secara nasional, untuk bisa dipakai sebagai pegangan dalam menangani alun-alun yang ada sekarang, sehingga wajar kalau timbul kebingungan dalam menangani pembangunan.<sup>30</sup>

Keberadaan alun-alun sebagai simbol identitas masyarakat Jember ini yang mendorong pemerintah Kabupaten Jember merencanakan renovasi pembangunan alun-alun Kota Jember. Bagi pemerintah daerah alun-alun merupakan simbol identitas keberadaan Kota Jember, tempat bermain masyarakat Jember, dan sebagai bukti keberadaan Kota Jember yang aman dan tenteram, sehingga dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya. Rencana renovasi pembangunan alun-alun Kota Jember terlaksana pada 2006. Renovasi pembangunan alun-alun ini menelan biaya 5 milyar yang jadwalnya mulai dikerjakan pada Januari dan selesai pada Juli 2006.<sup>31</sup> Rencananya proyek renovasi pembangunan alun-alun Kota Jember ini sengaja dilakukan dengan tujuan untuk dijadikan kado bagi HUT RI, namun melihat perkembangan pembangunan yang

---

<sup>30</sup>Handinoto, "Alun-Alun Sebagai Identitas Kota Jawa, Dulu dan Sekarang", dalam *Majalah Dimensi* No. 18. 1992, hlm. 45.

<sup>31</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember Tahun 2013*, (Jember: BPS, 2013), hlm. 9.

baru dimulai, kemungkinan tidak akan selesai sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Hal ini terbukti dengan penganggaran kembali dana proyek renovasi pada 2007, 2008 dan 2009 yang total semuanya menelan biaya renovasi pembangunan alun-alun kembali dianggarkan pemerintah sebesar lebih dari 8 miliar.<sup>32</sup>

Bongkar pasang proyek renovasi pembangunan alun-alun Kota Jember mengesankan kurang seriusnya pemerintah daerah dalam menangani. Pembangunan yang hanya berkutat di seputar pembangunan alun-alun mendapat sorotan tajam dari masyarakat dan menilainya sebagai pemborosan dana APBD. Banyak pihak dalam masyarakat Jember mengomentari pembangunan alun-alun Kota Jember dilakukan tanpa konsep dan perencanaan yang matang. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Persada, Sucipto, bahkan dengan tajam menilai;

“Penataan dan pembangunan Kota Jember memang mutlak hak prerogatif bupati, tetapi hal itu janganlah dijadikan ajang untuk bahan uji coba. Selayaknya, bupati dalam melakukan pembangunan dan penataan didasarkan pada sebuah perencanaan yang matang dengan menjadikan APBD sebagai acuan kerja. Bukan asal kemauan kuat pribadi seorang bupati. Itu egois karena melanggar aturan!”<sup>33</sup>

Miftahul Ulum, Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) menilai pembangunan alun-alun dengan pola tahunan dan terkesan hanya bongkar pasang hanya membuang-buang anggaran saja. Padahal, masih banyak kegiatan yang lebih bermanfaat dan perlu penanganan serius. Di antaranya membayar hutang yang mencapai Rp 8 miliar untuk biaya pengobatan warga miskin, diluar Jamkesmas di Rumah Sakit Daerah dr Soebandi.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>Pemerintah Kabupaten Jember, *APBD Kabupaten Jember 2006-2010*, (Jember: Pemda, 2010), hlm. 6.

<sup>33</sup>“Renovasi Alun-alun Rp 1,2 M Mangkrak”. *Surabaya Pagi*, Senin 5 Oktober 2009.

<sup>34</sup>“Renovasi Alun-alun Rp 1,2 M Mangkrak”. *Surabaya Pagi*, Senin 5 Oktober 2009.

Pemerintah Kabupaten Jember sendiri menepis anggapan ketidakseriusannya dalam menangani proyek renovasi pembangunan alun-alun. Pemerintah Daerah Jember memberikan alasan bahwa potensi keterlambatan dalam pengerjaan proyek disebabkan karena kesulitan bahan baku sesuai dengan spesifikasi. Semula bahan baku dijanjikan, disediakan Kepala Dinas PU Bina Marga, Juwarto, namun setelah ditunggu lama barang tersebut tidak ada. Akhirnya Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melalui Sekretaris Daerah, Sugiarto, bisa memperoleh sendiri bahan baku tersebut di Cirebon.<sup>35</sup> Pelaksana proyek, Sugiarto, juga mengakui adanya keterlambatan penyelesaian sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Menurutnya, “pekerjaan itu terhambat karena banyak kegiatan selama Agustus hingga September.”<sup>36</sup> Menurut Kabid Tata Kota Dinas Pekerjaan Umum Jember, Didit, konsep alun-alun sebenarnya telah terencana, namun memang ada beberapa yang diubah sesuai dengan kebijakan bupati Jember. “Perubahan itu tidak keluar jauh dari master plan utama.” Terkait tidak segera dikerjakannya proyek tersebut, Didit berdalih sama dengan kontraktor pelaksana proyek, karena banyaknya kegiatan selama Agustus hingga Desember, sehingga pekerjaan itu tidak segera terlaksana.<sup>37</sup>

Apapun pendapat masyarakat, proyek pengerjaan renovasi pembangunan alun-alun Kota Jember akhirnya rampung pada 2010. Keberadaan alun-alun Kota Jember dengan wajah barunya mengesankan identitas Kota Jember sebagai kota pariwisata. Pemerintah daerah Jember bahkan memfasilitasi para pedagang pada tiap hari Minggu pagi untuk berjualan di sekitar alun-alun, sehingga jalan yang menuju kota sementara ditutup sampai pukul 10.00. Keberadaan para pedagang yang menawarkan berbagai mainan dan makanan bagi masyarakat

---

<sup>35</sup>Hasil wawancara dengan Sugiarto, Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, tanggal 26 Oktober 2014.

<sup>36</sup>Pemerintah Kabupaten Jember, *Draft Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2010-2015*. (Jember: Pemerintah Kabupaten, 2010), hlm. 5.

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm. 6

menggambarkan fungsi alun-alun sebagai tempat rekreasi bagi masyarakat Jember.<sup>38</sup>

Selain merenovasi alun-alun Kota Jember Pemerintah Daerah Jember juga melakukan pelebaran jalan-jalan utama di wilayah Kota Jember sehingga lalu lintas kendaraan berjalan dengan lancar serta pembangunan infrastruktur jalan-jalan yang menuju ke tempat-tempat wisata di daerah-daerah pinggiran kota juga digalakkan. Hal yang paling urgen dalam perkembangan pariwisata adalah dibukanya Bandara Notohadinegoro untuk mempermudah perjalanan para wisatawan yang transit di Surabaya. Sarana transportasi udara merupakan modal transportasi yang efektif, efisien, cepat, selamat, dan nyaman. Salah satu fasilitas pelayanan dalam bidang penerbangan adalah bandara (*airport*) yang melayani arus lalu lintas udara dan pengguna jasa transportasi udara dari dan menuju ke bandara tersebut.<sup>39</sup> Fungsi bandara adalah melayani arus lalu lintas pesawat terbang dan arus lalu lintas penumpang yang berangkat dan datang. Semakin besar ukuran pesawat terbang yang melakukan pendaratan dan lepas landas, berarti dibutuhkan tersedianya landasan pacu yang semakin panjang. Semakin banyak jumlah penumpang udara yang berangkat dan datang melalui suatu bandara, berarti dibutuhkan tersedianya gedung terminal penumpang yang semakin besar dan lapangan parkir yang lebih luas.<sup>40</sup>

Perencanaan sistem bandara sangat luas aspeknya, yaitu meliputi perencanaan fasilitas, perencanaan biaya, lalu lintas pesawat terbang dan penumpang, analisis pasar, ekonomi, dan lingkungan hidup. Sarana transportasi menjadi salah satu faktor penghambat iklim investasi di Kabupaten Jember. Bandara Notohadinegoro merupakan wujud cita-cita Pemerintahan Kabupaten Jember dan segenap masyarakatnya untuk memperoleh kemudahan bergerak

---

<sup>38</sup>“Bupati Djalal: Masyarakat Harus Punya Rasa Memiliki”, *Jember Post* 2009.

<sup>39</sup>“Menunggu Dibukanya Bandara Notohadinegoro”, *Majalah Jember Kita*, Oktober 2013, hlm. 10-14.

<sup>40</sup>Profil Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Energi Sumber Daya Mineral, *Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Jember Tahun 2012*, (Jember: Desperindag, 2012), hlm. 6.



(*mobile*) dari dan menuju Jember. Selain lebih singkat waktu dengan menggunakan transportasi udara, Bandara Notohadinegoro juga merupakan wujud kebanggaan bersama masyarakat Jember yang menginginkan pengakuan untuk menjadi sebuah daerah modern dan lebih baik lagi di masa mendatang.<sup>41</sup>

Bandara Notohadinegoro dibangun untuk menjawab kebutuhan masyarakat Jember yang sebelumnya merasa kesulitan jika akan menggunakan jasa transportasi udara, yaitu harus menempuh jarak sekitar 200 km dengan waktu tempuh sekitar 5 sampai dengan 7 jam untuk menuju Bandara Internasional Juanda di Surabaya. Waktu tempuh yang sangat tidak efisien untuk urusan bisnis. Bandara Notohadinegoro berada di lahan HGU milik PTPN XII dengan luas lahan 120 hektar. Pembangunan Bandara Notohadinegoro dimaksudkan nantinya akan mempunyai berbagai manfaat (kegunaan) yang dapat dirasakan khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Jember dan masyarakat pada umumnya. Manfaat adanya Bandara Notohadinegoro meliputi (1) manfaat ekonomi, (2) manfaat sosial, dan (3) manfaat politik. Namun banyak kendala yang dihadapi dalam merealisasikan Bandara Notohadinegoro, antara lain yaitu: (1) angkutan penghubung dan pembangunan prasarana jalan dari atau dan menuju Bandara Notohadinegoro, dan (2) penambahan prasarana dan sarana penunjang Bandara Notohadinegoro. Selain landasan pacu yang harus mengalami pembenahan. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Jember untuk mewujudkan Bandara Notohadinegoro. Dalam melakukan penilaian pada Bandara Notohadinegoro perlu diperhitungkan beberapa faktor, salah satunya kesiapan Bandara Notohadinegoro baik dalam fasilitas, sistem yang ada, dan lain sebagainya. Bandara Notohadinegoro juga harus melakukan pembenahan pada pagar pembatas yang harus dipasang mengelilingi Bandara Notohadinegoro. Hal itu harus dilakukan untuk keselamatan baik pada saat *landing* maupun *take-off* karena dua hal itu sangat penting dalam transportasi udara.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>*Ibid.* hlm. 9.

<sup>42</sup>*Ibid.* hlm. 17.

Keberadaan bandara ini sangat menunjang bagi kedatangan wisatawan di Kabupaten Jember. Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, diketahui bahwa jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Jawa Timur melalui pintu masuk Juanda selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan. Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Provinsi Jawa Timur, juga akan berdampak kepada jumlah penghunian kamar hotel berbintang di Jawa Timur yang juga ikut meningkat. Hotel berbintang lima merupakan hotel yang paling diminati oleh wisatawan mancanegara, kemudian disusul dengan hotel berbintang empat dan hotel bintang tiga.<sup>43</sup>

### 3.3 Kreasi Seniman Lokal Dalam Proyek Pencarian Identitas

*Jember Fashion Carnaval* (JFC) merupakan sebuah karnaval yang diilhami oleh peragaan busana setiap minggu (*fashion week*) di rumah-rumah mode Eropa. Sejarah tercetusnya ide JFC bermula pada tahun 1998, Suyanto kakak pertama Dynand Fariz mendapat pensiun dini, kemudian membeli sebuah bangunan di perumahan Gunung Batu Permai Jember. Pada saat itu, Suyanto berniat membuka usaha sendiri dan bersamaan dengan itu pulanglah Dynand Fariz dari sekolah mode di Paris. Melalui kolaborasi modal dari Suyanto dan keahlian dari Dynand Fariz, dibukalah sebuah rumah mode yang diberi nama *Dynand Fariz International High Fashion Center*. Dalam perjalanannya, *Dynand Fariz International High Fashion Center* berusaha memakai tradisi rumah mode di Eropa yang salah satunya mengadakan peragaan busana tiap minggunya dengan mewajibkan semua karyawan untuk memakai busana yang sedang trend di dunia saat itu. Setelah beberapa kali mengadakan peragaan busana, akhirnya para karyawan mengusulkan untuk tampil di alun-alun. Hal ini didasarkan pada pertimbangan busana yang telah mereka rancang hanya dipakai di rumah mode Dynand Fariz atau hanya dipakai selama perjalanan dari rumah ke kantor. Para akhirnya karyawan mengusulkan untuk tampil di alun-alun kota Jember dan diputuskan tampil berparade di alun-alun kota Jember yang diikuti oleh 50 orang,

---

<sup>43</sup>Elizabeth Tiur Manurung (dkk.), *op. cit.* hlm. 47.

terdiri dari karyawan rumah mode Dynand Fariz, karyawan Salon Karisma dan sisanya karyawan Dyfa Salon. Usulan para karyawan kemudian disetujui dan diwujudkan Dynand Fariz, dan Suyanto untuk tampil di depan publik yang lebih luas. Penampilan peragaan busana di depan publik ini menghasilkan ide untuk membuat karnaval yang lebih besar dan dipersiapkan secara profesional.<sup>44</sup>

Hal ini sebenarnya bukan kebetulan semata, mengingat kakak beradik ini telah terbiasa mengadakan *event* reuni keluarga yang melibatkan hingga 300-an orang baik dari Jakarta, Surabaya, Probolinggo, Jember dan Bondowoso, di mana di dalamnya ada seminar, lomba, dan entertainment. Dengan kata lain, sejak lama mereka telah terbiasa mengadakan *event* yang diselenggarakan dengan konsep tertentu, sehingga sebenarnya membuat *event* karnaval bukanlah sesuatu yang baru bagi mereka. Pada saat itu terjadi perdebatan apakah akan memakai nama carnival atau carnaval, jika dilihat dari bahasa Inggris seharusnya carnival namun karena mereka menggunakan konsep dari Perancis, misalnya menggunakan nama *defile* untuk setiap kelompok, maka dipilihlah nama carnaval yang dipakai menjadi *Jember Fashion Carnival*.<sup>45</sup>

Visi JFC adalah menjadikan Jember sebagai kota wisata mode pertama di Indonesia bahkan di dunia. Semangat ini seiring dengan otonomi daerah yang memungkinkan setiap daerah untuk menggali potensi daerahnya serta meningkatkan kemakmuran daerahnya. Untuk memenangkan kompetisi, kota-kota JFC membaca peluang dengan sebuah ide yang harus berbeda, unik dan unggul dibanding daerah-daerah lainnya. Karnaval JFC ini berbeda karena mengangkat tema trend dunia kemudian diharapkan nantinya menghasilkan *multiplayer effect* pada potensi lain yang ada. Sedangkan misi JFC adalah perjalanan yang

---

<sup>44</sup>R Jannah, "JFC, Identitas Kota Jember dan Diskursus Masyarakat Jaringan", Tesis tidak dipublikasikan, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hlm. 84.

<sup>45</sup>Diah Dwi Lestari, "Bahasa Inggris Sebagai Salah Satu Sarana Dalam Mempromosikan Wisata Kabupaten Jember Melalui JFC Di Mancanegara". Laporan Kuliah Kerja Universitas Jember tidak dipublikasikan, (Jember: Universitas Jember, 2007), hlm. 34.

membawa banyak manfaat bagi pengembangan dunia pendidikan kita (SDM) kesenian, budaya, dan perkembangan ekonomi kreatif di Jember.<sup>46</sup>

Setelah membuat visi dan misinya akhirnya mereka menentukan kapan mereka akan tampil. Untuk pertama kalinya, JFC ditampilkan pada tanggal 1 Januari 2003, bertepatan dengan HUT Kota Jember. Penentuan tanggal ini disengaja agar mereka mendapat dukungan dari Pemkab Jember dan masyarakat Jember. Pertama kali mereka melakukan rekrutmen peserta dengan melakukan sosialisasi dari sekolah ke sekolah dan dari kampung ke kampung. Pada saat itu yang menjadi target adalah anak-anak SMA, khususnya SMKN 3, karena di sekolah tersebut terdapat jurusan tata busana. Mereka berangkat ke sekolah tersebut dengan membawa beberapa model yakni karyawan-karyawan rumah mode Dynand Fariz yang sudah berdandan dengan kostum-kostum yang akan menjadi tema karnaval nantinya. Mereka melakukan presentasi di sekolah tersebut mengenai bagaimana cara berjalan seorang model dan bagaimana membuat kostum. Seluruhnya dijelaskan hingga membuat para siswa tertarik. Misalnya, pada saat itu terdapat kostum yang bahannya dari spreng, taplak, dan gordin. Dari situlah awalnya para peserta menjadi tertarik dan bersedia untuk mengikuti karnaval.<sup>47</sup>

Tidak semulus sosialisasi yang dilakukan di SMA-SMA, pengurusan izin kegiatan ternyata tersendat-sendat. Proposal yang telah dimasukkan ke Pemkab Jember sejak bulan Agustus ternyata baru disetujui dan mendapat ijin pada tanggal 31 Desember 2003. Alasan Pemkab Jember pada waktu itu tidak segera memberi ijin adalah karena rute karnaval yang ingin dilalui oleh JFC berbeda dengan rute karnaval yang sering dilalui pada umumnya. Rute karnaval di Jember biasanya melewati Jalan Ahmad Yani, Jalan Trunojoyo, terus masuk Jalan Sultan Agung, kemudian balik ke alun-alun, kini rute karnaval yang diajukan melawan

---

<sup>46</sup>Devin Gelorawan Sudiar, "Pelaksanaan Kegiatan Promosi Atraksi Wisata Jember Fashion Carnival (JFC) Dalam Memasuki Pasar Nasional Dan Internasional". Laporan Kuliah Kerja Universitas Jember tidak dipublikasikan, (Jember: Universitas Jember, 2008), hlm. 23.

<sup>47</sup>Jannah, *op. cit.* hlm. 91.



arus kendaraan, yaitu dari depan Kantor Pemda terus memutar alun-alun, kemudian langsung ke arah barat masuk Jalan Sultan Agung, dan finis di Bank Niaga.<sup>48</sup> Lambatnya pemberian ijin juga disebabkan oleh tema karnaval yang diangkat adalah tema Amerika, sedangkan pada saat itu sedang terjadi penyerangan Amerika terhadap Irak. Hal ini mau tidak mau turut mempengaruhi keputusan bupati yang secara politis lebih memihak Irak. Namun di sisi lain, Pemkab Jember juga tidak bisa menolak memberi ijin, karena pihak JFC sama sekali tidak meminta bantuan dana.

Berdasarkan pengalaman mengajukan ijin kegiatan yang sedemikian sulit, akhirnya Suyanto yang pada saat itu mengurus perizinan JFC, berniat tidak akan lagi mengadakan JFC 2. Akan tetapi, hal yang tidak terduga adalah tampilan di depan publik 1 Januari 2003 mendapat sambutan yang tidak terduga, di mana penonton dan peserta demikian antusias hingga karnaval berakhir. Melihat respon yang sangat positif dari masyarakat akhirnya pihak JFC memutuskan untuk melanjutkan mengadakan JFC 2.

Dalam perjalanannya kemudian, JFC mulai berusaha mencari bentuk yang terbaik. Mereka berusaha melakukan riset mengenai tema apa yang akan menjadi trend, bentuk karnaval bagaimana yang ideal, hingga bagaimana menjaring sebanyak mungkin media untuk datang meliput. Seluruhnya dikerjakan bersama-sama dengan sukarela oleh Dynand Fariz, Suyanto dan beberapa karyawan rumah mode Dynand Fariz. Setelah memikirkan bentuk yang paling ideal dalam karnaval berikutnya akhirnya, pihak JFC berusaha merumuskan keunikan karnaval tersebut, antara lain, peserta bukanlah desainer, model, maupun *dancer* profesional. Mereka adalah anak-anak remaja Jember yang dilatih dalam *in house training*, dan mereka diajarkan untuk merancang sendiri kostum, aksesoris, dan make up mereka sendiri. Setiap *defile* tidak pernah ada kostum karnaval yang sama, sehingga seluruh peserta yang ikut dalam *Jember Fashion Carnival*, mau tidak mau harus mengasah kreatifitas mereka untuk berkompetisi dengan peserta yang lain, memperebutkan beasiswa pendidikan 1 tahun di Esmod

---

<sup>48</sup>*Ibid.* hlm. 95.

Jakarta. Dalam perkembangannya, JFC memiliki beberapa jaringan dengan pihak-pihak di luar JFC diantaranya adalah media, perusahaan kosmetik (Sariayu), dan hubungannya dengan Pemerintah Kabupaten Jember.<sup>49</sup>

Media merupakan jendela informasi yang memberikan masyarakat pengetahuan tentang sesuatu hal. Pada masa sekarang media merupakan jaringan informasi yang bisa diakses semua kalangan dalam memperoleh informasi. Sejak semula pihak JFC telah melihat pentingnya peran media untuk mendukung perkembangan dan memperkenalkan JFC kepada khalayak luas. Menyadari hal itu, akhirnya pihak JFC berusaha melakukan riset bagaimana caranya agar media mau memberitakan *event* mereka. Tantangan pertama yang dihadapi oleh JFC adalah media lokal yang melihat JFC sebagai *event* Agustus biasa dan tidak berbeda dengan *event-event* menjelang Agustus lainnya. Setelah memikirkan cara agar media mau meliput mereka akhirnya JFC mencoba mencari *event-event* skala nasional maupun internasional yang umumnya diliput oleh media, kebetulan pada saat itu terdapat Bali *fashion week* yang diliput banyak media, baik nasional maupun internasional. Setelah pihak JFC melihat iklan, terdapat beberapa acara yang ditawarkan dalam *event* tersebut antara lain, *exhibition*, seminar, dan *show*. Akhirnya, JFC memutuskan untuk ikut dan ketika pihak JFC menceritakan latar belakang keikutsertaan mereka, JFC mendapat potongan harga dari Panitia Bali *Fashion Week* saat itu.<sup>50</sup>

Tantangan berikutnya adalah bagaimana menyajikan JFC dalam *exhibition* yang menarik. Jika umumnya peserta pameran memajang baju dan aksesoris, maka JFC memajang foto-foto karnaval mereka dan memutar video rekaman saat *show time* JFC di bulan Agustus. Sempat pihak JFC merasa aneh, namun mereka tetap berusaha menampilkan yang terbaik, sehingga persiapan dilakukan sebaik mungkin. Semua foto-foto terbaik dipilih secara selektif,

---

<sup>49</sup>BC. Wahyu M, "Proses Kreatif Desainer Fashion Dynand Fariz", S1 Skripsi tidak dipublikasikan, (Solo: Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 2012), hlm. 34

<sup>50</sup>Istiqlaliah Dian Cahyani, "Implementasi Jember Fashion Carnival Sebagai Bagian Dari City Branding Kabupaten Jember", Skripsi tidak dipublikasikan, (Jember: Universitas Jember, 2008), hlm. 37.

kemudian dilakukan simulasi, pada setiap meter yang disewa, diputuskan akan dipajang gambar, ditambah aksesoris macam-macam sehingga nantinya dipastikan tampilan stand JFC yang unik dan menarik perhatian pengunjung.<sup>51</sup>

Akhirnya, pihak JFC berangkat dengan menaiki sebuah minibus menuju Bali dan agar lebih murah mereka menginap di rumah seorang penduduk Jember yang tinggal di Bali. Sesampainya di *stand* pameran Bali *Fashion week*, kru JFC segera menyiapkan *stand* pameran sesuai dengan simulasi yang telah dilakukan sebelumnya. Karena persiapan yang telah matang akhirnya mereka paling awal membuka stand. Begitu stand mereka selesai kemudian diputar CD-CD JFC saat karnaval di alun-alun Jember sembari melakukan *dance* JFC untuk menarik pengunjung. Jadilah stand JFC dipenuhi oleh pengunjung dan menjadi stand yang paling ramai diantara stand-stand yang ada dalam pameran “Bali *Fashion Week*”.<sup>52</sup>

Kebetulan di depan stand JFC adalah stand media. Dari sinilah media mulai tertarik memperhatikan JFC, media yang saat itu adalah wartawan Kompas, Arif Sunandar, mulai tertarik dengan JFC. Melihat *stand* tersebut akhirnya Kompas memutuskan untuk membuat liputan JFC di bulan Agustus 2005. Pada saat itu, mereka melakukan kontak dengan kontributor Kompas di Jember, ternyata kontributor Kompas Jember mengatakan bahwa itu hanyalah *event* Agustusan biasa. Akhirnya, pihak Kompas tidak jadi meliput JFC. Pada saat yang bersamaan di stand JFC juga terdapat wartawan *Reuters* yang tertarik dengan JFC. Setelah meminta alamat akhirnya wartawan tersebut berjanji untuk datang ke Jember pada bulan Agustus untuk meliput JFC.<sup>53</sup>

Sampailah akhirnya *Reuters* merupakan pihak media yang meliput pertama kali *event* JFC tahun 2005. Saat itu Kompas yang berniat membeli berita dari *Reuters* sangat kaget melihat terdapat berita JFC. Karena pada saat itu koran

---

<sup>51</sup>“Eyes on Triumph – Story of a Decade”, *Majalah Halo Jember*, 2011, hlm. 6-23.

<sup>52</sup>“Manifesto Fashionista dari Jember”, *Majalah Halo Jember*, 2009, hlm. 50-55.

<sup>53</sup>“World Treasure”, *Majalah Halo Jember*, 2010, hlm. 6-19.

Kompas edisi Sabtu-Minggu membutuhkan liputan budaya. Dan pada akhirnya pihak Kompas harus membeli berita JFC dari *Reuters*. Hal inilah yang kemudian menjadi pukulan telak bagi Kompas sebagai koran nasional yang terpaksa harus membeli berita yang terjadi di wilayahnya sendiri, dari *Reuters* yang notabene adalah kantor berita asing. Sejak itulah akhirnya seminggu setelah JFC tampil di bulan Agustus 2005, Kompas menurunkan wartawannya untuk meliput secara eksklusif di Jember. Melihat Kompas meliput JFC ke Jember, akhirnya Jawa Pos yang berkedudukan di Jawa Timur merasa “wilayahnya” dimasuki oleh Kompas, merasa tidak terima dengan hal itu, akhirnya Jawa Pos juga membuat liputan tentang JFC, sehingga sejak JFC ke 4 tahun 2005 mulai banyak wartawan koran baik lokal, nasional maupun internasional yang melakukan liputan terhadap *Jember Fashion Carnaval*. Bahkan televisi nasional yang tidak hanya meliput saat *show time* bulan Agustus, tetapi juga di luar bulan Agustus, seperti acara *Laptopsi Unyil, Si Bolang*, dan lainnya.<sup>54</sup>

Dalam relasinya dengan media, pihak JFC membantu memberikan gambaran dan keleluasaan akses untuk menulis apa saja mengenai JFC. Pihak manajemen JFC juga memberi kemudahan informan yang bisa diwawancarai, pesan-pesan yang bisa diangkat dari tema-tema *devile* JFC serta segala macam topik mengenai peserta, tema, maupun tentang Jember. Selain kerja sama dalam bentuk barter berita yaitu JFC diberitakan dan media memberitakan. Terdapat juga kerjasama dalam bentuk iklan gratis seperti yang terjadi antara JFC dengan Metro TV. Kerja samanya adalah pihak Metro TV menayangkan iklan JFC secara gratis, dan mereka dapat memberitakan *event* tersebut di Jember. Kerjasama ini murni kerjasama non komersial, bahkan demi mendukung *event* pihak Metro TV berniat membuat iklan JFC dalam bentuk video klip. Menurut pihak JFC, jika harus membayar nilainya bisa mencapai 150 juta. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi JFC sebagai *event* budaya non komersial.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup>“Ibu Kota Fesyen Indonesia”, *Majalah Halo Jember*, 2011, hlm. 26-29.

<sup>55</sup>“JFC Jadi Ikon Jember”, *Surya* 8 Juli 2012.



Hubungan baik antara JFC dengan media ini menjadi keuntungan yang sangat berarti bagi *event* tersebut. Selain semakin dikenal oleh khalayak banyak, JFC juga akhirnya mendapat banyak tawaran *road show* dari berbagai perusahaan dan tempat-tempat wisata yang ingin dihibur oleh Karnaval JFC. Selain pemberitaan media yang juga sangat menguntungkan JFC dengan adanya fotografer-fotografer *hobbies* yang beberapa di antara mereka adalah penulis-penulis lepas. Sehingga, tidak jarang jika sewaktu-waktu saat orang Jember atau peserta JFC sedang naik pesawat Lion Air tidak menyangka membaca berita tentang JFC dan melihat foto-foto JFC terpampang di majalah Lionmag.<sup>56</sup>

Berdasarkan pengalaman dengan media inilah kemudian pihak JFC berusaha sebisa mungkin menjaga hubungan baik mereka dengan pihak media dan fotografer. Menjaga hubungan baik dengan media salah satunya dengan menolak segala bentuk tawaran iklan yang membuat *event* JFC menjadi komersial, dengan kata lain JFC selalu menyebut dirinya sebagai *event* sosial. Relasi JFC dengan media ini memberikan dua mata sisi yang berbeda. Di sisi lain sejak media sering memberitakan JFC menjadi semakin dikenal dan semakin banyak mendapat tawaran untuk tampil *road show* di beberapa kota. Namun di sisi lain demi menjaga hubungan baik dengan media dan untuk tetap menjadi *event* sosial pihak JFC terpaksa menolak banyak tawaran iklan.<sup>57</sup>

Selain menjalin kerjasama dan hubungan yang harmonis dengan media, JFC juga menjalin kerjasama dengan perusahaan Sariayu Martha Tilaar. Kerjasama ini dalam bentuk JFC memakai produk Sariayu dalam setiap *show time* mereka dan Sariayu berhak menampilkan iklan yang menyatakan bahwa Sariayu Martha Tilaar telah mendukung terselenggaranya JFC. Dalam kerjasama ini Sariayu memberikan paket produk terbaiknya (PAC Martha Tilaar) kepada JFC yang dibagikan kepada seluruh *defile*. Paket make-up ini selain dipakai untuk

---

<sup>56</sup>“Menunggu Dibukanya Bandara Notohadinegoro”, *Majalah Jember Kita*, Oktober 2013, hlm. 10-14.

<sup>57</sup>“Cruising The Land of Beauty”, *Buklet Pariwisata Kabupaten Jember*, 2010, hlm. 1.

*show time* juga dipakai dalam waktu-waktu di mana JFC tampil, misalnya dalam setiap *road show* mereka.<sup>58</sup>

Hubungan kerja sama ini telah cukup lama terjalin setidaknya sejak JFC ke 4 tahun 2005. Hubungan kerjasama ini sejak tahun 2005 selalu diperbaharui setiap tahunnya hingga tahun 2009, atau JFC 8. Jika pihak JFC bisa disebut pilih-pilih dalam menjalin kerjasama dengan pihak manapun, menerima atau menolak, kerjasama ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, misalnya apakah pihak yang mengajak kerjasama tersebut memiliki visi dan misi yang sama dengan JFC, apakah pihak yang mengajak kerjasama memiliki perhatian pada kreatifitas, budaya nasional dan menampilkan keunikan lokal dan dalam pertimbangan ini Sariayu Martha Tilaar dianggap memenuhi kriteria tersebut. Kerjasama dengan Sariayu Martha Tilaar tidak hanya dilakukan dengan pemberian paket make-up kepada JFC, akan tetapi juga dengan meminta JFC untuk berkarnaval dengan tema “Merak Kasmaran dan Reog Ponorogo” untuk mempromosikan tata rias Sariayu Martha Tilaar Jawa Timur di Surabaya.<sup>59</sup>

Selain hubungannya dengan media dan perusahaan kosmetik, JFC juga memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Kabupaten Jember. Jika melihat pada mulanya JFC sedikit kesulitan dalam mendapatkan izin penggunaan jalan raya dari Pemkab Jember, dan beberapa sikap kurang mendukung pada mulanya, terasa sangat berbeda jika melihat sejak JFC 5 Pemkab Jember menjadi begitu antusias mendukung JFC. Dari beberapa informasi yang disampaikan oleh manajemen JFC, pernah suatu kali bupati Jember tidak bersedia membuka JFC *show time* di bulan Agustus yang kemudian diwakilkan pada wakil Bupati Jember, tidak berapa lama kemudian JFC mendapatkan undangan untuk mengikuti pawai budaya di Istana Negara dan disaksikan oleh Presiden dan wakil presiden RI. Hal ini menjadi pukulan telak bagi Pemkab Jember yang semula kurang mendukung JFC.

---

<sup>58</sup>“Eyes on Triumph – Story of a Decade”, *Majalah Halo Jember*, 2011, hlm. 6-23.

<sup>59</sup>Vita Prastiana, “Studi tentang Pengelolaan Event Karnaval pada Jember Fashion Carnaval (JFC), S1 Skripsi tidak dipublikasikan, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2012), hlm. 37.

Demi untuk mengurangi rasa bersalah akhirnya bupati Jember yang pada saat itu adalah MZA Djalal dengan diam-diam memberikan *surprise* dengan menjemput tim JFC di stasiun Jember.<sup>60</sup>

Sementara itu, sikap kontra juga pernah ditunjukkan masyarakat terhadap JFC. Melihat JFC saat ini tentu tidak akan menyangka pernah mengalami penolakan dari beberapa kalangan masyarakat Jember. Pada saat JFC 2 dimana banyak peserta yang berpakaian dengan bagian perut terbuka, sehingga banyak masyarakat yang menilai bahwa JFC menampilkan peserta yang berpakaian serba mini. Pada saat itu, Pemda Jember hampir tidak memberi ijin kepada penyelenggara JFC untuk mengadakan JFC 4. Penolakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah Jember berpenduduk mayoritas Islam dan karnaval dengan pakaian serba terbuka dapat dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya. Beberapa fraksi di DPRD Jember menolak dan tidak memberi ijin bagi penyelenggaraan JFC berikutnya, yang akhirnya berujung *hearing* antara manajemen JFC dengan DPRD Jember pada tahun 2005. Dalam *hearing* itu manajemen JFC menjelaskan kepada para anggota Dewan bahwa JFC tidak demikian adanya. Selain *hearing* di depan anggota dewan, manajemen JFC juga mengajak anggota DPRD Jember untuk menyaksikan langsung JFC tampil. Memang disadari saat tema *defile* India banyak peserta yang memakai kostum terbuka di bagian perut. Semakin kreatifnya peserta dari tahun ke tahun, peserta JFC bisa-bisa tidak lagi dikenali karena begitu tertutupnya kostum mereka. Seiring dengan semakin banyaknya media memberitakan *event* JFC yang juga turut mengangkat Jember maka masyarakat mulai menyadari JFC bukan sekedar karnaval biasa dan merasa bangga karenanya.<sup>61</sup>

Pada tahun 2008, penolakan kembali terjadi disampaikan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jember dalam sebuah long march menyambut ramadhan seperti disebutkan dalam pemberitaan dan menyerukan untuk menyelamatkan generasi dan menjaga kesucian Ramadhan dari bahaya liberalisasi budaya, yang

---

<sup>60</sup>Jannah, *op. cit.* hlm. 98.

<sup>61</sup>Lembar Notulensi *hearing* tanggal 23 April 2005 DPRD Kabupaten Jember.

salah satunya melalui *event* JFC, sehingga dalam long marchnya mereka mengatakan "Salah besar jika Bulan Berkunjung Jember berikot *Jember Fashion Carnival* memberikan manfaat bagi masyarakat Jember." Hal ini tidak bisa dihindari mengingat Jember adalah sebuah wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim. Dalam kontestasi identitas menjadi hal yang wajar sikap pro dan kontra terhadap JFC, yang tidak diharapkan adalah sikap tidak mau tahu dan sikap tidak peka terhadap apa yang sedang terjadi dalam wilayah sosiokultural Jember.<sup>62</sup>

Melihat perubahan-perubahan positif yang diterima oleh JFC hingga saat ini, akhirnya JFC melihat perlu melakukan berbagai cara agar konsepsi Jember kota karnaval ini dapat diterima oleh masyarakat sebagai pendukung kebudayaan. Jika dikatakan JFC memberi dampak ekonomi, mungkin belum sepenuhnya mengingat JFC hanya terjadi 1 hari dalam sebulan dan selanjutnya Kota Jember seperti hari-hari biasa, sepi dan jauh dari gambaran kota karnaval. Hal inilah yang akhirnya membuat manajemen JFC perlu membuat semacam *event-event* kecil yang dapat memberi semangat dan sentuhan agar Jember atau warga Jember nantinya terbiasa dengan seni dan pertunjukan. *Event-event* kecil yang kontinu dilakukan oleh JFC, warga Jember mulai tahu apa sebenarnya yang ingin dicapai oleh JFC. Misalnya, saat ini semakin mudah mengatur penonton di alun-alun, apresiasi yang diberikan oleh warga Jember terhadap JFC juga semakin baik. Dari *events* ini juga disosialisasikan apa-apa saja yang telah JFC lakukan, *roadshow*nya kemana saja, kemudian prestasi apa saja yang telah diraih, dan lain sebagainya. JFC menginformasikan kepada warga Jember segala hal termasuk rekrutmen kepada warga Jember untuk masuk menjadi peserta JFC.<sup>63</sup>

Meski masih jauh dari harapan, tidak dapat dipungkiri semakin banyak perubahan positif yang coba dilakukan oleh pemerintah sejak JFC masuk ke wilayah sosiokultural Jember. Melalui ranah sosiokultural, JFC mendapat dukungan dari masyarakat. Terlihat dari bagaimana orang-orang Jember berjubel

---

<sup>62</sup>Bra Baskoro dan Cecep Rukendi, "Membangun Kota Pariwisata Berbasis Komunitas: Suatu Kajian Teoritis", dalam *Jurnal Kepariwisata Indonesia* Vol. 3 No. 1 Maret 2008 hlm. 37-41.

<sup>63</sup>*Ibid.* hlm. 45.



menonton di jalan-jalan. Masyarakat Jember yang agraris yang haus hiburan akan tertarik, selain karnaval ini spektakuler juga gratis dinikmati oleh penonton. Pada wilayah kebudayaan ini masyarakat merasa mendapat tontonan bagus dan mudah dinikmati sehingga semakin lama JFC menjadi milik rakyat, dimiliki. Hal yang tidak bisa dipungkiri adalah dukungan dari seluruh Indonesia dan penjuru dunia saat ini sedang mengalir dan itu seharusnya bisa dimanfaatkan untuk membangun ekonomi kreatif di Jember.<sup>64</sup>

JFC terbukti mampu mendatangkan pengunjung baik dari dalam maupun luar negeri melalui konsep kostum *trend fashion* dunia, dimana *catwalk* yang digunakan tercatat di MURI sebagai *catwalk* terpanjang, yaitu 3,6 kilometer. Menjelang diadakannya JFC, hotel dan penginapan di Jember dipenuhi oleh sekitar 300 media lokal dan internasional yang ingin meliput JFC. Akibat adanya JFC dari tahun 2005 sampai 2007 saja, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember yang berasal dari pajak pariwisata pun meningkat akibat adanya *event* JFC ini. Selain itu dampak adanya JFC terhadap rangking Kabupaten Jember sebagai kota tujuan wisata naik dari posisi 27 tahun 2005-2010 menjadi posisi ke 6 tahun 2011 (lihat tabel di bawah).

**Tabel 3.1: Dampak JFC terhadap Pariwisata Jember**

Tahun	Rangking Kabupaten Jember Sebagai Kota Tujuan Wisata di Jawa Timur	Rata-Rata Kunjungan Wisatawan Ke Jember Per Tahun
2005-2010	27	260.000
2011	6	550.000

Sumber: Pemerintah Kabupaten Jember, 2012

<sup>64</sup>Ana Milana, "Strategi Pengembangan Merek". *Jurnal Ekonomi Pemasaran*. Vol 3. Thn. 2010. 34-47

### 3.4. Bulan Berkunjung Ke Jember Wadah Promosi Pariwisata Kabupaten Jember

Pemasaran daerah bermakna merancang sebuah daerah sedemikian rupa sehingga daerah tersebut mampu memenuhi kebutuhan *target market*. Oleh karena itu, jika promosinya besar-besaran namun kenyataannya daerah tersebut justru mengecewakan *target market*, upaya pemasaran daerah tersebut gagal (*over promised under deliver*). Saat ini, dengan berbagai perubahan besar yang terjadi pada skala makro seperti globalisasi, regionalisasi, dan otonomi daerah, sebuah daerah tentu perlu mengadopsi cara pandang dan pendekatan baru. Hal ini ditujukan agar sebuah daerah mampu meningkatkan daya saing dan menarik minat *target market*, terutama tiga *target market* utamanya yaitu wisatawan, pebisnis, dan investor.<sup>65</sup>

Membangun keunggulan daya saing daerah merupakan sebuah upaya meningkatkan produktivitas yang pada gilirannya akan menaikkan kualitas dan standar hidup masyarakat dalam jangka panjang. Dasar pemikirannya adalah untuk menarik sumber daya terbaik dari dalam maupun luar daerah sebagai landasan untuk memacu produktivitasnya. Sebuah daerah akan lebih cepat dan lebih mudah "terekam" dalam benak pelanggannya jika daerah tersebut memiliki *positioning* yang kuat. *Positioning* yang sebenarnya merupakan janji kepada pelanggan inilah yang harus dibangun terlebih dahulu sebelum aktivitas pemasaran daerah lainnya dilakukan.<sup>66</sup>

Sementara dalam konteks komunikasi pemasaran, sebuah daerah berarti juga adalah sebuah "merk". Agar laku "dijual", sebuah merk harus memenuhi syarat. Jika merk sebuah daerah dipersepsikan "menguntungkan" di mata investor, maka para investor akan menginvestasikan modalnya di daerah tersebut. Namun sebaliknya jika para investor mempersepsikan merk sebuah daerah "kurang potensial", maka sulit bagi investor untuk menanamkan modalnya. Merk itulah

---

<sup>65</sup>Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 32.

<sup>66</sup>Ahmad Kuncoro, "Aktivitas Pemasaran Daerah yang Efektif". *Jurnal Ekonomi Pemasaran*. Vol 3. Th. 2007, hlm. 1-3.

yang kemudian harus dibentuk secara cermat dan kemudian dipasarkan secara baik.<sup>67</sup>

Harapan melakukan penciptaan merek (*branding*) dan komunikasi pemasaran daerah sangat jelas, yakni untuk membangun citra positif, meningkatkan PAD dan memberdayakan masyarakat lokal. Namun, fenomena yang terjadi masih banyak daerah yang belum menganggap bahwa penciptaan merek (*branding*) dan komunikasi pemasaran daerah sebagai hal yang sangat penting bagi daerah tersebut, sehingga wajar terjadi bahwa di banyak daerah PAD mereka kecil, masyarakat tidak diberdayakan, dan citra mereka buruk di mata investor dan wisatawan. Oleh karena itu perlu ada paradigma baru yang bisa dijadikan perekat untuk membangun. Pembangunan pariwisata dengan mengedepankan penciptaan merek merupakan bagian dari strategi untuk pemasaran pariwisata agar bisa dikenal oleh masyarakat luas, dan ha ini hanya kepala daerah yang memiliki visi kuat saja yang bersedia melakukannya.<sup>68</sup>

Salah satu cara ampuh dalam menyampaikan pesan sebuah *brand* adalah dengan mengajak *customer* dan *potential customer* untuk terlibat dalam sebuah *event* yang diselenggarakan perusahaan. *Event marketing* mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk menciptakan *brand awareness* kepada konsumen, sehingga dalam dirinya tumbuh fanatisme terhadap produk tertentu.<sup>69</sup> Pemasar dalam upaya memperkuat *brand awareness* suatu produk di mata konsumen dilakukan dengan mengadakan *event* tertentu dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, untuk menarik perhatian pasar.<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup>Bilson Simamora, *Aura Merek*, (Jakarta: PT. Gramedia PustakaUtama, 2003), hlm. 45.

<sup>68</sup>Andrian D Hagijanto, "Menciptakan Brand Awareness Iklan Media Massa Cetak". Skripsi tidak dipublikasikan, (Surabaya: Fakultas Seni dan Desain, Universitas Kristen Petra, 2001), hlm. 39.

<sup>69</sup>Muhammad Robby, "Manajemen Branding sebagai strategi Peningkatan Penjualan", *Jurnal Ekonomi Pemasaran*. Vol 3. Th. 2010, hlm. 5-7.

<sup>70</sup>Andrian D. Hagijanto, *op. cit.* hlm. 39.

Penciptaan merek untuk wilayah Kabupaten Jember sebagai daya tarik wisatawan dan para investor untuk menanamkan modalnya bagi pengembangan pariwisata. Oleh karena itu, Djalal mencetuskan sebuah program yang dijadikan ajang promosi potensi pariwisata Kabupaten Jember, yaitu Bulan Berkunjung Ke Jember (BBJ). Program ini pertama kali dilaksanakan pada 2007 yang bertujuan untuk menyambut hari kemerdekaan Indonesia.<sup>71</sup> Pada dasarnya program BBJ ini didorong oleh suksesnya acara JFC yang setiap tahun digelar pada bulan Januari untuk memperingati hari jadi Kota Jember dan mendapat respon serta dukungan positif dari masyarakat Jember. Pemerintah Daerah Jember melihat peluang dengan digelarnya acara JFC sebagai wadah untuk memperkenalkan daerah Jember dan mempromosikan potensi wisata Kabupaten Jember.<sup>72</sup>

Program BBJ merupakan sebuah rangkaian acara tahunan untuk memperingati hari jadi Kemerdekaan Indonesia ini digelar pada bulan Juni sampai bulan Agustus. Program BBJ merupakan sebuah etalase besar Kabupaten Jember untuk menunjukkan semua potensi wisata bagi para calon investor baik dari dalam maupun luar daerah. Potensi sumber daya alam yang berlimpah didukung kondisi masyarakat yang kondusif serta kemudahan birokrasi menjadikan suatu jaminan bagi para investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Jember.<sup>73</sup> *Event-event* yang digelar ini menampilkan berbagai acara, mulai dari lomba di bidang olah raga dan burung berkicau, pameran seni dan budaya, seminar nasional, sampai festival busana dan permainan rakyat. Acara program BBJ kemudian dimeriahkan dengan mendatangkan figur publik di bidang seni dari Jember, seperti Tattoo (group musik), Alm. Andy Liany (musisi), Dewi Persik (pesinetron dan penyanyi), George Rudy (aktor), Anang Hermansyah (musisi), Opick (musisi), Jack Lesmana (musisi), dan Sujiwo Tejo (budayawan); figur publik di

---

<sup>71</sup>Calista Wangsa, “Strategi Humas Pemerintahan Kabupaten Jember dalam Mengkomunikasikan Program Bulan Berkunjung Ke Jember”, S1 Skripsi tidak dipublikasikan, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2010), hlm. 28.

<sup>72</sup>*Ibid.* hlm. 36.

<sup>73</sup> Istiqlaliah, *op. cit.* hlm. 45.



bidang olah raga seperti Muljadi (Bulu Tangkis); dan tokoh-tokoh nasional lainnya seperti, Soetjipto Joedodihardjo (Kapolri Periode 09 Mei 1965 - 08 Mei 1968), Badrodin Haiti (Kapolda Jawa Timur dari 20 Agustus 2010 s.d. Maret 2011), dan David Wijnveldt (pemain sepak bola amatir Belanda).<sup>74</sup>

Program BBJ merupakan wadah bagi promosi berbagai macam potensi Jember di mata investor baik tingkat regional, nasional maupun internasional, agar tertarik untuk menanamkan modalnya (investasi) ke Jember yang dikemas dalam berbagai kegiatan mulai dari seni, olah raga, kuliner, wisata, religi bahkan kegiatan yang memecahkan Rekor Museum Republik Indonesia (MURI). Menurut Pemimpin Bank Indonesia Jember, A Rasyid Madjid, pelaksanaan BBJ membawa dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Jember, karena dengan BBJ masyarakat di luar daerah Jember, bisa melihat semua potensi yang dimiliki, mulai dari sektor pariwisata, kemudian olahraga sampai kesenian. Jember merupakan daerah yang berpotensi untuk ditanami modal, dan jika dibandingkan dengan daerah lain di kawasan tapal kuda, Jember jauh lebih berpotensi.<sup>75</sup> Senada dengan Rasyid, Kepala Kantor Pariwisata Jember, Arif Tjahjono menuturkan, *event* BBJ memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah, khususnya pendapatan dari sektor hunian hotel. Pelaksanaan BBJ tidak hanya ditujukan untuk orientasi ekonomi saja, tetapi juga dalam rangka memunculkan bibit baru dalam kegiatan olahraga yang digelar dalam BBJ, sehingga nantinya akan membawa nama Jember ke level nasional maupun internasional.<sup>76</sup>

Dampak perkembangan perekonomian daerah Jember yang didorong oleh pariwisata dan perhotelan, karena peserta dan pengunjung BBJ itu sendiri semakin menunjukkan kenaikan yang sangat drastis setiap tahunnya. Pusat-pusat

---

<sup>74</sup>“Tamu Istimewa di Karnaval Luar Biasa”, *Majalah Halo Jember*, 2011, hlm.7-11.

<sup>75</sup>“Tingkat Kunjungan ke Jember Meningkat”. *Radar Jember*, Sabtu, 5 Februari 2011.

<sup>76</sup>Siswoyo Hari Santoso, “Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pariwisata dan Ekonomi Kerakyatan, melalui Bulan Berkunjung ke Jember”, Pada Proceeding Seminar Nasional Green Pariwisata, Universitas Mataram Lombok, Nusa Tenggara Barat. 2013.

kuliner dan souvenir mengalami kenaikan omzet penjualannya ketika *event* BBJ berlangsung.<sup>77</sup> Hal ini ditunjukkan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 3.2: Pendapatan Pajak Pariwisata akibat adanya JFC**

Tahun	Jumlah
2005	Rp. 1.187.277.200
2006	Rp. 1.470.619.643
2007	Rp. 2.406.103.000

Sumber: Profil Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Energi Sumber Daya Mineral, *Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Jember Tahun 2012*

Tujuan dari BBJ ini adalah menggairahkan peran masyarakat dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia, meningkatkan minat dan kemampuan masyarakat untuk meraih prestasi, baik prestasi di bidang olahraga, seni dan sains serta meningkatkan taraf ekonomi masyarakat melalui kegiatan ekonomi kreatif yang tercipta selama BBJ berlangsung. Ada beberapa alasan yang mendorong BBJ menjadi daya tarik para wisatawan untuk mengunjunginya, *pertama* program ini dikemas dengan menggandeng berbagai pihak yang memiliki potensi untuk mendatangkan wisatawan, seperti menggandeng JFC yang namanya sudah mulai dikenal masyarakat luas,<sup>78</sup> *kedua* mengundang para artis atau tokoh dari Jember untuk pulang dan mengadakan kegiatan konser dan kegiatan pesta pernikahannya di Pusat Kota Jember,<sup>79</sup> *ketiga* membuat media promosi berupa majalah yang bisa dijadikan bahan rujukan bagi para wisatawan dengan kualitas gambar dan kertas yang lebih baik,<sup>80</sup> *keempat*

<sup>77</sup>Profil Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Energi Sumber Daya Mineral, *Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Jember Tahun 2012*, (Jember: Desperindag, 2012), hlm. 13.

<sup>78</sup>Calista Wangsa, *op. cit.* hlm. 33.

<sup>79</sup>“Tamu Istimewa di Karnaval Luar Biasa”, *Majalah Halo Jember*, 2011, hlm. 7-11.

<sup>80</sup>Majalah resmi pariwisata milik Kabupaten adalah *Majalah Halo Jember* yang dikelola oleh Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Jember. Majalh ini diterbitkan dengan

mempromosikan kegiatan BBJ ke kedubes di Jakarta,<sup>81</sup> dan *kelima* memberikan kemudahan akses perjalanan dengan membuka transportasi jalur udara, yaitu Bandara Notohadinegoro yang beroperasi pada 2008.<sup>82</sup> Beberapa alasan tersebut pemerintah daerah Jember membuat *event marketing* Pagelaran Budaya dan Seni BBJ mampu meningkatkan *Brand Awareness* Kabupaten Jember. Program BBJ kemudian dibuat sesuai dengan jadwal acara yang digelar, (acara BBJ periode 2007-2009 dapat dilihat pada lampiran).

Memasuki tahun 2010 program BBJ mengalami kevakuman selama dua tahun dari 2010 – 2011. Tidak diketahui secara jelas mengapa pemerintah Kabupaten Jember tidak mengadakan BBJ selama dua periode tersebut, tetapi yang jelas program wisata yang berjalan hanya JFC yang memang setiap tahun diadakan di alun-alun Kota Jember, yaitu JFC IX dan JFC X. Tahun 2012 pemerintah daerah Jember mengadakan kembali program BBJ dengan lebih besar dan acara yang disajikan lebih banyak ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Tabel 3.6 menerangkan acara-acara yang disajikan dalam program BBJ ke-4.

Program BBJ diakui sebagai daya tarik luar biasa untuk menarik masuknya wisatawan ke Jember. Kehadiran para turis akan semakin bagus jika tidak hanya datang untuk BBJ. Pihak Kantor Pariwisata Jember, Arif Tjahyono, tengah menyiapkan berbagai hal untuk merumuskan promosi yang ideal agar bisa menjual potensi wisata di wilayahnya. Berbagai brosur dan majalah yang menceritakan keindahan obyek wisata Kabupaten Jember telah disebar di berbagai daerah. Manuver promotif yang dilakukannya bisa memperkenalkan Jember dengan lebih menyeluruh terhadap masyarakat luas, sehingga ketika kehadiran

---

edisi lux dengan kualitas gambar foto lebih bagus. Hendra Matbean Bhakti “Opini Pembaca Majalah Halo Jember Sebagai Media Komunikasi Pariwisata Kabupaten Jember”, *Jurnal Pariwisata Universitas Muhammadiyah* Vol. 3 No. 1 April 2009.

<sup>81</sup>“Bulan Berkunjung Ke Jember Ke 3 Mendunia”, *Jember Prioritas*, 22 Mei 2009.

<sup>82</sup>“Di Bandara Notohadinegoro Jember, Bakal Ada Penerbangan”, *Jember Prioritas* 12 Agustus 2008.

wisatawan ke Jember sudah memiliki gambaran terhadap obyek yang akan dikunjunginya.

Langkah-langkah kongkrit yang mengarah pada teknis perbaikan kualitas obyek wisata, Kantor Pariwisata selalu melakukan komunikasi dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (Dispenda). Ada pembagian pekerjaan dalam mengelola obyek wisata Jember. Dispenda sebagai lembaga yang menangani langsung, sedangkan Kantor Pariwisata sebagai lembaga yang memasarkannya.

### **3.5. Dampak Industri Pariwisata Kabupaten Jember**

Para ahli ekonomi menilai, pariwisata mempunyai andil besar dalam mempengaruhi laju perekonomian masyarakat. Ada beberapa dampak yang dapat ditunjukkan berkaitan dengan perkembangan pariwisata, yaitu dampak terhadap penerimaan devisa, terhadap pendapatan masyarakat, terhadap kesempatan kerja, terhadap harga-harga, terhadap distribusi masyarakat atau keuntungan, terhadap kepemilikan dan kontrol, terhadap pembangunan pada umumnya dan terhadap pendapatan pemerintah. Majunya industri pariwisata suatu daerah sangat bergantung kepada jumlah wisatawan yang datang, karena itu harus ditunjang dengan peningkatan pemanfaatan daerah tujuan wisata, sehingga industri pariwisata akan berkembang dengan baik. Kabupaten Jember merupakan daerah yang giat mengembangkan potensi wilayahnya untuk tujuan wisata dan menarik minat wisatawan untuk berkunjung.

Obyek wisata yang dikembangkan berupa obyek wisata budaya dan obyek wisata alam. Sebagian besar obyek wisata yang berada di Kabupaten Jember adalah obyek wisata alam, baik obyek wisata darat (agrowisata) maupun wisata bahari maupun pantai, sedang obyek wisata pantai dan budaya (seni-seni tradisional) relatif belum banyak dikembangkan dan belum ditangani secara optimal, misalnya pantai payangan dan seni can macanan kadduk. Penjelasan di atas menggambarkan bahwa Kabupaten Jember dalam mengelola pariwisata lebih banyak terpusat di wilayah kota, sedangkan untuk daerah-daerah wisata di pinggiran kurang mendapat perhatian secara maksimal. Hal ini ditunjukkan



dengan jadwal acara pada program BBJ yang seringkali diadakan di pusat kota Jember daripada di daerah-daerah wisata yang ada di pinggiran.

Pengelolaan wisata yang lebih banyak terpusat di daerah perkotaan mendorong terjadinya perbedaan antara wisata daerah kota dengan wisata daerah pinggiran yang kemudian berdampak pada perekonomian masyarakat sekitar wisata. Wisata daerah perkotaan Jember menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pesatnya perkembangan pariwisata di daerah perkotaan ini ditunjang oleh keberadaan BBJ yang menggandeng JFC sebagai media promosi potensi wisata Kabupaten Jember. Dampak yang paling dirasakan dengan perkembangan pariwisata adalah perkotaan adalah peningkatan PAD, sedangkan untuk daerah-daerah pinggiran perkembangan wisata belum memperlihatkan kenaikan yang signifikan. Meskipun begitu, keberadaan wisata di daerah pinggiran memberikan peluang usaha bagi masyarakat di daerah sekitar wisata di luar sektor pertanian atau nelayan, sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran.

### **3.5.1 Bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember**

Perkembangan perekonomian di Kabupaten Jember dapat dilihat pada indikator besaran *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB). Kontribusi terbesar dalam membentuk PDRB Kabupaten Jember pada tahun 2009-2010 adalah sektor pertanian, yang secara meyakinkan menyumbang berturut-turut 43,7% dan 41,4% dari total PDRB. Keberhasilan sektor ini tidak terlepas dari potensi alam dan lahan yang subur yang telah menjadikan Jember sebagai lumbung padi di Jawa Timur.<sup>83</sup>

Sektor yang menjadi penyumbang tertinggi terhadap PDRB setelah sektor pertanian adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa. Besarnya kontribusi dari sektor ini didukung oleh peran dan fungsi Kota Jember sebagai pusat kegiatan wilayah yang melayani Kabupaten Jember, Bondowoso dan Situbondo. Kondisi sosial yang mulai berubah sejak adanya

---

<sup>83</sup>Profil Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Energi Sumber Daya Mineral, *op.cit.* hlm. 15.

program BBJ, Jember menjadi salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur, sehingga pertumbuhan ekonomi secara umum di Kabupaten Jember mengalami kenaikan terus pada kisaran 6,04%. Kenaikan yang signifikan ini dihasilkan oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran (9,48%) diikuti sektor bangunan (8,91%) dan sektor industri pengolahan (8,37%).<sup>84</sup> Lebih lengkapnya kenaikan perekonomian Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.3: PAD Dan Pendapatan Industri Pariwisata Kabupaten Jember Tahun 2003 – 2014**

Tahun	PAD	Sektor Pariwisata	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Hiburan
2003	37.592	1.416	-	-	-
2004	40.910	1.351	-	-	-
2005	51.473	1.638	-	-	-
2006	68.448	1.740	-	-	-
2007	78.000	-	-	-	-
2008	136.471	-	240	4.750	2.050
2009	135.022	4.119	-	-	-
2010	150.936	2.834	1100	1.946	785
2011	182.494	3.290	1100	2.658	4.450
2012	255.805	2.394	1300	3.500	4.500
2013	-	2.712	1400	4.000	3.800
2014	-	-	-	-	-

Sumber: Profil Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Energi Sumber Daya Mineral, *Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Jember Tahun 2014*

Pada 2008, sub sektor perhotelan tumbuh sebesar 7,24 %. Hal ini akibat pengaruh kunjungan wisatawan yang mengalami peningkatan sebesar 534.955 orang. Beberapa hotel berbintang pun mulai dibuka di Jember, seperti Aston Jember Hotel & Conference Center, Royal Hotel N' Lounge, Istana Hotel dan Restaurant, Hotel Bintang Mulia, Hotel Bandung Permai, Hotel Panorama, dan beberapa hotel lainnya. Kondisi ini menggambarkan terbangunnya kepercayaan dan minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Jember.

<sup>84</sup>*Ibid.* hlm. 21.

Perekonomian Jember diprediksi akan tumbuh lebih pesat dengan beroperasinya Bandara Notohadinegoro. Apalagi maskapai Garuda sudah melakukan uji coba dan sudah bersiap membuka rute penerbangan Surabaya-Jember sebelum pertengahan 2014.<sup>85</sup>

Upaya melakukan penyempurnaan pada berbagai obyek pariwisata yang tersebar di Kabupaten Jember terus dilakukan. Perbaikan menjadi faktor penting, karena jumlah kunjungan ke Jember oleh para wisatawan domestik maupun asing sudah menunjukkan peningkatan. Pengalaman melaksanakan Program Bulan Berkunjung ke Jember (BBJ) sejak tahun 2006 lalu, Jember menjadi semakin dikenal oleh kalangan luar. Menurut Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) sampai tahun 2014 jumlah hunian masing-masing hotel di Jember selalu terjadi kenaikan prosentase hingga 15 sampai 20 persen tiap tahun.<sup>86</sup>

Kunjungan wisatawan semakin banyak ketika BBJ berlangsung. Berbagai event kegiatan yang dilaksanakan ternyata menjadi daya tarik luar biasa bagi wisatawan luar untuk masuk dan berwisata ke Jember. Ketika BBJ berlangsung, jumlah kunjungan semakin banyak. Terbukti hotel-hotel di Jember tingkat hunian mencapai 85 sampai 90 persen selama event BBJ digelar. Ketertarikan publik luar terhadap Jember harus diimbangi dengan perbaikan dan management yang lebih bagus terhadap seluruh obyek pariwisata, sehingga kehadiran mereka menjadi maksimal dan tidak hanya tertumpu pada satu obyek.

Tahun 2008, PAD Kabupaten Jember dari sektor pariwisata hanya menyumbangkan Rp 2,5 miliar, namun pada tahun 2014 sumbangan dari sektor pariwisata mampu menembus angka Rp 12 miliar, dan dari jumlah total ini Rp 1,2 miliar dihasilkan dari restoran atau wisata kuliner. Faktor yang sangat menunjang bagi PAD adalah karnaval dimana APBD Jember tahun 2014 mencapai Rp 3

---

<sup>85</sup>“Menunggu Dibukanya Bandara Notohadinegoro”, *Majalah Jember Kita*, Oktober 2013, hlm. 10-14.

<sup>86</sup>“Tingkatkan Kunjungan Wisata, Genjot Pendapatan Daerah”, *Koran Sindo*, 18 Januari 2015.

triliun.<sup>87</sup> Pencapaian APBD ini dipengaruhi oleh keberadaan hotel-hotel yang menyediakan fasilitas penginapan bagi wisatawan. Berdasarkan laporan PHRI saat ini (2013) Jember sudah memiliki hotel berbintang tiga dengan jumlah kamar sekitar 1.800 kamar. Semakin banyaknya tamu mendesak pengelola hotel untuk menambah jumlah kamar atau mendorong pertumbuhan hotel baru. Palsanya, Tahun 2013 saja sebanyak 2.159 media dan fotografer dunia hadir di Jember. Tahun 2014, sudah 3.073 media dan fotografer yang mendaftar untuk hadir.<sup>88</sup>

**Tabel 3.4: Realisasi PAD Kabupaten Jember dari Industri Pariwisata 2003-2014 (Dalam Juta Rupiah)**

Tahun	Hasil Industri Pariwisata
2003	1,416
2004	1,351
2005	1,638
2006	1,740
2007	-
2008	7,040
2009	4,119
2010	6,665
2011	11,498
2012	11,694
2013	11,912
2014	-

Sumber: Profil Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Energi Sumber Daya Mineral, *Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Jember Tahun 2014*

Pada Februari 2014 Kabupaten Jember mengalami inflasi sebesar 0,05 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,70. Dari delapan

<sup>87</sup>Profil Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Energi Sumber Daya Mineral, *op.cit.* hlm. 7.

<sup>88</sup>*Ibid.* hlm. 13.



kabupaten/kota IHK di Jawa Timur, tercatat semua kabupaten/kota di Jawa Timur mengalami inflasi. Tingkat inflasi tahun ke tahun (Februari 2014 terhadap Februari 2013) Jember sebesar 7,08 persen. Laju inflasi tahun kalender (Desember 2013 – Februari 2014) Kabupaten Jember sebesar 1,28 persen.

Pesatnya perkembangan pariwisata dengan keberadaan BBJ juga menjadi faktor pendorong bagi pertumbuhan pembangunan, yang digalakkan. Hal ini mencerminkan terciptanya kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di wilayah ini. Menurut laporan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember sampai tahun 2014 terdapat beberapa investor besar yang menanamkan modalnya ke Jember, antara lain PT Sanyo Sales, PT Indosat Tbk, PT Semen Puger Jaya Raya Sentosa, PT G'seeds, PT Indonesia Indah Tobacco Citra Niaga, PT Carrefour, dan PT Giant Express. Total jumlah investasi yang ditanam sebesar Rp 217,336 miliar, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.523 orang. Berbagai kegiatan bertaraf nasional dan internasional beberapa kali digelar di Jember, antara lain Bulan Berkunjung ke Jember, Jember Fashion Carnival, Tajemtra, Adventure Trail, Jember City Carnival, Jember Marching Band, dan kegiatan lainnya yang mendorong para investor menanamkan modalnya.<sup>89</sup>

### **3.5.2 Bagi Perekonomian Penduduk Setempat**

Sebuah kawasan potensi wisata yang meskipun terdapat di tempat terpencil atau jauh dari pusat keramaian, ketika dikembangkan menjadi industri pariwisata, maka akan sangat mempengaruhi masyarakat setempat dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Perkembangan industri pariwisata yang terangkat melalui program BBJ dengan menggandeng JFC memberikan dampak yang luas bagi masyarakat. Seperti yang sudah digambarkan pada bab sebelumnya bahwa daerah Jember memiliki potensi kekayaan alam berupa tempat-tempat wisata yang menarik wisatawan untuk mengunjunginya. Salah satu daya tarik wisata di Kabupaten Jember adalah keberadaan pantainya yang membentang dari barat ke

---

<sup>89</sup>*Ibid.* hlm. 14.

timur. Daerah pantai merupakan tujuan wisata yang paling digemari wisatawan pada umumnya. Faktor pendorong yang menjadikan daerah pantai sebagai obyek wisata antara lain keindahan pemandangan alam, biaya yang terjangkau, suasana yang aman dan nyaman untuk bersantai atau bermain air, menikmati masakan dan minuman khas daerah wisata, dan daya tarik kebudayaan masyarakat setempat.

Pembangunan pariwisata di daerah pesisir akan mendorong pembangunan-pembangunan sarana perekonomian lainnya seperti akses jalan, pertokoan, fasilitas rekreasi dan hiburan, dan usaha jasa yang dibutuhkan wisatawan seperti jasa transportasi perjalanan, jasa pemandu wisata, dan lain-lain. Dampak perkembangan pariwisata Kabupaten Jember bagi daerah pinggiran yang nyata adalah peluang usaha bagi masyarakat daerah pesisir selain pekerjaan di sektor perikanan. Masyarakat pesisir berbeda dari masyarakat lain seperti masyarakat petani atau masyarakat perkotaan. Masyarakat pesisir, terutama nelayan, memiliki ketergantungan terhadap sumber daya alam berupa perikanan dan kelautan. Mereka mempunyai strategi bertahan hidup yang melahirkan pola-pola kebudayaan dan menjadi karakteristik yang berbeda dari pola kebudayaan masyarakat lain. Dari pola kebudayaan itu terbentuk struktur sosial dan pranata sosial budaya. Dua pranata strategis yang dianggap penting untuk memahami kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan adalah pranata penangkapan dan pranata pemasaran ikan. Kedua pranata ini menjadi sumber potensial timbulnya kemiskinan struktural pada masyarakat nelayan. Kedua pranata sosial ekonomi tersebut membentuk persepsi ketidakberdayaan terhadap sistem stratifikasi pekerjaan nelayan antara pemilik perahu, pengepul atau pedagang ikan, dan nelayan buruh.<sup>90</sup> Struktur sosial budaya yang tercemrin dalam kedua pranata tersebut memiliki kontribusi besar dalam membentuk corak pelapisan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Mereka yang menempati lapisan sosial ekonomi atas adalah para pemilik perahu dan pengepul ikan yang sukses, pada lapisan sosial ekonomi tengah ditempati juragan atau pemimpin nelayan, sedangkan nelayan

---

<sup>90</sup>Kusnadi, *Akar Kemiskinan Nelayan*, (Yogyakarta: LkiS, 2003), hlm. 54.

buruh terdapat pada lapisan sosial ekonomi bawah. Dalam struktur sosial dan pranata sosial demikian, masyarakat pesisir sulit terjadi mobilitas sosial vertikal

Guna mengatasi kemiskinan struktural akibat struktur sosial dan pranata sosial inilah dibutuhkan peran perempuan. Dukungan istri nelayan dalam membantu tanggung jawab sosial ekonomi keluarga terdapat dalam diversifikasi pekerjaan di darat.<sup>91</sup> Dengan diversifikasi pekerjaan di darat, nelayan tidak lagi bergantung sepenuhnya dari sumber daya alam perikanan dan kelautan. Dari sisi tanggung jawab sosial ekonomi keluarga pada masyarakat nelayan, suami dan istri nelayan berposisi sejajar dan saling melengkapi. Kaum perempuan dan pranata-pranata sosial budaya yang ada merupakan potensi pembangunan masyarakat pesisir yang bisa diberdayakan untuk mengatasi kemiskinan. Dalam ketergantungan terhadap kegiatan penangkapan ikan perlu disediakan kesempatan usaha/pekerjaan lain diluar sektor perikanan agar meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi tekanan-tekanan ekonomi.

Dalam masyarakat pesisir yang terdapat pembangunan industri pariwisata menimbulkan kemiskinan sekaligus kesenjangan. Di sekitar daerah wisata di tepi pantai dibangun resort, vila dan akomodasi pariwisata lainnya. Masyarakat pesisir selama ini cenderung hanya menjadi obyek. Buktinya, di tengah pembangunan pariwisata yang pesat, mereka masih terhimpit dalam kemiskinan. Masyarakat pesisir belum maksimal merasakan dampak ekonomis kehadiran pariwisata. Sementara bagi kalangan pengembang (*developer*) dan pengusaha, pantai merupakan tempat yang strategis untuk membangun hotel dengan potensi suasana dan pemandangan yang indah. Permasalahan ini terjadi ketika kepentingan masyarakat pesisir kerap diabaikan. Kegiatan pariwisata di wilayah pesisir lebih menyentuh para pemilik modal besar saja, sedangkan masyarakat pesisir hanya menjadi penonton. Banyak program pemberdayaan masyarakat namun dalam praktiknya justru kebanyakan masyarakat diperdayai hanya untuk kepentingan pihak tertentu. Bentuk kekuasaan yang dimiliki pihak pengusaha bisa berdampak

---

<sup>91</sup>Kusnadi, *Perempuan Pesisir*, (Yogyakarta: LkiS, 2006), hlm. 23.

negatif pada usaha-usaha ekonomi kecil yang ada di sekitar industri pariwisata, seperti pedagang kecil disekitar pantai.<sup>92</sup>

Faktor sosial budaya tersebut yang perlu diperhatikan dalam upaya pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir. Kebijakan pembangunan dan program pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pesisir harus beradaptasi pada perilaku sosial budaya masyarakat setempat serta mendorong masyarakat untuk aktif sebagai subyek atau pelaku utama secara mandiri mampu mengatasi persoalan kehidupan sosial ekonomi yang dihadapi. Banyak desa-desa yang berada di wilayah pesisir dan wilayah dataran tinggi mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata. Pengembangan desa wisata mampu mendukung upaya penanggulangan kemiskinan di pedesaan dengan jalan memberdayakan masyarakat lokal dalam membangun kepariwisataan di desanya. Salah satu upaya mengembangkan desa wisata dilakukan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri bidang Pariwisata yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2007.<sup>93</sup>

Pengertian Desa Wisata Desa Wisata adalah desa: (1) yang memiliki potensi keunikan dan daya tarik wisata yang khas, baik berupa karakter fisik lingkungan alam pedesaan maupun kehidupan sosial budaya kemasyarakatan; (2) yang dikelola dan dikemas secara menarik dan alami dengan pengembangan fasilitas pendukung wisatanya, dalam suatu tata lingkungan yang harmonis dan pengelolaan yang baik dan terencana sehingga siap untuk menerima dan menggerakkan kunjungan wisatawan ke desa tersebut; (3) serta mampu menggerakkan aktifitas ekonomi pariwisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Kriteria Desa Wisata: (1) memiliki potensi keunikan dan daya tarik wisata yang khas (sebagai atraksi wisata), baik berupa karakter fisik lingkungan alam pedesaan maupun kehidupan

---

<sup>92</sup>Erwan Baharudin, "Kearifan Lokal, Pengetahuan Lokal dan Degradasi Lingkungan", *Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia* Vol. 4 No.1 Tahun. 2013.

<sup>93</sup>Y. Setyo Pramono, "Pengembangan Kampung Wisata Nelayan Puger Kabupaten Jember", Makalah Seminar Nasional Teknologi Ramah Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan FTSP-ITN Malang, 15 Juli 2010, hlm. 2



sosial budaya kemasyarakatan; (2) memiliki dukungan dan kesiapan fasilitas pendukung kepariwisataan terkait dengan kegiatan wisata pedesaan, yang antara lain dapat berupa : akomodasi/penginapan, ruang interaksi masyarakat dengan wisatawan/tamu, atau fasilitas pendukung lainnya; (3) memiliki interaksi dengan pasar (wisatawan) yang tercermin dari kunjungan wisatawan ke lokasi desa tersebut; (4) adanya dukungan, inisiatif dan partisipasi masyarakat setempat terhadap pengembangan desa tersebut terkait dengan kegiatan kepariwisataan (sebagai desa wisata).<sup>94</sup>

Pengelolaan Pesisir Berbasis Masyarakat (PPBM) kini merupakan kecenderungan baru yang banyak dibicarakan orang. Dalam PPBM ini peran masyarakat menjadi kunci utama, di mana masyarakat lokal diberikan kesempatan dan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan terhadap sumber daya yang dimilikinya. Selain itu, masyarakat sendiri juga menentukan berbagai kebutuhan, tujuan dan aspirasinya serta membuat keputusan demi kesejahteraan mereka. Dalam konteks ini pengelolaan pesisir berbasis masyarakat mestinya menyertakan masyarakat setempat. Oleh karena itu, dalam pemberdayaan masyarakat pesisir yang memegang peranan utama adalah masyarakat pesisir itu sendiri, sedangkan pendampingnya hanya mendampingi, memotivasi dan mengarahkan serta memfasilitasi.<sup>95</sup>

Pemberdayaan masyarakat pesisir memiliki hubungan dimensi interaksi yang erat dan penting dengan industri pariwisata setempat. Dapat diasumsikan pemberdayaan masyarakat pesisir di suatu wilayah berhasil dilakukan dengan kegiatan pariwisata yang berlangsung di wilayah pesisir tersebut serta akan lebih terjamin kuantitas, kualitas dan kontinuitasnya. Hal ini dapat terjadi karena kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di wilayah pesisir merupakan salah satu bagian, baik langsung maupun tak langsung, terkait dengan kegiatan pariwisata yang dilakukan di wilayah pesisir. Sebagai salah satu contoh kegiatan yaitu memotivasi masyarakat pesisir untuk membudidayakan terumbu karang, di

---

<sup>94</sup>*Ibid.* hlm. 3.

<sup>95</sup>*Ibid.* hlm. 4.

mana pihak pendamping pemberdayaan masyarakat ini bertugas memberikan teknologinya dan memberikan percontohan uji cobanya dengan melibatkan langsung masyarakat pesisir. Melalui pembudidayaan terumbu karang maka kelak kalau berhasil akan dapat menambah diversifikasi mata pencaharian masyarakat tersebut. Kegiatan budi daya terumbu karang ini sebagai sarana rehabilitasi lingkungan dan mengurangi abrasi pantai, juga memberi dampak yang besar bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup>Ikwan Setiawan, “Kritik dan Gagasan untuk Pengembangan Pariwisata Warisan Budaya Jember”, Disampaikan dalam Seminar bertajuk *Mewujudkan Potensi Sejarah, Budaya, dan Purbakala sebagai Aset Pariwisata Kabupaten Jember*, yang diselenggarakan atas kerjasama Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember bekerjasama dengan Kantor Pariwisata dan Budaya Kabupaten Jember, Aula Fakultas Sastra, 21 September 2011.

## **BAB 4**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan dalam bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan pariwisata Kabupaten Jember mulai berkembang ketika MZA. Djalal menjabat sebagai bupati selama dua periode yaitu 2005-2010 dan 2010-2015. Ketertarikan pemerintah daerah untuk lebih serius dalam mengelola pariwisata, karena sektor pariwisata memberikan sumbangan besar bagi Pendapatan Asli Daerah. Hal ini yang mendorong pemerintah Kabupaten Jember lebih serius dalam mengelola pariwisata.

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Jember dalam mengelola pariwisata, di antaranya adalah membuat kebijakan yang menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan kegiatan pariwisata, mendirikan Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember beserta formatur organisasi, merenovasi alun-alun sebagai simbol identitas Kota Jember, pelebaran jalan administrasi di Kota Jember dan memperbaiki jalan-jalan yang menuju area wisata di daerah pantai, serta membuka dan mengoperasikan bandara udara Notohadinagara untuk mempermudah akses kedatangan wisatawan ke Jember.

Pembenahan infrastruktur ini diiringi dengan strategi pemerintah daerah dalam memasarkan potensi wisata. Melalui program Bulan Berkunjung Ke Jember (BBJ) pemerintah daerah mempromosikan tempat-tempat wisata yang dimiliki Kabupaten Jember. Program BBJ mulai digarap dan dilaksanakan pada 2007 yang berisi rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan

Bangsa Indonesia menjadi sarana promosi wisata Kabupaten Jember dengan memperkenalkan potensi-potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Jember.

Perkembangan pariwisata Kabupaten Jember mulai dikenal dan dilirik wisatawan dengan keberadaan festival karnaval busana yang digagas oleh Dynan Faris. Jember Fashion Carnival atau masyarakat luas lebih mengenal dengan JFC adalah peragaan busana dengan mengambil model busana dunia. Kreativitas seniman lokal dalam mengemas pameran busana dengan model karnaval sepanjang 3,6 Km ini mengangkat pariwisata Kabupaten Jember di mata masyarakat luas. Melalui program BBJ yang dikemas dalam berbagai kegiatan mulai dari seni, olah raga, kuliner, wisata, religi bahkan kegiatan yang memecahkan Rekor Museum Republik Indonesia (MURI) dan diagendakan berlangsung sekitar bulan Agustus setiap tahunnya membawa pengaruh bagi PAD dan para investor.

Hal ini dibuktikan dengan peningkatan PAD Kabupaten Jember. Tahun 2008, PAD Kabupaten Jember dari sektor pariwisata hanya menyumbangkan Rp 2,5 Miliar, namun pada tahun 2014 sumbangan dari sektor pariwisata mampu menembus angka Rp 12 Miliar, dan dari jumlah total ini Rp 1,2 miliar dihasilkan dari restoran atau wisata kuliner. Faktor yang sangat menunjang bagi PAD adalah karnaval dimana APBD Jember tahun 2014 mencapai Rp 3 triliun. Kunjungan wisatawan yang mengalami peningkatan sebesar 534.955 orang, mempengaruhi pertumbuhan perhotelan di Kabupaten Jember sebesar 7,24 %. Beberapa hotel berbintang pun mulai dibuka di Jember, seperti Aston Jember Hotel & Conference Center, Royal Hotel N' Lounge, Istana Hotel dan Restaurant, Hotel Bintang Mulia, Hotel Bandung Permai, Hotel Panorama, dan beberapa hotel lainnya. Pertumbuhan perhotelan secara tidak langsung menunjukkan terbangunnya kepercayaan para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Jember. Beberapa investor besar yang menanamkan modalnya ke Jember, antara lain PT Sanyo Sales, PT Indosat Tbk, PT Semen Puger Jaya Raya Sentosa, PT G'seeds, PT Indonesia Indah Tobacco Citra Niaga, PT Carrefour, dan PT Giant Express. Total jumlah investasi yang ditanam sebesar Rp 217,336 miliar, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.523 orang.



Adanya pembangunan pariwisata di Kabupaten Jember sejak MZA DJalal menjabat sebagai bupati memberikan pengaruh bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat, terutama di masyarakat di sekitar tempat wisata itu berdiri. Hal ini diubktikan dengan pembangunan pariwisata di daerah pesisir, seperti pantai Papuma dan Watu Ulo di Ambulu mendorong pembangunan-pembangunan sarana perekonomian lainnya seperti akses jalan, pertokoan, fasilitas rekreasi dan hiburan, dan usaha jasa yang dibutuhkan wisatawan seperti jasa transportasi perjalanan, jasa pemandu wisata, dan lain-lain. Peluang usaha dari pembangunan pariwisata di daerah pesisir sangat berpengaruh bagi masyarakat sekitar sebagai peluang usaha selain pekerjaan di sektor perikanan. Dengan demikian dampak adanya pembangunan pariwisata sangat dirasakan oleh masyarakat sebagai bentuk peluang usaha di luar sektor perikanan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

- Addas, Michael, *Ratu Adil; Tokoh dan Gerakan Millenarian Menentang Kolonialisme Eropa*, Jakarta: Rajawali Press, 1988
- Antlov, Hans, *Negara Dalam Desa; Patronase Kepemimpinan Lokal*, Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2002.
- Arsyad, Lincolin, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Yogyakarta: BPFE, 1990.
- Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember “Direktori Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Jember 2008-2028”, Jember: Bappeda, 2008.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember Tahun 2013*, Jember: BPS, 2013.
- Bahriadi, Dianto, *Status Perkebunan di Indonesia Kontemporer dalam Reformasi Agraria*, Jakarta: LPFE UI, 1997.
- Balai Taman Nasional Meru Betiri, *Kawasan Konservasi Meru Betiri*, Jember: Balai Taman Nasional Meru Betiri, 2014.
- Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, (Bandung: Alfabeta, 2009.
- Chalid, Pheni, *Otonomi Daerah; Masalah, Pemberdayaan, Dan Konflik*, Jakarta: Kemitraan, 2005.
- Elson. R.E., “Kemiskinan dan Kemakmuran Kaum Petani pada Masa Sistem Tanam Paksa di Pulau Jawa”, dalam Anne Booth (ed.), *Sejarah Ekonomi Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1988.
- Enoh, Moch, *Geografi Pariwisata*, Surabaya: Unesa University Press, 1996
- Geldern, Robert Heine, *Konsepsi Tentang Negara & Kedudukan Raja Di Asia Tenggara*, terjemahan Deliar Noer, Jakarta: CV. Rajawali, 1972.
- Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1982.

- Herusatoto, Budiono *Simbolisme dalam Budaya Jawa*, Yogyakarta: PT. Hanindita, 1984.
- Hoogvelt, Anhie MM, *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang*, Jakarta: CV Rajawali, 2003.
- Istiqomah, Liliek, *Hak Gadai atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional*, Surabaya: CV. Usaha, 1982.
- Jember Dalam Angka Tahun 2014, Jember: BPS, 2014.
- Kahin, George McTurnan, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia; Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik*, terj. Jakarta: kerjasama Pustaka Sinar Harapan dan Sebelas Maret University Press, 1995.
- Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, *Profil Pariwisata Kabupaten Jember*, Jember: Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, 2005
- Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, *Deskripsi dan Inventarisasi Cagar Budaya Kabupaten Jember Tahun 2014*, Jember: Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, 2014.
- Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, *Mapping Pengembangan Obyek Wisata Kawasan Selatan Kabupaten Jember*, Jember: Pemerintah Kabupaten Jember, 2014
- Kartodirdjo, Sartono, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993
- Kartasapoetra, G. *Kamus Sosiologi dan Kependudukan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Keban, Y.T., *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*, Yogyakarta: Gava Media, 2004.
- Kodhyat, H. *Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 1996.
- Kusnadi, *Akar Kemiskinan Nelayan*, Yogyakarta: LkiS, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Perempuan Pesisir*, Yogyakarta: LkiS, 2006.
- Linblad, Thomas, *Fondasi Histori Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Kerjasama Pusat Studi-Sosial Asia Tenggara Universitas Gajah Mada dan Pustaka Pelajar, 2002.

- Lembaga Administrasi Negara, *Akuntabilitas dan Good Governace*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 1992.
- Masri, Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1983.
- Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial; Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012
- Nugroho, Riant, *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*, Jakarta: Elek Media Komputindo, 2006.
- Nurcholis, Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan Otonomi daerah*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.
- J. Paulus. *Encyclopedie van Nederland Indie*, Leiden: Twee Druk, Martinus Nijhoff, S'Gravenhage, NV v/h E.J. Brill, 1917
- Pemerintah Kabupaten, *Draft Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2010-2015*, Jember: Pemerintah Kabupaten, 2010.
- Pemerintah Kabupaten Jember, *APBD Kabupaten Jember 2006-2010*, (Jember: Pemda, 2010.
- Pitana, I Gde, dan Putu G Gayatri, *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2005.
- Prawiroatmodjo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985.
- Profil Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Energi Sumber Daya Mineral, *Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Jember Tahun 2012*, Jember: Desperindag, 2012
- Profil Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jember, *Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Jember Tahun 2014*, Jember: Disperindag, 2014.
- Profil Kabupaten Jember 2014, Jember: Sekretariat Humas Kabupaten Jember, 2014.
- Sajogyo, Pudjawati, *Sosiologi Pembangunan*, Jakarta: Etasa Dinamika, 1985.
- Schoorl, J.W., *Modernisasi: Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang*, Jakarta: PT. Gramedia, 1980.



- Simamora, Bilson, *Aura Merek*, Jakarta: PT. Gramedia PustakaUtama, 2003.
- Soetomo, *Masalah Sosial dan Pembangunan*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.
- Tim Penyusun, *Wakil Rakyat Kabupaten Jember Tempo Doeloe & Sekarang*, Jember: Sekretariat DPRD Jember, 2007.
- Undang Undang RI No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian, Bandung: Citra Umbara, 1985.
- Undang-Undang RI No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- van Niel, Robert, “Warisan Sistem Tanam Paksa Bagi Perkembangan Ekonomi Berikutnya”, dalam Anne Booth (ed.), *Sejarah Ekonmi Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1988
- Wahab, Salah, *Manajemen Kepariwisataaan*, Terjemahan Frans Gromang, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1976.
- Widodo, Joko, *Good Governance: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Surabaya, Insan Cendekia, 2004.
- Yuswadi, Hary, “Budaya Pandalungan: Bentuk Multikulturalitas dan Hibridisasi Budaya Antaretnik”, dalam Ayu Sutarto & Setya Yuwana Sudikan (ed). *Pemetaan Kebudayaan di Provinsi Jawa Timur: Sebuah Upaya Pencarian Nilai-nilai Positif*, Surabaya: Biro Mental Spiritual Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Komyawisda Jatim, 2008.

### Tesis

- Arifin, Edy Burhan, *Emas Hijau di Jember: Asal-Usul dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat 1860-1880*, Tesis tidakdipublikasikan, Yogyakarta: UGM, 1990.
- Cahyani, Istiqlaliah Dian, “Implementasi Jember Fashion Carnival Sebagai Bagian Dari City Branding Kabupaten Jember”, skripsi tidak dipublikasikan, Jember: Universitas Jember, 2008.
- Desy, “Perlawanan Petani Ketajek Terhadap Perusahaan Daerah Perkebunan Jember Tahun 1974-2002”, skripsi tidak dipublikasikan, Jember: Universitas Jember, 2005.

- Hagijanto, Andrian D., "*Menciptakan Brand Awareness Iklan Media Massa Cetak*". Skripsi tidak dipublikasikan, Surabaya: Fakultas Seni dan Desain, Universitas Kristen Petra, 2001.
- Jannah, R., "JFC, Identitas Kota Jember dan Diskursus Masyarakat Jaringan", Tesis tidak dipublikasikan, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010
- Lestari, Diah Dwi, "Bahasa Inggris Sebagai Salah Satu Sarana Dalam Mempromosikan Wisata Kabupaten Jember Melalui JFC Di Mancanegara". Laporan Kuliah Kerja Universitas Jember tidak dipublikasikan, Jember: Universitas Jember, 2007
- Vita Prastiana, "Studi tentang Pengelolaan Event Karnaval pada Jember Fashion Carnaval (JFC), S1 Skripsi tidak dipublikasikan, Malang: Universitas Negeri Malang, 2012
- Rohim, Abdul Gafurur, "Tradisi Petik Laut Dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Keberagaman Masyarakat Nelayan Desa Pugerkulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember", *Skripsi*, tidak dipublikasikan, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.
- Sudiar, Devin Gelorawan, "Pelaksanaan Kegiatan Promosi Atraksi Wisata Jember Fashion Carnaval (JFC) Dalam Memasuki Pasar Nasional Dan Internasional". Laporan Kuliah Kerja Universitas Jember tidak dipublikasikan, Jember: Universitas Jember, 2008
- Sutarto, Ayu, *Studi Pemetaan Kebudayaan Jawa Timur*, Jember: Program Studi Antropologi, FISIP, Universitas Jember, 2004.
- Tjiptoatmodjo, Franciscus Assisi Sutjipto, *Kota-Kota Pantai Di Selat Madura; Abad XVII Sampai Medio Abad XIX*, Disertasi tidak dipublikasikan, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1983.
- Wahyu, M, BC., "Proses Kreatif Desainer Fashion Dynand Fariz", *Skripsi*, Malang: Jurusan Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Bahasa & Seni, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 2012.
- Wangsa, Calista., *Strategi Humas Pemerintah Kabupaten Jember dalam Mengkonsumsikan Program BBJ*, Skripsi tidak dipublikasikan, Jember: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember, 2008.
- Wirawan, Surya, "Pengembangan Objek Wisata Bahari Yang Berkelanjutan di Nusa Lembongan Kabupaten Klungkung", *Tesis*, tidak dipublikasikan, Denpasar: Universitas Udayana, 2009.

Wiwiho, B., (dkk.), *Pariwisata Citra dan Manfaatnya*, (Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 1999).

#### **Artikel, Jurnal, Majalah, Koran**

Alfian, Ibrahim, “Sejarah dan Permasalahan Masa Kini”, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Sastra UGM, tanggal 12 Agustus 1985.

Bagus, I Gusti Ngurah, “Dari Obyek ke Subyek : Memanfaatkan Peluang Pariwisata Sebagai Industri Jasa Dalam Pembangunan”, Dalam Ilmu-ilmu Humaniora, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1991.

Baharudin, Erwan, “Kearifan Lokal, Pengetahuan Lokal Dan Degradasi Lingkungan”, Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Vol. 4 No.1 Tahun. 2013.

Baskoro Bra, dan Cecep Rukendi, “Membangun Kota Pariwisata Berbasis Komunitas: Suatu Kajian Teoritis”, dalam Jurnal Kepariwisata Indonesia Vol. 3 No. 1 Maret 2008

Bhakti, Hendra Matbean, “Opini Pembaca Majalah Halo Jember Sebagai Media Komunikasi Pariwisata Kabupaten Jember”, Jurnal Pariwisata Universitas Muhammdiyah Vol.3 No. 1 April 2009

Desi, Ulandari (dkk.), “Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD dan Kebijakan Pengembangannya”. Pada Proceeding Seminar Nasional Green Pariwisata, Universitas Mataram Lombok, Nusa Tenggara Barat, 2013.

Handinoto, “Alun-Alun Sebagai Identitas Kota Jawa, Dulu dan Sekarang”, dalam majalah Dimensi No. 18. 1992

Jannah, R. “Jember Fashion Carnival: Konstruksi Identitas dalam Masyarakat Jaringan”, *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 17, 2. 2012.

Kuncoro, Ahmad. *Aktivitas Pemasaran Daerah yang Efektif*. Jurnal Ekonomi Pemasaran. Vol 3. Th. 2007

Lembar Notulensi *hearing* tanggal 23 April 2005 DPRD Kabupaten Jember.

Manurung, Elizabeth Tiur (dkk.), “Perbandingan Kontribusi Industri Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bandung Dan Jember”, (Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan, 2014.

- Milana, Ana, "Strategi Pengembangan Merek". *Jurnal Ekonomi Pemasaran*. Vol 3. Thn. 2010
- Muslihatinningsih, Fivien, "Analisis Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Jember Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah", dalam *Jurnal ISEI Jember*, Vol. 3 No. 1, April 2013.
- Pramono, Y. Setyo, "Pengembangan Kampung Wisata Nelayan Puger Kabupaten Jember", Makalah Seminar Nasional Teknologi Ramah Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan FTSP-ITN Malang, 15 Juli 2010.
- Qomariah, Nurul, "Model Peningkatan Kepuasan Pengunjung Berbasis Customer Value: Studi Pada Pegunjung Pantai Watu Ulo Dan Pengunjung Pantai Papuma Di Kabupaten Jember", *Seminar Nasional dan Call for Paper, Research Methods And Organizational Studies*, 2014.
- Robby, Muhammad, "Manajemen Branding sebagai strategi Peningkatan Penjualan", *Jurnal Ekonomi Pemasaran*. vol 3. Th. 2010,
- Setiawan, Ikwan, "Kritik dan Gagasan untuk Pengembangan Pariwisata Warisan Budaya Jember", Disampaikan dalam Seminar bertajuk *Mewujudkan Potensi Sejarah, Budaya, dan Purbakala sebagai Aset Pariwisata Kabupaten Jember*, yang diselenggarakan atas kerjasama Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember bekerjasama dengan Kantor Pariwisata dan Budaya Kabupaten Jember, Aula Fakultas Sastra, 21 September 2011.
- Santoso, Siswoyo Hari, "Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat berbasis Pariwisata dan Ekonomi Kerakyatan, melalui Bulan Berkunjung ke Jember", Pada *Proceeding Seminar Nasional Green Pariwisata*, Universitas Mataram Lombok, Nusa Tenggara Barat. 2013.
- Santoso, S., "Kosep Struktur & Bentuk Kota Jawa s/d Abad ke 18", dalam majalah *Dimensi* No. 5. 1981.
- Sutarto, Ayu. "Sekilas tentang Masyarakat Pandalungan" Makalah Pembekalan *Jelajah Budaya 2006*", diselenggarakan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, tanggal 7 – 10 Agustus 2006
- "10 Tahun Karnaval Musik Patrol", *Majalah Halo Jember*, 2010, 5th edn, hlm. 43-45.
- "Alam Jember Lebih Hebat Dari Pada Luar Negeri", *Majalah Halo Jember*, 2009, 2nd edn, hlm. 24 – 26.
- "Berawal dari Birnie", *Majalah Halo Jember*, 2009, 2nd edn, hlm. 14-23.



- “Eyes on Triumph – Story of a Decade”, *Majalah Halo Jember*, 2011, 6th edn, p.6-23.
- “Ibu Kota Fesyen Indonesia”, *Majalah Halo Jember*, 2011, 6th edn, p.26-29.
- “Manifesto Fashionista dari Jember”, *Majalah Halo Jember*, 2009, 2nd edn, p.50-55.
- “Seboeah Kota Pada Soeatoe Masa”, *Majalah Halo Jember*, 2009, 4th edn, hlm. 6-15.
- “Menunggu Dibukanya Bandara Notohadinegoro”, *Majalah Jember Kita, Majalah Resmi Pemerintah Kabupaten Jember*, Oktober, 2013, 10th edn, hlm., 10-14.
- “Tamu Istimewa di Karnaval Luar Biasa”, *Majalah Halo Jember*, 2011, 8th edn, p.7-11.
- “World Treasure”, *Majalah Halo Jember*, 2010, 5th edn, p.6-19.
- “Jember Diminta Tiru Banyuwangi Soal Wisata”, *Berita Jember*, 17 Juli 2002.
- “Cruising The Land of Beauty”, *Buklet Pariwisata Kabupaten Jember, Cruising The Land of Beauty*, 2010, p.1.
- “Rakyat Ketajek Menuntut Hak Tanah di Depan Dewan”, *Radar Jember*, 12 Februari 2001.
- “Jember Miliki 400 Benda Purbakala”, diunduh dari: <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/07/23/1os6t2-jember-miliki-400-benda-purbakala>, diakses 19 Mei 2014.
- “Di Jember, Ratusan Benda Prasejarah Hilang” diunduh dari: <http://berita.liputan6.com/read/12830/di-jember-ratusan-benda-prasejarah-hilang>, 19 Mei 2014.
- “Konsisten Membangun Desa Menata Kota”. *Radar Jember* 21 Mei 2008.
- “Bupati Djalal: Masyarakat Harus Punya Rasa Memiliki”, *Jember Post* 2009.
- “JFC Jadi Ikon Jember”, *Surya* 8 Juli, 2012.
- “Tingkat Kunjungan ke Jember Meningkatkan”. *Radar Jember*, lembar Ekonomi Bisnis halaman 42. Sabtu, 5 Februari 2011.
- “Bulan Berkunjung Ke Jember Ke 3 Mendunia”, *Jember Prioritas*, 22 Mei 2009.
- “Di Bandara Notohadinegoro Jember, Bakal Ada Penerbangan”, *Jember Prioritas* 12 Agustus 2008.

“Tingkatkan Kunjungan Wisata, Genjot Pendapatan Daerah”, Koran Sindo, 18 Januari 2015.



LAMPIRAN A: Surat Ijin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
LEMBAGA PENELITIAN  
Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember Telp. 0331-337818, 339385 Fax. 0331-337818  
e-Mail : penelitian.llemlit@unej.ac.id

Nomor : 799/UN25.3.1/LT/2015 26 Mei 2015  
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

Yth. Kepala  
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan  
Perlindungan Masyarakat  
Pemerintah Kabupaten Jember  
di -

JEMBER

Memperhatikan surat pengantar dari Fakultas Sastra Universitas Jember Nomor :  
1687/UN25.1.6/LL/2015 tanggal 21 Mei 2015, perihal ijin penelitian mahasiswa :

Nama / NIM : Ahmad Yogga Setiawan / 080110301007  
Fakultas / Jurusan : Sastra / Ilmu Sejarah  
Alamat : Jl. Jawa VII No. 7 Jember / No. Hp. -  
Judul Penelitian : Pengembangan Industri Pariwisata di Kabupaten Jember Tahun  
2003 – 2014  
Lokasi Penelitian : 1. Kantor Pariwisata Kabupaten Jember  
2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember  
3. DPRD Kabupaten Jember  
4. Dinas Sosial Kabupaten Jember  
Lama Penelitian : Satu Bulan ( 26 Mei – 26 Juni 2015)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa  
yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan Saudara disampaikan terima kasih.



Dr. Zainuri, M.Si  
NIP: 196403251989021001

Tembusan Kepada Yth. :

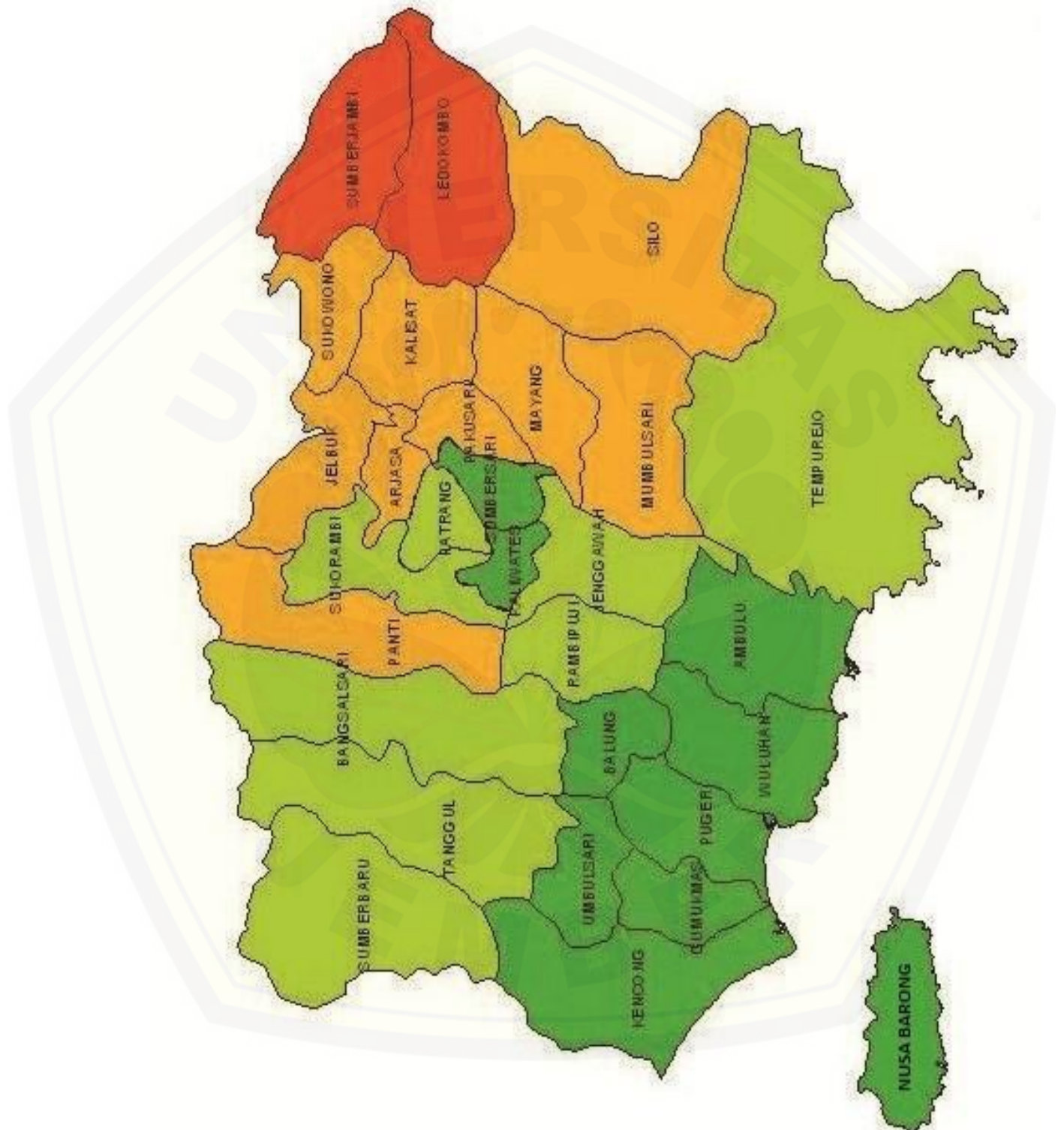
1. Dekan Fak. Sastra Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip



CERTIFICATE NO : QMS/173



Lampiran B: Peta Kabupaten Jember



Sumber: Jember dalam Angka Tahun 2014



**Lampiran C: Jadwal Acara Program BBJ Kabupaten Jember**

**Jadwal Acara Bulan Berkunjung Ke Jember I Periode 2007**

NO	ACARA	LOKASI/RUTE	PELAKSANAAN
1	Tenis Meja	GOR PKPSO Kaliwates	6-8 Juli 2007
2	Festival Layang-Layang	Pantai Watu Ulo	15 Juli 2007
3	Bola Basket	GOR PKPSO Kaliwates	24-29 Juli 6-9 Agustus 2007
4	Bulu Tangkis	GOR PKPSO Kaliwates	31 Juli – 5 Agustus 2007
5	Kasti	Alun-Alun Kota Jember Dan Stadion Notohadinegoro	1-15 Agustus 2007
6	Tenis Lapangan	GOR PKPSO Kaliwates	1-5 Agustus 2007
7	Pencak Silat Semi Profesional Perebutan Sabuk Pendekar Jember	Alun-Alun Kota Jember	4-12 Agustus 2007
8	Jember Fashion Carnaval (JFC VI)	Alun-Alun Kota Jember s/d GOR PKPSO Kaliwates	5 Agustus 2007
9	Pameran Bonsai, Adenium, Tanaman Hias dan UKM	Balai Serba Guna Kaliwates	5-12 Agustus 2007
10	Catur	SDN Jember Lor I Pagah	6-10 Agustus 2007
11	Festival Budaya Jepang (Group Aisen Warate Taiko)	Alun-Alun Kota Jember	8 Agustus 2007
12	Tinju Profesional	GOR PKPSO Kaliwates	11 Agustus 2007
13	Lomba Burung	Alun-Alun Kota Jember	12 Agustus 2007

	Berkicau		
14	POR PLB	Stadion Dan SECABA	11-12 Agustus 2007
15	Senam	Balai Serba Guna Kaliwates	12-13 Agustus 2007
16	Bola Volly	GOR PKPSO Kaliwates	15-26 Agustus 2007
17	Upacara Detik-Detik Proklamasi RI	Alun-Alun Kota Jember	17 Agustus 2007
18	Jember Carnaval City	GOR PKPSO Kaliwates s/d Alun-Alun Kota Jember	19 Agustus 2007
19	Turnamen Bilyar Master Nasional	Putra Bilyar	24-31 Agustus 2007
20	Festival Permainan Rakyat	Alun-Alun Kota Jember	26 Agustus 2007
21	Gebyar Kim	Balai Serba Guna Kaliwates	27-31 Agustus 2007
22	Tajemtra	Tanggul – Jember	1 September 2007

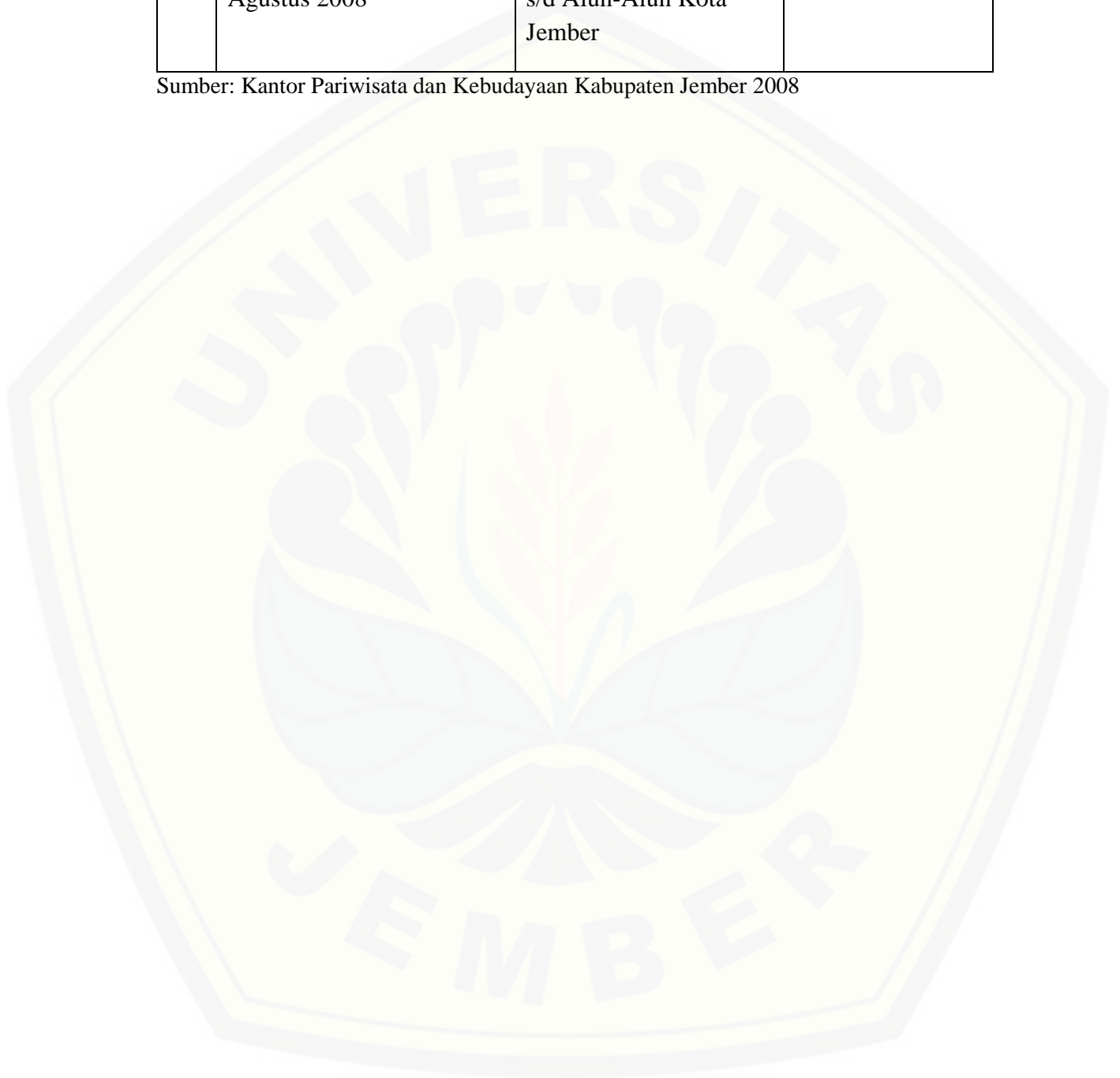
Sumber: Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember 2007

**Jadwal Acara Bulan Berkunjung Ke Jember II Periode 2008**

NO	ACARA	LOKASI/RUTE	PELAKSANAAN
1	Lomba Burung Berkicau	Alun-Alun Kota Jember	27 Juli 2008
2	Jember Expo	Balai Serba Guna GOR PKPSO Kaliwates	1-10 Agustus 2008
3	Giri Wana Rally	Gunung Raung (Kawasan Hutan PPG Garahen Silo-Jember)	2 Agustus 2008
4	Jember Fashion Carnaval (JFC VII)	Alun-Alun Kota Jember s/d GOR PKPSO Kaliwates	3 Agustus 2008
5	Musabaqoh Qiro'at al Kutub	Ponpes Darul Hikmah Kranjangan	5-8 Agustus 2008
6	Dialog Pelestarian Lingkungan	Gedung Soetardjo	8 Agustus 2008
7	Asian Supercross Championship	Sirkuit Stadion Notohadinegoro	9-10 Agustus 2008
8	Lomba Permainan Rakyat	Alun-Alun Kota Jember	10 Agustus 2008
9	Koong BBJ	Alun-Alun Kota Jember	10 Agustus 2008
10	Kejurnas Off Road	Kawasan Gunung Argopuro	15-17 Agustus 2008
11	Paralayang	Bandara Notohadinegoro	16-17 Agustus 2008
12	Bilyard	Putra Bilyard	18-25 Agustus 2008
13	Pencak Silat	Alun-Alun Kota Jember	19-26 Agustus 2008
14	Tajemtra	Tanggul – Jember	23 Agustus 2008

15	Kontes Sapi dan Pameran	Lapangan Tanggul Wetan	26-27 Agustus 2008
16	Jember City Carnaval 30 Agustus 2008	GOR PKPSO Kaliwates s/d Alun-Alun Kota Jember	15-26 AUG 2007

Sumber: Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember 2008





**Jadwal Acara Bulan Berkunjung Ke Jember III Periode 2009**

<b>NO</b>	<b>ACARA</b>	<b>LOKASI/RUTE</b>	<b>PELAKSANAAN</b>
1	Louncing BBJ	Alun-Alun Kota Jember	31 Mei 2009
2	Apel Besar dan Kirab Logo BBJ	Alun-Alun Kota Jember dan Keliling Jember	Juni 2009
3	Fun Bike BBJ	Alun-Alun Kota Jember	28 Juni 2009
4	Kasti	Alun-Alun Kota Jember	01 Juli – 08 Agustus 2009
5	Kirab Drum Band	Alun-Alun Kota Jember	Juli- Agustus 2009
6	Jember City Carnaval (JCC)	GOR PKPSO Kaliwates s/d Alun-Alun Kota Jember	04 Juli 2009
7	Catur	Aula PB Sudirman	04-09 Juli 2009
8	LOMPERA (Panjat Pinang dll)	Alun-Alun Kota Jember	05 Juli 2009
9	Panjat Dinding	Alun-Alun Kota Jember	10-12 Juli 2009
10	Road Race	SECABA	11-12 Juli 2009
11	Koong Perkutut	Lapangan GOR PKPSO Kaliwates	12 Juli 2009
12	Festival Band	GOR PKPSO Kaliwates	17-18 Juli 2009
13	MTQ Jawa Timur	Stadion Notohadinegoro	19 - 25 Juli 2009
14	Jember Expo	Balai Serba Guna GOR PKPSO Kaliwates	19 Juli – 01 Agustus 2009
15	Lomba Burung Berkicau	Alun-Alun Kota Jember	26 Juli 2009
16	Super Cross	Sircuit Garahan Silo	26-27 Juli 2009

17	Seminar Internasional Pendidikan	Hotel Panorama	28 Juli 2009
18	Pencak Silat Profesional	Alun-Alun Kota Jember	1-6 Agustus 2009
19	Jember Fashion Carnaval (JFC VIII)	Alun-Alun Kota Jember s/d GOR PKPSO Kaliwates	02 Agustus 2009
20	Tajemtra	Tanggul – Jember	08 Agustus 2009
21	Down Hill	Rembangan	07-09 Agustus 2009
22	Billiard 9 Ball Open Tournament	Putra Billiard	09-15 Agustus 2009
23	Off Road	Kawasan Gunung Argopuro	14-16 Agustus 2009

Sumber: Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember 2009

**Jadwal Acara Bulan Berkunjung Ke Jember IV Periode 2012**

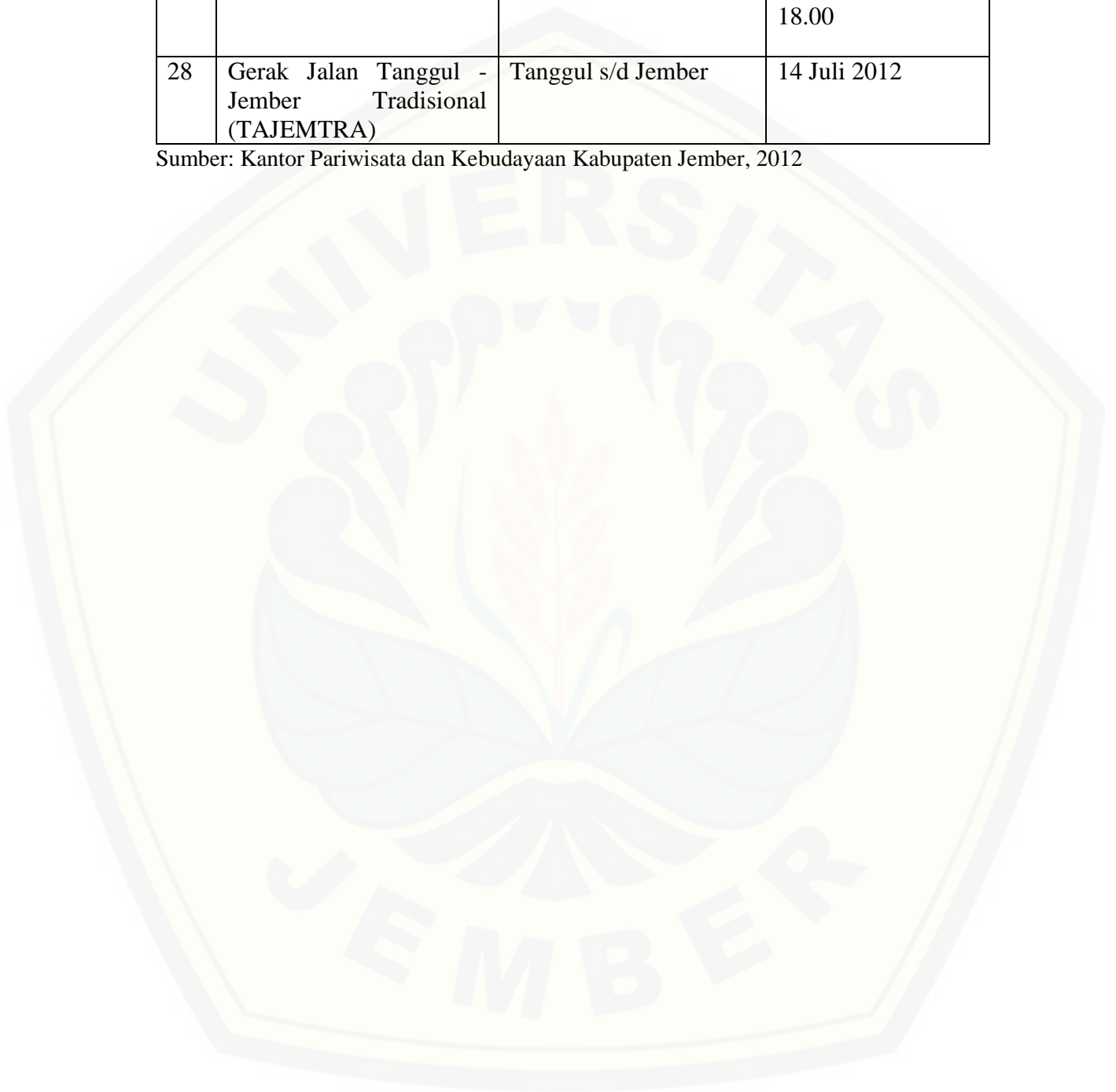
<b>NO</b>	<b>ACARA</b>	<b>LOKASI/RUTE</b>	<b>PELAKSANAAN</b>
1	Launching BBJ	Alun-Alun Kota Jember	3 Juni Minggu 2012
2	Kejuaraan Sepak Bola "Far East Java Cup"	Stadion Noto Hadinegoro	Juni - Juli 2012
3	Kejuaraan "Kasti"	Alun-Alun Kota Jember	2 – 15 Juni 2012
4	Lomba Karapan Sapi Nasional	Lapangan Tanggul Wetan	9-15 Juni 2012
5	Drag Bike	Bandara Jember (IMI Kejurda)	9-10 Juni 2012
6	Jambore Honda Tiger Nasional	Balai Serba Guna Kaliwates	9-10 Juni 2012
7	Kontes Nasional Ayam Serama dan Ayam Ketawa	Balai Serba Guna Kaliwates	9-10 Juni 2012
8	Tournament Golf BBJ Cup 2012	Lapangan Golf Glantangan	10 Juni 2012
9	Jember Shopping Festival (JSF)	Pusat-Pusat Pertokoan, Restoran	14 Juni – 14 Juli 2012 Setiap hari Pukul 09.00
10	Jember Carnival City (JCC) dan Festival Drum Band	GOR PKPSO Kaliwates s/d Alun-Alun Kota Jember	16 Juni 2012
11	BBJ Adventure Trail Jember 2012	Lapangan GOR PKPSO Kaliwates	16-17 Juni 2012
12	Lomba Permainan Rakyat (Lompera/Panjat Pinang 200 pohon)	Alun Alun Kota Jember	17 Juni 2012 Sabtu 06.00
13	Manaqib Kubro	Alun-Alun Kota Jember	19 Juni 2012 Selasa 19.00

14	Jember Expo & Otomotif Show	Balai Serba Guna GOR PKPSO Kaliwates	22 Juni – 8 Juli 2012 Jumat - Minggu 15.00
15	Road Race “Yamaha Cup Race 2012”	Alun-Alun Kota Jember	23 Juni - 24 Juni 2012 Sabtu - Minggu 19.00
16	Shoot on Jember	Taman Anggrek Regency	24 – 30 Juni 2012 Minggu 18.00
17	Pencak Silat Semi Profesional	Alun-Alun Kota Jember	25 – 30 Juni 2012 Senin - Sabtu 18.00
18	Rekor Muri “Bakar 1.000 Kambing Guling”	Jl. Raya Sultan Agung s/d Alun-Alun Kota Jember	29 Juni 2012 Jum’at 19.30
19	Jambore Honda Ulung Nasional	Gedung ex Brigif Jl. Gajah Mada	30 Juni – 1 Juli 2012 Sabtu - Minggu 07.00
20	Paramotor/Paralayang	Bandara Notohadinegara	30 Juni – 1 Juli 2012 Sabtu - Minggu 08.00
21	Lomba Burung Berkicau	Alun-Alun Kota Jember	1 Juli 2012 Minggu 07.00
22	Rekor Muri “MoU” RS Bina Sehat	RS Bina Sehat	5 Juli 2012 Kamis 10.00
23	Seminar Nasional “Ayo Mbangun Jember”	Pendopo/New Sari Utama	7 Juli 2012 Sabtu 10.00
24	Tokoh & Artis Pulang Kampung	Alun-Alun Kota Jember	6 Juli 2012 Sabtu 19.00
25	Jember Fashion Carnaval (JFC XI)	Alun-Alun Kota Jember s/d GOR PKPSO Kaliwates	8 Juli 2012 Minggu 11.00
26	Lomba Koong Perkutut	Lapapangan GOR	8 Juli 2012 Minggu



		Kaliwates	07.00
27	Jember Volley Ball Invitation	GOR PKPSO Kaliwates	8 – 13 Juli 2012 Minggu – Sabtu 18.00
28	Gerak Jalan Tanggul - Jember Tradisional (TAJEMTRA)	Tanggul s/d Jember	14 Juli 2012

Sumber: Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, 2012



**LAMPIRAN D: Foto-Foto**

Foto 1: Perkebunan Teh Gunung Gambir



Sumber: Dokumentasi Kantor Pariwisata Kabupaten Jember, 2011

Foto 2: Logo Bulan Berkunjung Ke Jember



Sumber: Dokumentasi Majalah Hallo Jember, Edisi 2012

Foto 3: Suasana Fotografer dalam pengambilan gambar di JFC



Sumber: Dokumentasi Majalah Hallo Jember, Edisi 2012

Foto 4: Kerapan Sapi di Alun-Alun Tanggul



Sumber: Dokumentasi Majalah Hallo Jember, Edisi 2012



Foto 5: Pantai Watu Ulo Ambulu



Sumber: Dokumentasi ahmad yogga setiawan, 2015

Foto 6: Artis Pulang Kampung



Sumber: Dokumentasi Majalah Hallo Jember, Edisi 2012



**Lampiran E: Cuplikan Hasil Wawancara**

**SURAT KETERANGAN**

Dengan ini kami,

Nama : Suyanto  
Umur : 59 Tahun  
Pekerjaan : Penasehat Sekolah Mode  
*Dynand Fariz International High Fashion Center*

Menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Yogga Setiawan  
Alamat : Jln. Kalimantan no 18, Jember  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Jember.

Telah melakukan wawancara dengan responden pada tanggal 26 Oktober 2014 guna mendapatkan data untuk melengkapi penulisan skripsi dengan judul “Perkembangan Industri Pariwisata di Kabupaten Jember Tahun 2003 – 2014”.

Jember, 26 Desember 2014



Suyanto

**Cuplikan Hasil Wawancara dengan Suyanto**

P : Bagaimana ide awal diadakan JFC?

I : Saya kan pensiunan pegawai, sedang saya biasa bekerja. Waktu itu saya beli rumah gedung di gunung batu. Saya piker mau buat apa ini. Waktu itu adik saya baru pulang dari sekolah mode di Paris Prancis. Akhirnya adik saya kasih ide ke saya untuk buat sekolah mode, dan dia sanggup untuk mengelolanya. Akhirnya berdiri *Dynand Fariz International High Fashion Center* tahun 1998. Sekolah ini konsepnya meniru sekolah-sekolah mode di Eropa yang mengadakan peragaan busana setiap minggu. Mulanya karyawan saya selama seminggu memakai kostum yang sedang *ngetrend* saat ini. Kemudian setelah kita lihat mengapa hanya dari rumah ke kantor, akhirnya kita coba memakai kostum tersebut di jalan-mulanya dari jalan belakang bangunan ini keliling sampai Jalan Trunojoyo, akhirnya lama-lama ketagihan. Saat itu hanya 50 orang saja karyawan kita itu termasuk, karyawan rumah mode, kemudian karyawan salon saya, salon karisma dan karyawan adik saya. *Sound system*nya dinaikkan becak waktu itu. Jam 5 pagi kita sudah ada di alun-alun Jember. Pada saat itu di alun-alun pada hari Minggu orang banyak yang olah raga, jalan-jalan, bahkan suara musik dari senam lebih keras, sehingga *sound system* kita yang waktu itu hanya kecil terdengar hanya sayup-sayup. Yang menariknya kemudian kita dikira demo. Bahkan ada ditulis sama Radar Bromo saat itu, judulnya “Dikira Demo ternyata Karnaval”. Pada saat itu banyak sekali yang menonton semua orang di alun-alun menonton kita, dari situlah kemudian kita evaluasi dan kita rencanakan kenapa tidak kita membuat acara karnaval yang lebih terkonsep dan terencana.

I : Apakah itu yang menginspirasi munculnya JFC?

P : Kurang lebih begitu.

I : Lalu nama JFC sendiri siapa yang mencetuskan?

P : Ide ini muncul waktu acara reuni keluarga. Banyak famili yang menanyakan bagaimana kelanjutan even yang ditampilkan. Disinilah banyak masukan dari kerabat yang sampai jadi perdebatan mengenai nama even itu. Adik saya Dynan, tetap mempertahankan nama Jember Fashion Carnival, karena konsepnya memakai konsep dari sekolah Prancis. Memang kalau ditilik dari bahasa Inggris seharusnya Jember Fashion Carnival. Karena itu banyak yang menulis keliru mengenai nama even ini.

P : Apakah dengan langkah tersebut langsung menarik perhatian pemda?

I : Ya, ndak mas. Sebelum program ini disetujui oleh pemerintah daerah, kita sosialisasikan ke sekolah-sekolah. Kita bikin proposalnya kita suruh baca kepala sekolahnya, terus kita minta waktu untuk presentasi kepada mereka, kepada murid-muridnya, siswa-siswanya. Kemudian didapatkan kurang lebih 200-an peserta yang tertatik dan mau tampil.

P : Waktu mengadakan karnaval di jalan apa nggak mengganggu pengguna jalan lainnya?

I : Ya! Memang ini yang jadi kendala saat kita mau mengadakan acara. Problem di rute, yang kita minta waktu itu adalah dari alun-alun, depan

Pemda memutari alun-alun langsung ke Sultan Agung, ke arah barat dan finishnya di Bank Niaga. Waktu itu memang melawan arus. Karena itu ijinnya sampai berlarut-larut, sedangkan ini waktu itu sudah ada dua ratus anak yang siap tampil, dan paskan [disamakan waktunya] dengan peringatan ulang tahun Kota Jember bulan Januari. Karena itu bupati langsung menyetujui sesuai dengan rute yang kita minta.



**SURAT KETERANGAN**

Dengan ini kami,

Nama : Anang Murwanto

Umur : 55 Tahun

Pekerjaan : Ketua Komisi B, bidang perekonomian DPRD  
Kabupaten Jember

Menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Yogga Setiawan

Alamat : Jln. Kalimantan No. 18, Jember

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Jember.

Telah melakukan wawancara dengan responden pada tanggal 26 Oktober 2014 guna mendapatkan data untuk melengkapi penulisan skripsi dengan judul “Perkembangan Industri Pariwisata di Kabupaten Jember Tahun 2003 – 2014”.

Jember, 26 Desember 2014



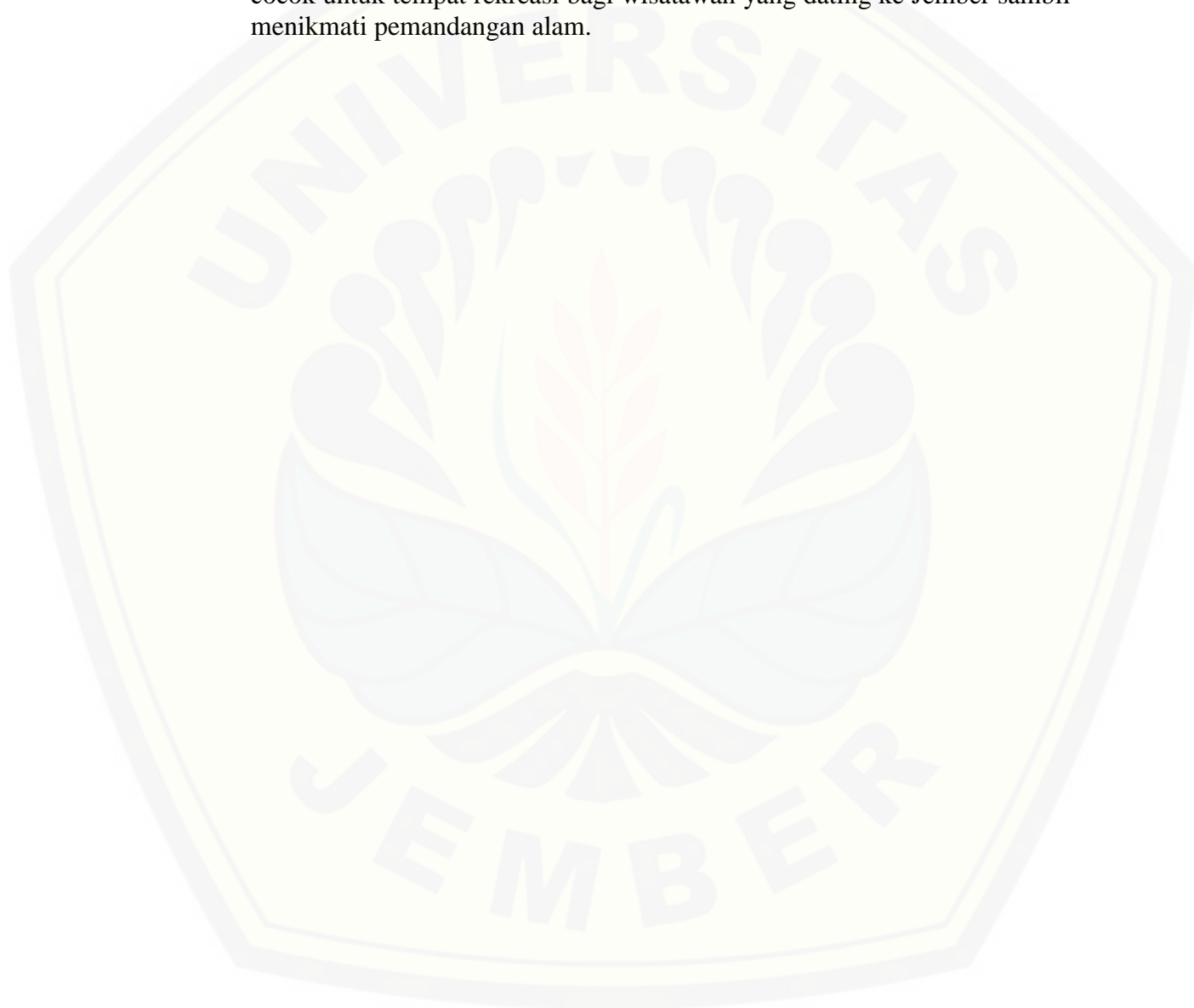
Anang Murwanto



**Cuplikan Hasil Wawancara dengan Anang Murwanto**

- P** : Bagaimana sebenarnya maksud bupati dalam bongkar pasang alun-alun kota Jember?
- I** : Awalnya memang bagus, karena maksud pembenahan alun-alun kota adalah menertibkan lingkungan alun-alun biar kelihatan biar kita memiliki alun-alun yang dapat dibanggakan. Tetapi dalam pelaksanaannya ini yang tidak sesuai dengan tujuan utama. Permasalahannya dana yang dipakai untuk proyek pembangunan alun-alun sangat besar. Proyek pemugaran alun-alun sendiri berjalan tersendat-sendat. Ini mengesankan adanya permainan politik.
- P** : Permainan politik bagaimana?
- I** : Ya, kita dapat melihat dengan jalannya proyek tersebut. Sampai sebegitu lama pembangunan ini dilaksanakan tapi tidak selesai-selesai. Inikan menunjukkan adanya permainan pada pelaksana proyek. Apalagi tersendat-sendatnya pembangunan alun-alun para birokrat menunjukkan ketidaksiapan atau kurang matangnya dalam merencanakan proyek pemugaran. Seharusnya sudah ada antisipasi bagaimana jika terjadi keterlambatan. Bupati harus tegas untuk menindak para oknum yang tidak bertanggung jawab. Belum lagi berkaitan dengan dana yang dikeluarkan untuk pembangunan. Dana milyaran rupiah hanya digunakan untuk bongkar pasang pembangunan alun-alun, kan sangat *eman* sekali. lebih baik digunakan untuk kepentingan yang lain.
- P** : Menurut bapak sendiri seharusnya bagaimana dalam menyingkapi gerak politik bupati?
- I** : Masyarakat bisa mengajukan lewat DPRD untuk mempertanyakan keberadaan pembangunan alun-alun yang menghabiskan dana banyak. masyarakat perlu mengetahui bahwa dana untuk pembangunan tidak harus digunakan hanya sekedar membenahi alun-alun saja. Masih banyak kepentingan-kepentingan lain yang lebih penting untuk segera diselesaikan. Misalnya masyarakat miskin atau pendidikan. Kita kan tahu Jember masih tinggi angka kemiskinan dan angka buta huruf. Dana proyek pembangunan alun-alun kan lebih bermanfaat digunakan untuk biaya pendidikan atau pemberantasan kemiskinan.
- P** : Apa pembangunan alun-alun kota Jember ini ada kaitannya dengan permasalahan peningkatan pariwisata yang akhir-akhir ini mulai dilirik oleh masyarakat luas?
- I** : Ya, itu yang saya katakana tidak sesuai dengan tujuan awal pembangunan. Memang salah satu proyek pembangunan alun-alun ini bertujuan untuk mendongkrak pariwisata di Jember dan sebagai bukti pemerintah dalam mengaplikasikan Jember kota budaya santri. Apalagi pada akhir-akhir ini Jember dikenal dengan JFC-nya. Tapi seharusnya tidak begitu dalam menjalankan proyek pembangunan alun-alun. Masa hanya memugar haru memakan waktu sampai bertahun-tahun dan dana yang dikucurkan sampai lebih dari lima milyar. Ini kan namanya pemborosan. Kalau toh memang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan pariwisata, kan bisa digunakan

untuk lainnya. Misalnya pembangunan tempat-tempat wisata di pinggir pantai, seperti pantai watu ulo, parayangan atau pantai-pantai yang lainnya. Jujur saja Jember kaya dengan potensi wisata, hanya belum dikembangkan secara maksimal. Kita seharusnya malu dengan gebrakan pemda Banyuwangi yang bisa membangun sebuah pulau yang tidak dikenal menjadi dikenal di mata internasional. Seperti Pulau Merah yang baru-baru ini mulai terkenal. Padahal kalau kita mau benar-benar mengangkat pariwisata jangan hanya dalam kota saja yang dibangun, tempat-tempat lain juga harus dibangun. Misalnya Pulau Nusabarong, kan cocok untuk tempat rekreasi bagi wisatawan yang datang ke Jember sambil menikmati pemandangan alam.



**SURAT KETERANGAN**

Dengan ini kami,

Nama : Arief Tjahjono  
Umur : 54 Tahun  
Pekerjaan : Kepala Kantor Pariwisata dan Kebudayaan  
Kabupaten Jember

Menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Yogga Setiawan  
Alamat : Jln. Kalimantan No. 18, Jember  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Jember.

Telah melakukan wawancara dengan responden pada tanggal 26 Oktober 2014 guna mendapatkan data untuk melengkapi penulisan skripsi dengan judul “Perkembangan Industri Pariwisata di Kabupaten Jember Tahun 2003 – 2014”.

Jember, 26 Desember 2014



Arief Tjahjono

**Cuplikan Hasil Wawancara dengan Arief Tjahjono**

- P** : Kapan sebenarnya kantor pariwisata Jember ini mulai berdiri?
- I** : Ya, menurut realitasnya kantor ini sebenarnya sudah lama berdiri, yaitu sejak masa kepemimpinan bupati Syamsul. Namun pada masa itu kantor pariwisata belum bisa berjalan dengan tetap, karena belum adanya pemda belum mengeluarkan aturan dalam menyusun organisasi. Memang benar sudah ada susunan formatur kantor pariwisata, tetapi tidak efisien dan para pegawainya tidak tau apa yang harus dikerjakan. Karena selama itu tidak ada aturan dalam tata laksana dan tata kerja kantor pariwisata, sehingga pegawai kantor tidak memiliki acuan apa yang harus dikerjakan. Paling-paling kantor hanya mendata tempat-tempat wisata dan peninggalan-peninggalan kebudayaan yang dimiliki Jember. hal yang lebih menyedihkan adalah kantor pariwisata belum memiliki museum yang bisa dijadikan wadah bagi kekayaan alam baik itu benda-benda purbakala maupun pengembangan seni dan budaya Jember. Kekurangan fasilitas yang menunjang bagi perkembangan pariwisata ini yang menjadi salah satu faktor keterhambatan pariwisata Jember.
- P** : Tadi saya sudah melihat-lihat di sini sudah banyak koleksi budaya dan lain-lain. Apa memang hanya itu yang menghambat perkembangan pariwisata di Jember?
- I** : Ya, tidak hanya itu yang menghambat perkembangan pariwisata. Pendirian kantor pariwisata tidak serta merta tolak ukur bagi perkembangan pariwisata di Jember. Ada banyak hal yang terkait dalam perkembangan pariwisata. Waktu itu kita belum memiliki ikon pariwisata yang bisa dijadikan daya tarik bagi wisatawan luar untuk datang ke Jember. Ditambah lagi pada masa kepemimpinan Bupati Syamsul Hadi kondisi sosial politik Jember masih sensitif dengan permasalahan korupsi dan eforia reformasi. Banyak permasalahan yang terpendam tiba-tiba muncul ke permukaan. Masyarakat mulai rame-rame menuntut tanah garapannya. Pemerintah akhirnya tidak mengurus masalah pariwisata. Bagaimana mau mengurus pariwisata kalau para politikus pemerintah harus sibuk dengan urusan korupsi dan harus menghadapi tututan rakyat atas tanah mereka. Ditambah lagi dengan tarik ulur mengenai bagaimana cara mengembangkan pariwisata Jember.
- P** : Apakah selama ini tidak ada ide-ide kreatif untuk mengembangkan pariwisata Jember?
- I** : Sebenarnya banyak ide-ide yang muncul pada saat itu, tetapi kita harus memikirkan hal-hal lainnya, seperti apakah dana penunjang mencukupi untuk mengembangkan atau apakah kita harus menjalankan dengan yang sudah ada. Pada waktu itu kita sudah memikirkan untuk menggali potensi alam Jember yang begitu kaya akan tempat-tempat wisata. Apalagi banyak tokoh-tokoh Jember memiliki nama di tingkat nasional, baik dari artis, tokoh agama, maupun militer. Bertepatan kita berinisiatif untuk membuat pagelaran bagi masyarakat Jember dalam rangka menyambut hari kemerdekaan Indonesia. Momen ini kemudian memunculkan ide untuk



menyiapkan serangkaian acara yang bisa digelar selama sebulan penuh. Ketika kami ajukan ide-ide ini langsung ditanggapi bupati dan disuruh menyusun acara-acara tersebut. Untuk bisa menarik wisata kita membuat ikon yang waktu itu disepakati Bulan Berkunjung ke Jember atau dikenal BBJ. Awalnya kita menggandeng tokoh artis, seperti Anang atau Opick yang asli orang Jember. Dengan begitu disamping kita menghibur masyarakat dengan pesta penyambutan HUT RI, kita juga bisa mempromosikan pariwisata Jember kepada masyarakat luar yang kebetulan menonton.

**P** : Menurut informasi apa Kantor Pariwisata menggandeng JFC untuk mendongkrak pariwisata Jember?

**I** : Ya, dengan adanya program BBJ, kita bisa menggandeng JFC yang selama ini sudah berjalan dengan swadana. Tapi kita juga memikirkan dengan kondisi masyarakat Jember yang dikenal dengan masyarakat santri. Apakah tidak akan terjadi benturan sosial budaya nantinya, karena diakui atau tidak dalam setiap evennya JFC selalu menampilkan peragaan busana dengan busana yang buka-bukaan. Banyak anggota dewan juga mengasumsikan hal itu. Tetapi ketika pengurus JFC memberikan presentasi dan hal itu tidak akan terjadi benturan dengan budaya masyarakat santri, maka dewan menerima proposal JFC. Hal ini kemudian disetujui oleh Bupati dan JFC dimasukkan dalam rangkaian program BBJ.

**P** : Selain program BBJ apa langkah kantor pariwisata dalam mempromosikan pariwisata Jember?

**I** : Waktu itu bupati menyerahkan semua promosi ke kantor pariwisata. Untuk itu kita mengadakan kajian media apa yang bisa menarik wisatawan. Akhirnya kita terfikir membuat majalah dengan menampilkan gambar-gambar lux yang bisa menarik wisata. Dengan kualitas gambar dan kertas yang super saya berpikir nanti akan menarik perhatian masyarakat. Ketika kita ajukan contoh majalah yang hendak kita terbitkan, bupati langsung menyetujui dan memberikan nama majalah tersebut dengan majalah 'Hallo Jember'. Awalnya nama ini muncul karena ide bupati untuk lebih deka dengan masyarakat, namun kemudian majalah ini berkembang untuk lebih mempromosikan pariwisata yang dimiliki Jember. Akhirnya dengan sedikit perubahan dari majalah yang kita kirimkan sebagai contoh, majalah Hallo Jember terbit dengan menampilkan gambar-gambar peragaan busana JFC dan kesenian-kesenian yang dimiliki Jember. Langkah selanjutnya kita kirimkan majalah-majalah ini ke kedubes di Jakarta dan tempat-tempat transit perjalanan, seperti bandara. Ternyata tanggapan dari masyarakat luas sangat antusias, dan tidak heran jika BBJ tahun-tahun selanjutnya bisa mendongkakan pariwisata di Jember.

**SURAT KETERANGAN**

Dengan ini kami,

Nama : Widi Prasetyo  
Umur : 53 Tahun  
Pekerjaan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
(Bakesbangpol) Kabupaten Jember

Menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Yogga Setiawan  
Alamat : Jln. Kalimantan No. 18, Jember  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Jember.

Telah melakukan wawancara dengan responden pada tanggal 26 Oktober 2014 guna mendapatkan data untuk melengkapi penulisan skripsi dengan judul “Perkembangan Industri Pariwisata di Kabupaten Jember Tahun 2003 – 2014”.

Jember, 26 Desember 2014



Widi Prasetyo

**Cuplikan Hasil Wawancara dengan Widi Prasetyo**

- P** : Bagaimana kondisi sosial wilayah Jember waktu kepemimpinan Bupati Syamsul Hadi?
- I** : Ya, kita memang mengakui bahwa pada masa kepemimpinan bupati Syamsul Hadi dan pengganti selanjutnya banyak permasalahan yang mengiringinya. Kita tahu bahwa kondisi sosial politik Jember baru tertib dan aman sekitar 7 sampai Sembilan tahun terakhir. Masa kepemimpinan Syamsul Hadi banyak terjadi protes, dan hal ini otomatis tidak terurusnya pariwisata di Jember. Kita tahu bahwa wilayah Kabupaten Jember pada masa Kolonial Hindia Belanda merupakan daerah kantong bagi pembukaan perkebunan swasta. Pembukaan lahan-lahan perkebunan di wilayah Jember kebanyakan lahannya diperoleh dari penyewaan atas dasar sistem Hak Guna Usaha (HGU). Pasca Indonesia merdeka terjadi perubahan dalam kepemilikan tanah, dimana banyak tanah tanah bekas hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai asal konvensi hak barat dikuasai oleh negara atau memperpanjang masa HGU sampai 20 tahun. Tanah tanah bekas perkebunan di wilayah perkebunan Jember kebanyakan diperpanjang masa sewanya selama 20 tahun dihitung sejak 1980 dan berakhir tahun 1999/2000. Persoalan ini yang menjadi pemicu bagi gejolak sosial di wilayah Kabupaten Jember.
- P** : Apakah memang gejolak sosial yang mempengaruhi kurang terurusnya pariwisata di Jember?
- I** : Ya, diakui atau tidak kondisi Jember waktu itu yang kurang kondusif. Demonstrasi rakyat di depan gedung DPRD Jember dan Kantor Bupati Jember dalam rangka menuntut kembali tanah garapan warisan leluhur mereka serta penolakan perpanjangan HGU menjadi fenomena sehari-hari masa kepemimpinan Syamsul Hadi Siswoyo. Hal ini menjadi sorotan media dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap kurang minatnya para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Jember bagi pembangunan pariwisata. Situasi sosial politik Kabupaten Jember yang kurang kondusif pada masa kepemimpinan Syamsul Hadi Siswoyo ini menjadikan pariwisata terhambat dalam pengembangannya. Tempat-tempat wisata yang berpotensi sebagai salah satu sumber PAD kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah, sehingga mengurangi daya tarik wisatawan untuk datang ke Jember. Hal ini menjadikan pemerintah kurang memperhatikan perkembangan pariwisata. Para birokrat dan politisi terseret dalam arus gejolak sosial yaitu dengan berusaha menenangkan massa. Hal ini berakibat pada terbengkelainya kegiatan pariwisata. Terbengkelainya kegiatan pariwisata masa kepemimpinan Syamsul Hadi Siswoyo secara tidak langsung berdampak pada kerugian riil dengan hilangnya kekayaan alam milik Kabupaten Jember.

**SURAT KETERANGAN**

Dengan ini kami,

Nama : Sugiarto

Umur : 56 Tahun

Pekerjaan : Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kabupaten Jember

Menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Yogga Setiawan

Alamat : Jln. Kalimantan No. 18, Jember

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Jember

Telah melakukan wawancara dengan responden pada tanggal 26 Oktober 2014 guna mendapatkan data untuk melengkapi penulisan skripsi dengan judul “Perkembangan Industri Pariwisata di Kabupaten Jember Tahun 2003 – 2014”.

Jember, 26 Desember 2014



Sugiarto



**Cuplikan Hasil Wawancara dengan Sugiarto**

- P** : Bagaimana bisa terjadi kemoloran waktu yang dijadwalkan dalam proyek pemugaran alun-alun.
- I** : Sebenarnya tidak terjadi kemoloran, hanya saja barang yang dikehendaki sulit didapat. Seperti bahan tanaman hias. Pada awal rencana rancangan bangunan alun-alun, kita menginginkan alun-alun kita hias dengan tanam pohon kurma, tetapi begitu program sudah jalan ternyata karena bahan ini sulit didapat. Akhirnya kita merubah rencana, dan tanaman yang kita tanam tidak lagi pohon kurma, tapi pohon palem. Namun lagi-lagi kita juga kesulitan untuk memperoleh pohon palem sesuai dengan ukuran yang kita kehendaki. Hal ini terus berlarut-larut, sedangkan pihak pelaksana proyek tidak mengkonfirmasi permasalahan ini. Padahal mereka sudah menyanggupi dan memprediksi bahan mudah didapat. Kenyataannya sampai menjelang tahun 2010 masih belum ada kejelasan. Hal ini akhirnya mendorong pihak pemda untuk mengurus kelangkaan bahan. Akhirnya saya diberitahu bahwa ada bahan yang sesuai dengan ukuran di Jawa Barat dan dengan cepat kita langsung menindaklanjuti keberadaan bahan ini.

**SURAT KETERANGAN**

Dengan ini kami,

Nama : Hendroyono

Umur : 57 Tahun

Pekerjaan : Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil  
(Bapenduk Capil) Kabupaten Jember

Menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Yogga Setiawan

Alamat : Jln. Kalimantan No. 18, Jember

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Jember.

Telah melakukan wawancara dengan responden pada tanggal 26 Oktober 2014 guna mendapatkan data untuk melengkapi penulisan skripsi dengan judul “Perkembangan Industri Pariwisata di Kabupaten Jember Tahun 2003 – 2014”.

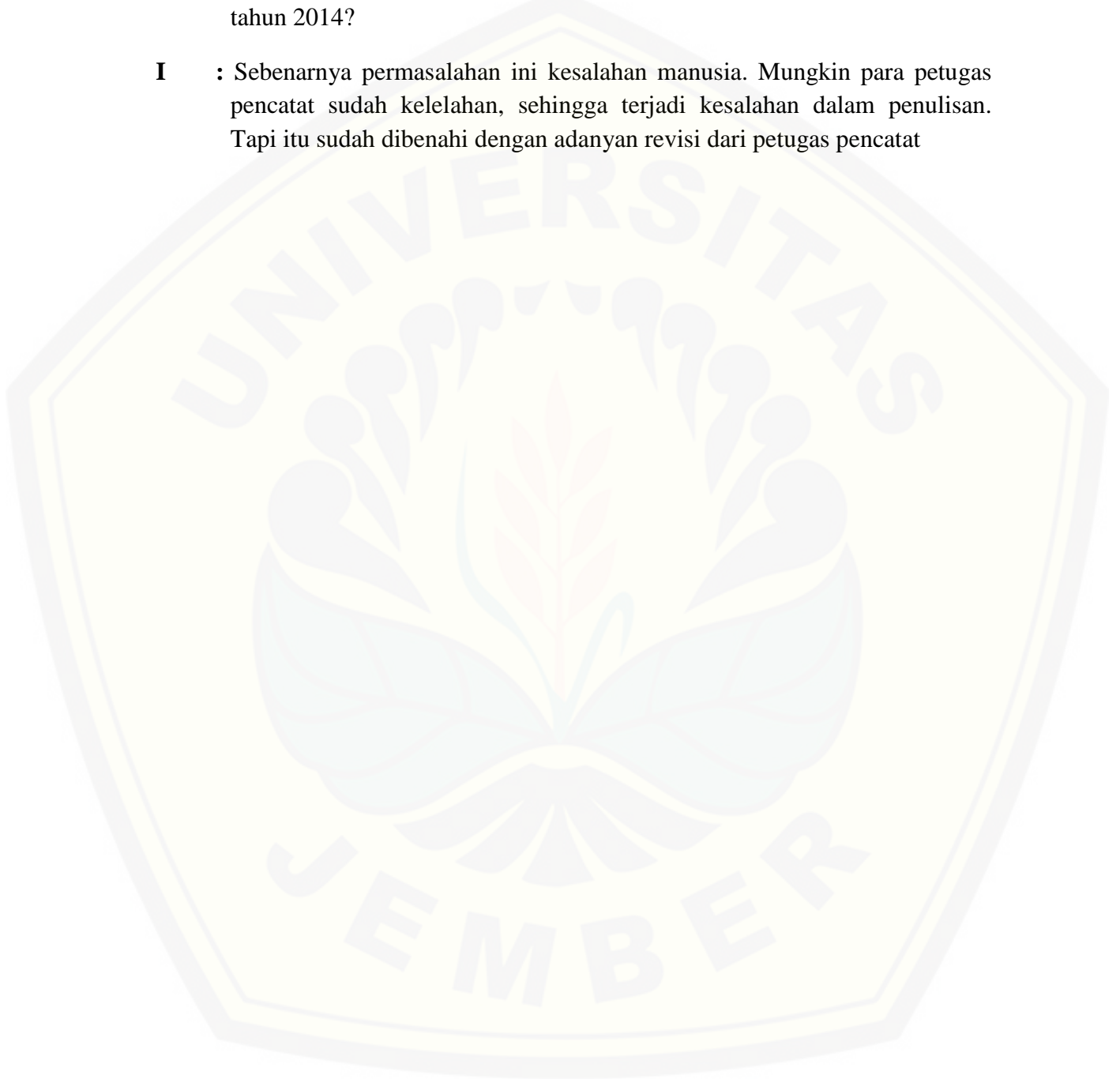
Jember, 26 Desember 2014



Hendroyono

**Cuplikan Hasil Wawancara dengan Hendroyono**

- P** : Bagaimana bisa terjadi kesalahan dalam pencatatan data penduduk di tahun 2014?
- I** : Sebenarnya permasalahan ini kesalahan manusia. Mungkin para petugas pencatat sudah kelelahan, sehingga terjadi kesalahan dalam penulisan. Tapi itu sudah dibenahi dengan adanya revisi dari petugas pencatat



**SURAT KETERANGAN**

Dengan ini kami,

Nama : Indria Purwaningsih

Umur : 54 Tahun

Pekerjaan : Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember

Menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Yogga Setiawan

Alamat : Jln. Kalimantan No. 18, Jember

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Jember.

Telah melakukan wawancara dengan responden pada tanggal 26 Oktober 2014 guna mendapatkan data untuk melengkapi penulisan skripsi dengan judul “Perkembangan Industri Pariwisata di Kabupaten Jember Tahun 2003 – 2014”.

Jember, 26 Desember 2014



Indria Purwaningsih



**Cuplikan Hasil Wawancara dengan Indria Purwaningsih**

- P** : Apa memang benar terjadi kesalahan dalam pencatatan jumlah penduduk tahun 2014 yang bisa melonjak samapai 500 ribu orang? Apa memang hal itu kesalahan petuga pencatat atau memang terjadi lonjakan dalam setahun?
- I** : Ya, memang kesalahan fatalnya pada petugas pencatat dalam mencatat angka jumlah penduduk. Tapi menurut data penduduk memang terjadi lonjakan jumlah penduduk pada tahun 2014, tapi tidak sampai 500 jiwa. Sebenarnya terjadi jumlah lonjakan yang cukup signifikan. Ini dipengaruhi oleh kedatangan para penduduk dari luar daerah yang belum tercatat. Banyak terjadi migrasi orang-orang luar ke daerah Jember yang belum tercatat sampai tahun 2014. Ini yang menjadikan lonjakan jumlah penduduk?
- P** : Apakah selama ini tidak ada sensus jumlah penduduk?
- I** : Ya, ada mas. Tapi itu kan dilakukan setiap lima tahun sekali, dan biasanya bertepatan dengan pemilu. Data yang diperoleh KPU itu adalah data yang belum resmi. Kita belum mengkaji ulang data tersebut, tiba-tiba KPU sudah menyatakan di media bahwa ada kesalahan dalam pencatatan. Baru setelah kita konfirmasi dan kita jelaskan KPU baru memahami permasalahannya.

**SURAT KETERANGAN**

Dengan ini kami,

Nama : Eko Heru Sunarso

Umur : 54 Tahun

Pekerjaan : Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Jember

Menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Yogga Setiawan

Alamat : Jln. Kalimantan No. 18, Jember

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Jember.

Telah melakukan wawancara dengan responden pada tanggal 26 Oktober 2014 guna mendapatkan data untuk melengkapi penulisan skripsi dengan judul “Perkembangan Industri Pariwisata di Kabupaten Jember Tahun 2003 – 2014”.

Jember, 26 Desember 2014



Eko Heru Sunarso

**Cuplikan Hasil Wawancara dengan Eko Heru Sunarso**

- P** : Bagaimana menurut pandangan bapak tentang pariwisata Jember yang selama ini didakwa kurang berkembang dan banyak permasalahan-permasalahan yang menghambat jalannya pariwisata?
- P** : Ya, kita memang mengauai bahwa banyak permasalahan yang mengiringi ketika berbicara tentang pariwisata. Kita tahu bahwa kondisi sosial politik Jember baru tertib dan aman sekitar 7 sampai Sembilan tahun terakhir. Masa kepemimpinan Syamsul Hadi banyak terjadi protes, dan hal ini otomatis tidak terurusnya pariwisata di Jember.
- P** : Tapi kan sudah ada badan yang bertanggung jawab dalam mengelola pariwisata?
- I** : Ya, meskipun ada, namun itu tidak menjadikan pariwisata bisa dikembangkan. Kita juga harus memperhitungkan kekurangan fasilitas badan pengelola pariwisata. Apalagi kebijakan pemerintah belum bisa dijadikan dasar pelaksanaan waktu itu. Ditambah lagi pemerintah masih ribut-ribut dengan tuntutan rakyat yang terus berdemonstrasi. Secara tidak langsung pemerintah akhirnya tidak punya waktu untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pariwisata. Akibatnya banyak kekayaan alam yang dimiliki Jember, seperti peninggalan jaman purbakala hilang dicuri oknum yang tidak bertanggung jawab.
- P** : Menurut bapak apa memang harus dibenahi fasilitas-fasilitas tempat wisata, seperti jalan, tempat penginapan dan lain sebagainya?
- I** : Sebenarnya sudah banyak usulan yang masuk, tetapi usulan itu tidak serta merta diterima. Ya, tapi tidak semua harus dibenahi. Kita perlu melihat kondisi sosial geografi tempat kebedaan wisata tersebut. Kita harus mengkajinya lebih dahulu. Ada sebagian yang mengusulkan agar dibangun fasilitas-fasilitas yang memadai, seperti perbaikan jalan di tempat-tempat wisata. Tapi menurut kami itu, tidak semua tempat-tempat wisata dibangun akses jalan yang memudahkan ke tempat-tempat wisata. Kita harus mengkaji dulu karakter dan topografi tempat wisata tersebut. Misalnya tempat wisata konservasi hutan lindung di Bande Alit. Wilayah ini kan kawasan lindung. Tidak harus jalan diperbaiki agar wisatawan mudah menjangkaunya. Kita perlu memikirkan hal-hal lain yang terkait. Apa tidak akan memudahkan bagi para oknum untuk merusak kawasan ini dengan pencurian telur penyu atau perburuan hewan liar lainnya. Padahal kawasan hutan lindung ini cocok bagi para wisatawan yang ingin olah raga alam. Kita sudah memikirkan dan memang sengaja tidak membangun akses jalan yang mudah ke kawasan hutan lindung. Ini dimaksudkan agar wisatawan bisa menikmati alam sambil berolahraga atau yang dikenal *surfing*.